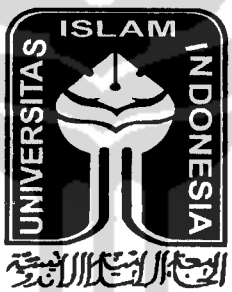
Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa Periode Tahun 1998-2001

SKRIPSI



Oleh :

Nama	:	Dadang Tulus Pawanto
Nomor Mahasiswa	:	01313027
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006

Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa Periode Tahun 1998-2001

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Dadang Tulus Pawanto
Nomor Mahasiswa : 01313027
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti di maksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku".

Yogyakarta, 9 Pebruari 2006

Penulis,

Dadang Tulus Pawanto

PENGESAHAN

Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa
Periode Tahun 1998-2001

Nama	:	Dadang Tulus Pawanto
Nomor Mahasiswa	:	01313027
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 9 Pebruari 2006
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,

Dra. Diana Wijayanti, M.Si

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS KESENJANGAN PENDAPATAN REGIONAL DI JAWA PERIODE TAHUN 1998-2001

Disusun Oleh: DADANG TULUS PAWANTO
Nomor mahasiswa: 01313027

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 18 Maret 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi	: Dra.Diana Wijayanti,M.Si	.....
Penguji I	: Drs. Sahabudin Sidiq, MA	.....
Penguji II	: Dra. Indah Susantun, M.Si	.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Suwarsono, MA

Motto :

Salamun'alaikum Warahmah.....

❀ *"Ono rego ono rupo".* ❀ *(Pepatah Jawa)*

Wassalamu'alaikum Warahmah.....

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannnirrahim,

Dengan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT serta Sholawat dan Salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan segala ketulusan hati, skripsi ini kupersembahkan teruntuk :

- ***"Ayah dan Ibuku Tercinta"***
- ***Agama***
- ***Bangsa***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan do'a dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa Periode Tahun 1998-2001".**

Adapun penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ekonomi Pembangunan pada Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Suwarsono, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
3. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sahabudin Sidiq, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Jurusan Ekonomi Pembangunan.

6. Kedua orang tuaku yang tercinta bapak Paimo Ahmad Fadhilah dan ibu Minarwati atas do'a, cinta dan kasih sayang, bimbingan, kepercayaan, nasehat, pengorbanan moral dan material, serta teladan hidup yang telah kalian berikan kepada putra mu, semoga aku bisa menjadi kebanggaan 'tuk kalian, sebagaimana aku bangga menjadi putra kalian.
7. Adik-adikku tercinta, De'Arie n De'Reya thanks for spirit. Semoga indahnya kebersamaan kita akan terjaga untuk selamanya. Amiin....
8. Teruntuk nDe' qu "Diyah Satriyani" terima kasih atas doa, support, cinta, kasih sayang, perhatian dan kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Keberhasilan ini merupakan wujud dari semua balasan doa, support, cinta, kasih sayang, perhatian dan kepercayaan yang nDe' berikan kepada qu. Semoga kita dapat mewujudkan cita2 kita berdua. Thanks for all. ILU
9. Buat temen-temen kontrakan, Ezzo (kerempeng mana keren), Oz (kamu dimana..??), Topik n Neni (g bosen SLJJ ni...), Iari (makasih dah beneri kompter qu), Alip (dah jadi Es-Mud ya), Cipto (mbah dukun), Adit (request lagunya Slank yo...), Agyl (wani piro kamar qu??), Dedi n Eti' (ha.. yo.. tak kandak'e mas mu loh).
10. Heri Wahono S, Irma Latifah, Irwan "dr. Untu" dan Pak Tutugo yang telah banyak membantu atas pengerjaan skripri ini. Terima kasih banyak.
11. Keluarga besar di Temanggung, Magelang, Jogja dan Madiun atas semua dukunganya.

12. Semua teman-teman seperjuangan EP 2001 yang sedikit banyak ikut membantu penelitian ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, seluruh pembaca dan penelitian yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Pebruari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ii

Halaman Pengesahan Skripsi iii

Halaman Pengesahan Ujian iv

Halaman Motto v

Halaman Persembahan vi

Kata Pengantar ix

Daftar Isi x

Daftar Tabel xiv

Daftar Gambar xv

Daftar Lampiran xvi

Abstrak xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Rumusan Masalah 5

1.3.Tujuan Penelitian 5

1.4.Manfaat Penelitian 6

1.5.Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografis Jawa 8

2.2. Keadaan Penduduk di Jawa 9
2.3. Keadaan Perekonomian di Jawa 10
2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto 10
2.3.2. PDRB Per Kapita 12
2.4. Keadaan Struktur Ekonomi di Jawa 13
2.4.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha 13
2.4.2. PDRB Menurut Penggunaan 16
BAB III KAJIAN PUSTAKA
3.1. Penelitian oleh Sutarno dan Mudrajad Kuncoro 19
3.2. Penelitian oleh Takahiro Akita dan Armida S. Alisjahbana 21
BAB IV LANDASAN TEORI
4.1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi 24
4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 25
4.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi 26
4.3.1. Teori Adam Smith 26
4.3.2. Teori David Ricardo 28
4.3.3. Teori Thomas Robert Malthus 28
4.3.4. Teori Joseph Schumpeter 29
4.4. Pembangunan Ekonomi Daerah 30
4.5. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah 31
4.6. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 32
4.6.1. Strategi Upaya Minimum Kritis 32
4.6.2. Strategi Pembangunan Seimbang 34

4.6.2.1. Menurut Rosenstein-Rodan dan Nurkse (*strategi pembangunan keseimbangan pada sisi permintaan*) 34

4.6.2.2. Menurut Scitovsky dan Lewis (*strategi pembangunan keseimbang pada sisi penawaran*) 35

4.6.3. Strategi Pembangunan Tak Seimbang 36

4.6.3.1. Pembangunan Tak Seimbang Antara Sektor Prasarana dan Sektor Produktif 37

4.6.3.2. Pembangunan Tak Seimbang Dalam Sektor Produktif 39

4.7. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah 40

4.7.1. Teori Ekonomi Neo Klasik 40

4.7.2. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*) 40

4.7.3. Teori Lokasi 41

4.7.4. Teori Tempat Sentral 41

4.7.5. Teori Kausasi Kumulatif 41

4.7.6. Model Daya Tarik (*Attraction)* 42

4.8. Definisi Kesenjangan 42

4.9. Hipotesis Kurva U-Terbalik Kuznets 43

BAB V METODE PENELITIAN

5.1. Obyek Penelitian 44

5.2. Data dan Sumber Data 44

5.2.1. Indeks entropy Theil 44

5.2.2. Hipotesis Kuznets 45

5.2.3. Korelasi Pearson 45

5.3. Metode Analisis 45

5.3.1. Indeks Entropy Theil 46

5.3.2. Hipotesis Kuznets (Kurva U-Terbalik) 47

5.3.3. Korelasi Pearson 48

BAB VI ANALISIS DATA

6.1. Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional 50

6.1.1. Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional dalam Propinsi 51

6.1.2. Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional antar Propinsi 58

6.1.3. Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa 61

6.2. Hipotesis Kuznets 64

6.3. Korelasi Pearson 65

BAB VII KESIMPULAN dan IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan 67

7.2. Implikasi 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1. Pertumbuhan PDRB Jawa Atas Harga Konstan 1993 Menurut Propinsi, 1998-2001 4

2.1. PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993 dan Berlaku, 1998-2001 10

2.2. PDRB Per Kapita Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993 dan Berlaku, 1998-2001 12

2.3. PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha, 1998-2001 14

2.4. PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan, 1998-2001 17

6.1. Kesenjangan Pendapatan Regional dalam Propinsi di Jawa, 1998-2001 52

6.2. Kesenjangan Pendapatan Regional antar Propinsi di Jawa, 1998-2001 59

6.3. Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa, 1998-2001 62

6.4. Korelasi antara Kesenjangan Pendapatan Regional dan Pertumbuhan PDRB di Jawa, 1998-2001 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

6.1. Grafik Total Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa 62

6.2. Kurva Hubungan antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Regional dengan Pertumbuhan PDRB di Jawa 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran — Halaman

I. Tingkat Kepadatan Penduduk Jawa menurut Kabupaten/Kota, 2001 74

II. Laju Pertumbuhan dan Persentase PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Kabupaten/Kota, 1998-2001 77

III. PDRB Per Kapita Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Kabupaten/Kota, 1998-2001 81

IV. PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993 Per Propinsi, Menurut Lapangan Usaha, 1998-2001 83

V. PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993 Per Propinsi, Menurut Pengunaan, 1998-2001 87

VI. Jumlah Perusahaan, Nilai Output dan Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi Per Propinsi di Jawa, 2001 88

VII. PDRB per kapita dan Jumlah Penduduk Tahun 1998-2001 91

VIII. Share PDRB dan Share Populasi Tahun 1998-2001 93

IX. Share PDRB / Share Populasi dan Log Share PDRB / Share Populasi Tahun 1998-2001 95

X. Hasil Perhitungan Indeks Entropy Theil Persamaan 6.1 Tahun 1998-2001 97

XI. Hasil Perhitungan Indeks Entropt Theil Persamaan 6.2-6.4 Tahun 1998-2001 99

XII. Grafik Dalam Propinsi, Antar Propinsi, dan Total Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa, Tahun 1998-2001 100

XIII. Kurva Hubungan antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Regional dengan Pertumbuhan PDRB di Jawa Tahun 1998-2001 101

XIV. Korelasi antara Kesenjangan Pendapatan Regional dan Pertumbuhan PDRB di Jawa Tahun 1998-2001 102

Abstrak

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah sering kali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang cepat, sementara beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama, ini disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber yang dimiliki. Di samping itu, banyak investor dan penanam modal yang lebih ingin menanamkan modalnya pada suatu daerah yang telah terpenuhi fasilitasnya, karena dengan berbagai pertimbangan. Selain itu, proses pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru yang difokuskan pada industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap cara yang paling tepat dan efektif dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi dengan harapan dapat menciptakan trickle down effects. Ternyata, sejarah menunjukkan bahwa efek "cucuran kebawah" tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat. Sebagai hasilnya, pesatnya pembangunan selama seperempat abad terakhir (sebelum terjadi krisis) ternyata masih meninggalkan dominasi pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada selama ini, terutama Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek). Untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan regional terdapat berbagai macam alat analisis, tetapi penulis memilih indeks kesenjangan entropy Theil dikarenakan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan indeks kesenjangan lainnya. Dengan menggunakan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk per kabupaten se-Jawa selama periode tahun 1998-2001, sebagai hasilnya menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar propinsi menyumbang rata-rata lebih dari 99% selama periode pengamatan dibanding kesenjangan pendapatan dalam propinsi. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa kesenjangan pendapatan antar propinsi di Jawa sangatlah timpang, dan kesenjangan antar kabupaten/kota dalam propinsi memiliki kesenjangan yang lebih kecil. Selain indeks kesenjangan entropy Theil dalam penelitian ini juga digunakan hipotesis Kuznets dan korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan PDRB dan tingkat kesenjangan regional di Jawa. Dengan menggunakan data per propinsi selama periode pengamatan, didapatkan hasil korelasi Pearson tidak signifikan yang berarti juga bahwa tidak terdapat korelasi antara pertumbuhan PDRB dan tingkat kesenjangan regional. Sedangkan berdasarkan hipotesis Kuznets yang menggambarkan hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan regional dengan pertumbuhan PDRB yang berbentuk U terbalik juga tidak berlaku di Jawa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004: 110). Tujuan utama pembangunan ekonomi ini, selain untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Kondisi ini, menghadapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik lokal (daerah) secara tepat. Sebab, perbedaan kondisi daerah akan membawa implikasi terhadap corak pembangunan yang akan diterapkan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah pola kebijakan yang pernah diterapkan

diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya (Arsyad, 1999).

Pembangunan dalam lingkup negara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah sering kali menjadi permasahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang cepat, sementara beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama, ini disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber yang dimiliki. Di samping itu, banyak investor dan penanam modal yang lebih ingin menanamkan modalnya pada suatu daerah yang telah terpenuhi fasilitasnya, karena dengan berbagai pertimbangan, termasuk dalam menunjang kemudahan usahanya. Sehingga, bagi daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas-fasilitas tersebut dimungkinkan akan relatif lebih tertinggal. Alhasil, akan menyebabkan kesenjangan antar daerah yang semakin besar, yang akan berdampak pula terhadap tingkat pendapatan antar daerah tersebut.

Selain itu, tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru adalah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besarlah cara yang pada saat itu dianggap paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi. Dengan kepercayaan yang penuh bahwa akan ada efek "cucuran kebawah", pada awalnya pemerintahan pada masa itu memusatkan pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang, dan hanya di Jawa atau Jakarta pada khususnya, karena pada saat itu semua kreteria itu ada pada daerah

tetapi, sejarah menunjukkan bahwa efek "cucuran kebawah" tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat (Tambunan, 2003: 177). Sebagai hasilnya, pesatnya pembangunan selama seperempat abad terakhir (sebelum terjadi krisis) ternyata masih meninggalkan dominasi pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada selama ini, terutama Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek) (Basri, 2002: 169). Pesatnya perekonomian daerah-daerah ini tidak lepas dari kontribusi sektor industri pengolahan dalam menopang lebih dari 50% kegiatan ekonomi setiap daerah per tahunnya (Kompas, 2001). Kegiatan ekonomi yang menyita lebih dari 50% potensi ekonomi daerah setempat, akan memberikan peran yang tidak sedikit dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah (Kompas, 2001) dalam wilayah Jabotabek. Kondisi ini, jika berlangsung terus-menerus akan berakibat pada terjadinya perbedaan tingkat pembangunan yang akan membawa dampak kepada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin besar (Kuncoro, 2004: 128). Ini semua mengindikasikan bahwa jika dilihat indikator PDRB kondisi kesenjangan ini sudah sedemikian parah.

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan PDRB antar propinsi di Jawa berdasarkan atas harga konstan 1993 selama periode 1998-2001, menunjukkan bahwa pada awal tahun 1998 atau setelah adanya krisis, tingkat pertumbuhan PDRB di Jawa mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -12,20%. Sebagai dampak awal krisis ekonomi, pertumbuhan negatif ini juga berlaku bagi semua propinsi yang ada di Jawa.

Propinsi Jawa Barat adalah propinsi yang mengalami perumbuhan negatif paling tinggi yaitu sebesar -17,57% dan Propinsi DI Yogyakarta adalah propinsi dengan pertumbuhan negatif yang paling rendah, sebesar -11,18%. Walaupun demikian, pada tahun 2001 perekonomian Pulau Jawa mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,69%, dengan pertumbuhan rata-rata di kelima propinsi yaitu sebesar 3,49%.

Tabel 1.1
Pertumbuhan PDRB Jawa Atas Harga Konstan 1993
Menurut Propinsi, 1998-2001
(Juta Rupiah)

Tahun	DKI Jakarta		Jawa Barat		Jawa Tengah	
	PDRB (000.000,00)	Pertumb (%)	PDRB (000.000,00)	Pertumb (%)	PDRB (000.000,00)	Pertumb (%)
1998	57.380.516,88	-17,49	58.847.840,13	-17,57	38.065.273,35	-11,74
1999	57.215.224,28	-0,29	60.200.704,78	2,30	39.394.513,74	3,49
2000	59.694.418,67	4,33	55.660.204,92	-7,54	40.941.667,09	3,93
2001	61.865.971,02	3,64	57.824.843,16	3,89	42.305.176,42	3,33
	Rata-rata	-2,45	Rata-rata	-4,78	Rata-rata	-0.25

Tahun	DI Yogyakarta		Jawa Timur		Pulau Jawa	
	PDRB (000.000,00)	Pertumb (%)	PDRB (000.000,00)	Pertumb (%)	PDRB (000.000,00)	Pertumb (%)
1998	4.777.199,00	-11,18	54.398.896,74	-16,12	213.469.727	-12,20
1999	4.824.445,72	0,99	55.058.970,46	1,21	216.693.859	1,51
2000	5.017.709,21	4,01	56.856.520,71	3,26	234.619.215	8,27
2001	5.182.543,85	3,29	58.750.180,22	3,33	243.277.447	3,69
	Rata-rata	-0,73	Rata-rata	-2,08	Rata-rata	0,32

Sumber : *PDRB menutut Propinsi*, BPS Yogyakarta, *diolah.*

Pada tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa dampak krisis ekonomi ini lebih besar melanda pada propinsi yang relatif lebih maju perekonomiannya, seperti: Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Jawa Timur. Dimana, maju pesatnya perekonomian sangat mempengaruhi tingkat pembangunan pada suatu daerah.

Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak kepada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan pendapatan regional antar daerah semakin besar. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **"Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa Periode Tahun 1998-2001"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah :

a. Seberapa besar tingkat kesenjangan pendapatan regional di Jawa pada periode tahun 1998-2001.
b. Seberapa besar tingkat kesenjangan pendapatan dalam dan antar propinsi di Jawa pada periode tahun 1998-2001.
c. Apakah hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Jawa pada periode tahun 1998-2001.
d. Bagaimana korelasi antara pertumbuhan PDRB dengan kesenjangan pendapatan regional di Jawa pada periode tahun 1998-2001.

1.3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesenjangan pendapatan regional di Jawa pada periode tahun 1998-2001.

b. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesenjangan pendapatan dalam dan antar propinsi di Jawa pada periode tahun 1998-2001.

c. Untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Jawa pada periode tahun 1998-2001.

d. Untuk mengetahui korelasi antara pertumbuhan PDRB dengan kesenjangan pendapatan regional di Jawa pada periode tahun 1998-2001.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain :

a. Bagi pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam menanggulangi atau mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah serta sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengalokasian pendapatan nasional kepada daerah sesuai kondisi alamnya yang dapat berkembang.

b. Bagi pihak lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan pengembangan pengetahuan lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk kasus-kasus serupa yaitu kesenjangan pendapatan regional.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas subyek penelitian.

BAB III : KAJIAN PUSTAKA

Berisi pengkajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV : LANDASAN TEORI

Berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI : ANALISIS DATA

Berisi hasil analisa data yang diperoleh dalam penelitian.

BAB VII: KESIMPULAN dan IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan analisis dan implikasi yang sesuai dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografis Jawa

Pulau Jawa adalah salah satu dari lima pulau terbesar yang ada Indonesia, yang terletak di bagian selatan dari negara yang mendapat julukan sebagai negara maritim yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari negara maritim, Pulau Jawa di kelilingi oleh berbagai perairan, baik samudra, laut maupun selat. Pulau Jawa, di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda.

Pulau Jawa membentang dari barat ke timur sepanjang 1.050 km dengan lebar maksimal pulau sebesar 204 km, dengan luas 127.569 km^2 atau sebesar 6,75% dari luas Indonesia. Secara administrasi sampai akhir tahun 2001, Jawa tercatat memiliki 82 kabupaten dan 32 kota yang termasuk dalam 6 propinsi yaitu Propinsi DKI Jakarta, dengan luas 661,52 km^2 (0,52%); Propinsi Jawa Barat, dengan luas 34.985,93 km^2 (27,23%); Propinsi Jawa Tengah, dengan luas 32.685,23 km^2 (25,44%); Propinsi DI Yogyakarta, dengan luas 3.188,83 km^2 (2,48%); Propinsi Jawa Timur, dengan luas 48.174,70 km^2 (37,50%); dan propinsi yang baru di bentuk yaitu Propinsi Banten, dengan luas 8.781,14 km^2 (6,83%) yang terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota. Namun, dalam penelitian ini Propinsi Banten tidak digunakan sebagai obyek penelitian dikarenakan propinsi ini masih

baru dibentuk sehingga data-data yang diperlukan dalam penelitian ini belum sepenuhnya tercatat selama periode pengamatan.

2.2. Keadaan Penduduk di Jawa

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk pada tahun 2001, tercatat bahwa Jawa adalah salah satu pulau besar yang terdapat di wilayah Kepulauan Indonesia yaitu sebesar 937,17 jiwa/km^2. Populasi penduduk total Jawa mencapai 112.175.997 jiwa atau sebesar 53,70% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,84%.

Dilihat dari data per propinsi pada tahun 2001, Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 32,16% atau sebesar 36.075.322 jiwa, dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan propinsi dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 2,97% atau sebesar 3.327.954 jiwa. Sedangkan menurut tingkat kepadatan penduduknya, Propinsi DKI Jakarta adalah propinsi yang paling padat yaitu sebesar 11.221,70 jiwa/km^2 dengan luas wilayah 661,52 km^2 dan jumlah penduduk 7.423.379 jiwa. Sebaliknya propinsi yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah adalah Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 711,69 jiwa/km^2, dengan luas wilayah 48.174,70 km^2 dan jumlah penduduknya sebesar 34.285.524 jiwa.

Sedangkan jika dilihat dari data per kabupaten/kota pada tahun 2001, Kabupaten Bandung merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 4.235.146 jiwa, dan Kota Mojokerto merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 108.025 jiwa.

Menurut tingkat kepadatan penduduknya, Kota Jakarta Pusat adalah kabupaten/kota yang paling padat yaitu sebesar 19.399,98 jiwa/km^2 dengan luas wilayah 47,90 km^2 dan jumlah penduduk 929.259 jiwa. Sebaliknya kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah adalah Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 225,16 jiwa/km^2, dengan luas wilayah 5.782,50 km^2 dan jumlah penduduknya sebesar 1.475.438 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 1.

2.3. Keadaan Perekonomian di Jawa

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator yang digunakan dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Total PDRB Jawa pada tahun 2001 berdasarkan atas harga konstan 1993 adalah sebesar Rp. 243.277.447 juta, dan berdasarkan atas harga berlaku adalah sebesar Rp. 810.545.329 juta.

Tabel 2.1
PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993
dan Berlaku, 1998-2001
(Juta Rupiah)

PDRB	1998	1999	2000	2001
Atas dasar harga konstan	213.469.727	216.693.859	234.619.215	243.277.447
Atas dasar harga berlaku	511.554.881	587.486.544	707.466.851	810.545.329

Sumber : *PDRB Propinsi Indonesia menurut Lapangan Usaha*, BPS Yogyakarta

Sedangkan laju pertumbuhan perekonomian Jawa menurut harga konstan yaitu sebesar 3,69% pada tahun 2001 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,66%. Pertumbuhan negatif ini dikarenakan pada tahun 1998, laju pertumbuhan

PDRB Indonesia pada umumnya dan Jawa pada khususnya mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh adanya krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia di pertengahan tahun 1997 yaitu sebesar -12,20%. Sedangkan laju pertumbuhan perekonomian Jawa menurut harga berlaku selama periode pengamatan mengalami fluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,59% atau mencapai 14,57% pada tahun 2001.

Jika dilihat dari tingkat PDRB menurut kabupaten/kota di Jawa pada lampiran 2, kabupaten/kota yang mempunyai PDRB tertinggi pada tahun 1998 adalah Kota Surabaya yaitu sebesar Rp. 15.429.196,46 juta dengan laju pertumbuhan sebesar -1,88% terhadap tahun sebelumnya, atau menyokong sebesar 7,23% terhadap pembentukan PDRB propinsi yang sebesar Rp. 54.398.896,74 juta. Sedangkan pada tahun 1999-2001, kabupaten/kota yang mempunyai PDRB tertinggi adalah Kabupaten Jakarta Pusat yaitu sebesar Rp. 14.117.272,12 juta pada tahun 1999 dan mencapai Rp. 15.319.082,06 juta pada tahun 2001, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,80% pada tahun 1999-2001. Nilai PDRB Jakarta Pusat pada tahun 2001 memberikan kontribusi sebesar 6,30% terhadap pembentukan PDRB propinsi yaitu sebesar Rp. 15.319.082,06 juta. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai PDRB terendah secara berturut-turut selama periode pengamatan adalah Kota Blitar yaitu sebesar Rp. 163.701,87 juta pada tahun 1998 dan mencapai Rp. 175.703,14 juta pada tahun 2001, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0.84% selama periode pengamatan. Nilai PDRB Kota Blitar pada tahun 2001 memberikan kontribusi sebesar 0,87% terhadap pembentukan PDRB propinsi yaitu sebesar

Rp. 14.028.424,46 juta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Daerah Regional Bruto antar kabupaten/kota sangat bervariasi dan memiliki perbedaan pendapatan yang cukup timpang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing propinsi, serta perbedaan kemampuan tiap kabupaten/kota dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Daerah Regional Bruto.

2.3.2. PDRB Per Kapita

Seperti yang diketahui bahwa PDRB per kapita adalah total PDRB dibandingkan dengan total penduduk, sehingga diperoleh tingkat pendapatan per kapita penduduk secara agregat. Dengan memperhatikan tingkat PDRB per kapita, kita dapat memiliki gambaran mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa menurut kabupaten/kota pada tahun 1998-2001.

Tabel 2.2
PDRB Per Kapita Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993
dan Berlaku, 1998-2001
(Juta Rupiah)

PDRB per kapita	1998	1999	2000	2001
Atas dasar harga konstan	1.817.132	1.822.817	1.934.306	1.981.019
Atas dasar harga berlaku	4.354.542	4.941.905	5.832.673	6.600.307

Sumber : *PDRB Propinsi Indonesia menurut Lapangan Usaha*, BPS Yogyakarta

Dari Tabel 2.2 di atas, dapat kita lihat bahwa total PDRB per kapita Jawa pada tahun 2001 berdasarkan atas harga konstan 1993 adalah sebesar Rp. 1.981.019 juta, dan berdasarkan atas harga berlaku adalah sebesar Rp. 6.600.307 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa berdasarkan harga konstan

1993 adalah sebesar 2,41% pada tahun 2001 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,80% selama periode pengamatan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa berdasarkan harga berlaku adalah sebesar 13.16% pada tahun 2001 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,24% selama periode pengamatan.

Akan tetapi jika dilihat dari tingkat PDRB per kapita atas harga konstan menurut kabupaten/kota di Jawa (lampiran 3), pada tahun 1998-2001 kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Kediri yaitu sebesar Rp. 24.309.283 juta pada tahun 1998 dan mencapai Rp. 27.343.574 juta pada tahun 2001 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,32 selama periode pengamatan. Dan kabupaten/kota yang mempunyai PDRB per kapita terendah secara berturut-turut selama periode pengamatan adalah Kabupaten Grobogan yaitu sebesar Rp. 570.154 juta pada tahun 1998 dan mencapai Rp. 583.422 juta pada tahun 2001, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -2,17 selama periode pengamatan.

2.4. Keadaan Struktur Ekonomi di Jawa

2.4.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan komposisi nilai PDRB atas dasar harga konstan 1993 dapat diketahui bahwa sektor yang memberikan kontribusi tertinggi selama periode pengamatan dalam pembentukan PDRB Jawa adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar Rp. 60.457.482,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi sebesar Rp. 65.263.947,00 juta pada tahun 2001. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil selama periode pengamatan dalam pembentukan PDRB Jawa

adalah sektor Pertambangan & Penggalian yaitu sebesar Rp. 4.020.027,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi sebesar Rp. 5.112.807,00 juta pada tahun 2001.

Tabel 2.3
PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Lapangan Usaha, 1998-2001
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1998	1999	2000	2001
1. PERTANIAN	**26,765,464**	**28,274,296**	**27,442,176**	**28,057,676**
a. Tanaman Bahan Makanan	18,670,297	19,779,642	19,011,511	19,033,060
b. Tanaman Perkebunan	2,478,550	2,530,337	2,489,424	2,542,399
c. Peternakan	2,984,508	3,319,074	3,381,237	3,722,117
d. Kehutanan	809,016	773,249	704,539	778,229
e. Perikanan	1,823,093	1,871,994	1,855,465	1,981,871
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**4,020,027**	**3,598,644**	**5,276,163**	**5,112,807**
a. Minyak & Gas	2,871,789	2,216,093	3,558,763	3,248,160
b. Pertambangan tanpa Migas	21,712	17,958	40,386	41,825
c. Penggalian	1,126,526	1,364,593	1,677,014	1,822,822
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**60,457,482**	**61,236,416**	**63,151,424**	**65,263,947**
a. Industri Migas	3,245,096	3,352,175	3,572,896	3,653,831
1. Pengilangan Minyak Bumi	3,245,096	3,352,175	3,572,896	3,653,831
2. Gas Alam Cair	0	0	0	0
b. Industri Tanpa Migas	57,212,386	57,884,241	59,578,528	61,610,116
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	**4,538,507**	**5,025,757**	**5,060,945**	**5,358,286**
a. Listrik	3,790,660	4,202,072	4,184,912	4,433,192
b. Gas	240,706	246,497	282,503	307,210
c. Air Bersih	507,141	577,188	593,530	617,884
5. BANGUNAN	**13,540,204**	**13,253,692**	**13,099,545**	**13,228,052**
6. PERDAG, HOTEL & RESTORAN	**45,891,046**	**46,709,743**	**45,638,525**	**48,075,297**
a. Perdagangan Besar & Eceran	36,606,443	37,029,373	36,097,613	37,621,442
b. Hotel	1,307,258	1,333,245	1,446,031	1,498,336
c. Air Bersih	7,977,345	8,347,125	8,094,881	8,955,519
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	**15,143,613**	**15,900,078**	**15,852,763**	**16,622,942**
a. Pengangkutan	11,592,346	11,781,326	11,385,043	11,754,486
1. Angkutan Rel	204,566	232,151	248,033	225,540
2. Angkutan Jalan Raya	7,323,190	7,281,807	7,130,353	7,486,121
3. Angkutan Laut, Sungai, Danau & Penyeberangan	1,462,605	1,566,718	1,636,909	1,619,367
4. Angkutan Udara	519,241	479,334	246,974	265,122
5. Jasa Penunjang Angkutan	2,082,744	2,221,316	2,122,774	2,158,336
b. Komunikasi	3,551,267	4,118,752	4,467,720	4,868,456
8. KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	**21,031,615**	**20,229,219**	**20,743,688**	**21,631,687**
a. bank	8,345,943	7,185,428	7,583,639	7,999,372
b. Lembaga Keu. Tanpa Bank & Jasa	2,139,894	2,115,744	2,191,740	2,278,537
c. Sewa Bangunan	6,874,798	7,089,658	7,060,377	7,254,208
d. Jasa Perusahaan	3,670,980	3,838,389	3,907,932	4,099,570
9. JASA-JASA	**22,027,765**	**22,466,016**	**21,813,838**	**22,586,096**
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	11,362,798	11,339,307	10,748,509	11,033,971
b. Swasta	10,664,967	11,126,709	11,065,329	11,552,125
1. Sosial Kemasyarakatan	2,796,802	2,882,451	2,844,685	2,903,940
2. Hiburan & Rekreasi	416,998	431,156	450,962	469,625
3. Perorangan & Rumahtangga	7,451,167	7,813,102	7,769,682	8,178,560
Jumlah	**213,415,723**	**216,693,861**	**218,079,067**	**225,936,790**

Sumber : *PDRB Propinsi Indonesia menurut Lapangan Usaha*, BPS Yogyakarta

Jika dilihat dari tingkat PDRB Jawa menurut lapangan usaha per propinsi pada lampiran 4, propinsi yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB pada sektor Industri Pengolahan selama periode pengamatan adalah Propinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 20.913.548,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi Rp. 22.908.171,00 juta pada tahun 2001. Sedangkan propinsi yang memberikan kontribusi terkecil bagi pembentukan PDRB pada sektor Industri Pengolahan selama periode pengamatan adalah Propinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar Rp. 659,816,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi Rp. 667.486,00 juta pada tahun 2001. Sedangkan propinsi yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB untuk sektor unggulan kedua Jawa yaitu sektor Perdagangan, Hotel & Restoran adalah Propinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp. 13.466.401,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi Rp. 14.799.488,00 juta pada tahun 2001. Dan propinsi yang memberikan kontribusi terkecil bagi pembentukan PDRB bagi sektor Perdagangan, Hotel & Restoran adalah Propinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp. 742.580,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi Rp. 846.634,00 juta pada tahun 2001.

Seperti terlihat pada tabel 2.3 diatas, bahwa sektor yang memberikan kontribusi tertinggi selama periode pengamatan dalam pembentukan PDRB Jawa adalah sektor Industri Pengolahan. Tingginya peran sektor industri pengolahan ini, jika diklasifikasikan lagi, setiap daerah memiliki sub-sektor industri masing-masing yang menjadi unggulan dalam menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Berdasarkan pada industri pengolahan besar dan sedang, yang ada pada setiap propinsi di Jawa, tercatat bahwa pada tahun 2001, Propinsi Jawa Barat

mampu menciptakan nilai tambah tertinggi (Rp. 55.734.157,00 juta) diikuti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah (masing-masing Rp. 53.190.325,00 juta, Rp. 38.520.772,00 juta, Rp. 22.885.384,00 juta) dan terendah DI Yogyakarta (Rp. 872.594,00 juta) (lihat lampiran 6).

Tingginya nilai tambah industri pengolahan di Jawa Barat ini, sangat didukung oleh keberadaan sub-sektor Industri Tekstil, Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, serta Industri Mesin dan Perlengkapannya, dengan kontribusi di ketiga sub-sektor ini yaitu sebesar 37,86%. Sedangkan, Jawa Timur yang mampu menciptakan nilai tambah tertinggi kedua setelah Jawa Barat, keberadaan sub-sektor Industri Pengolahan Tembakaulah yang memberikan kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 43,50%, jauh lebih tinggi dibanding sub-sektor industri lainnya yang pada daerah ini. Kondisi ini jauh berbeda dengan yang dialami oleh DI Yogyakarta. Propinsi yang hanya mampu menciptakan nilai tambah terendah di Jawa untuk sektor industri pengolahan ini, disebabkan oleh kesentrasi kegiatan ekonomi daerah ini yang tidak didasarkan pada sektor industri pengolahan, melainkan pada sektor jasa (lihat lampiran 4).

2.4.2. PDRB Menurut Penggunaan

Berdasarkan komposisi nilai PDRB atas dasar harga konstan 1993 dapat diketahui bahwa komponen yang memberikan kontribusi tertinggi selama periode pengamatan dalam pembentukan PDRB Jawa adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar Rp. 120.890.397,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi sebesar Rp. 141.656.801,00 juta pada tahun 2001. Sedangkan komponen

yang memberikan kontribusi terkecil selama periode pengamatan dalam pembentukan PDRB Jawa adalah Perubahan Stok yaitu sebesar Rp. 1.640.258,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi sebesar Rp. -3.336.070,00 juta pada tahun 2001.

Tabel 2.4
PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Penggunaan, 1998-2001
(Juta Rupiah)

Penggunaan	1998	1999	2000	2001
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	120.890.397	130.473.330	136.342.555	141.656.801
2. Penguluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1.893.996	2.197.959	2.096.061	2.193.750
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.863.344	16.358.453	17955.377	18.780.140
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	55.871.729	53.632.390	50.257.668	51.417.874
5. Perubahan Stok	1.640.258	2.410617	880.212	-3.336.070
6. Ekspor Barang dan Jasa	117.495.997	108.535.444	111.088.115	106.359.214
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	99.185.994	96.914.335	100.540.920	91.134.947
Jumlah	**213.469.727**	**216.693.858**	**218.079.068**	**225.936.762**

Sumber : *PDRB Propinsi Indonesia menurut Penggunaan*, BPS Yogyakarta

Jika dilihat dari tingkat PDRB Jawa menurut lapangan usaha per propinsi pada lampiran 5, propinsi yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga selama periode pengamatan adalah Propinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 37.454.120,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi Rp. 43.881.311,00 juta pada tahun 2001. Sedangkan propinsi yang memberikan kontribusi terkecil bagi pembentukan PDRB pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga selama periode pengamatan adalah Propinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar Rp. 2.221.831,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi Rp. 2.426.877,00 juta pada tahun 2001. Sedangkan propinsi yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB untuk komponen unggulan kedua Jawa yaitu Ekspor Barang dan Jasa adalah Propinsi Jawa Timur, yaitu sebesar Rp. 40.341.992,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi

Rp. 33.520.035,00 juta pada tahun 2001. Dan propinsi yang memberikan kontribusi terkecil bagi pembentukan PDRB bagi sektor komponen Ekspor Barang dan Jasa adalah Propinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp. 1.656.437,00 juta pada tahun 1998 dan menjadi Rp. 1.642.254,00 juta pada tahun 2001.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1. Penelitian oleh Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2004)

Dalam penelitiannya, Sutarno dan Kuncoro mengambil judul "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan: Kasus Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah". Penelitian ini menggunakan alat analisis indeks ketimpangan regional yaitu tipologi daerah, indeks Williamson, indeks entropy Theil, hipotesis Kuznets dan korelasi Pearson.

Dalam penelitiannya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam periode pengamatan 1993-2000, terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik di analisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropy Theil. Dari hasil analisis menggunakan indeks Williamson menunjukan bahwa, rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Banyumas yang sebesar 0,426 lebih rendah bila dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,691. Ketimpangan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 cenderung meningkat. Pada tahun 1993 nilai ketimpangan indeks Williamson mencapai 0,35 dan mengalami peningkatan sebesar 0,47 pada tahun 2000.

Sedangkan dengan menggunakan indeks ketimpangan entropy Theil pada periode tahun 1993-2000, rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar 0,0396. Seperti indeks Williamson, indeks entropy Theil juga menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun

1993, nilai indeks entropy Theil sebesar 0,032 dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 0,046. Dimana yang menyebabkan ketimpangan ini salah satunya adalah disebabkan oleh aktivitas ekonomi secara spasial.

Berdasarkan tipologi daerah menurut pertumbuhan dan pendapatan per kapita, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok :

1. Daerah/kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) : Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Ajibarang, Sokaraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur.
2. Daerah/kecamatan maju tapi tertekan (*high income but low growth*) : Kecamatan Wangon, Somagede, dan Baturaden.
3. Daerah/kecamatan yang berkembang cepat (*high growth but low income*) : Kecamatan Kebasen, Purwojati, Cilongok, Karanglewas, dan Purwokerto Utara.
4. Daerah/kecamatan yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) : Kecamatan Lumbir, Jatilawang, Ralawon, Kemranjen, Sumpih, Tambak, Patikraja, Gumelar, Pekuncen, Kedungbanten, dan Sumbang.

Dalam penelitian ini hipotesis kurva U-terbaliknya Kuznets dapat dikatakan berlaku di Kabupaten Banyumas. Hal ini berarti bahwa, pada masa awal pertumbuhan ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun. Sedangkan berdasarkan perhitungan analisis korelasi Pearson antara pertumbuhan PDRB dengan indeks Williamson dan indeks entropy

Theil, didapatkan nilai -0,24 dan -0,422. Ini berarti bahwa adanya korelasi yang kurang kuat secara statistik karena terbukti tidak signifikan pada $\alpha = 10\%$.

3.2. Penelitian oleh Takahiro Akita dan Armida S. Alisjahbana (2002)

Dalam penelitiannya yang berjudul *"Regional of Inequality in Indonesia and The Initial Impact of The Economic Crisis"* yang diukur dengan menggunakan indeks entropy Theil berdasarkan pada district-level GDP dan data populasi pada periode 1993-1998, menunjukkan bahwa total kesenjangan pendapatan regional meningkat secara signifikan pada periode 1993-1997 yaitu dari 0,262-0,287. Selama itu pula Indonesia mencapai angka pertumbuhan rata-rata pertahun lebih dari 7%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan di dalam komponen kesenjangan dalam propinsi, khususnya di propinsi Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Komponen kesenjangan antar propinsi juga meningkat, tetapi hanya sedikit sekali, sedangkan komponen kesenjangan antar daerah sangat stabil. Sehingga, kesenjangan dalam propinsi memainkan peran yang semakin penting di dalam penentuan total kesenjangan pendapatan regional, atau mencapai kira-kira setengah dari seluruh kesenjangan pendapatan regional pada tahun 1997. Sedangkan komponen-komponen kesenjangan antar propinsi dan antar daerah memberi konstribusi secara berturut-turut sebesar 43,1% dan 7,2%. Akan tetapi akan sangat menyesatkan jika meningkatnya atau berkurangnya kesenjangan regional hanya didasarkan pada data propinsi, khususnya pada saat ekonomi berkembang dengan sangat cepat dan mengalami perubahan struktural yang signifikan.

Dilihat dari segi GDP per kapita, krisis ekonomi menyebabkan ekonomi Indonesia kembali ke level di tahun 1995. Tetapi dampaknya sangat berbeda antara propinsi dan kabupaten, namun demikian total kesenjangan pendapatan regional, seperti diukur menggunakan data tingkat kabupaten, turun ke 0,266 pada tahun 1998 yang sesuai dengan level pada tahun 1993-1994. Analisa dekomposisi kesenjangan yang bertumpu pada dua tahap menunjukkan, bahwa lebih dari tiga per empat penurunan tersebut disebabkan karena turunnya komponen kesenjangan antar propinsi. Daerah Jawa-Bali memainkan peran yang menyolok dalam turunnya komponen ini. DKI Jakarta merupakan provinsi yang terkena implikasi terparah di Indonesia. Dikarenakan adanya ketergantungan pada sektor-sektor penghasil non-migas, financial dan konstruksi, yang berdampak tidak menguntungkan terhadap adanya krisis. GDP per kapita DKI Jakarta turun sampai hampir 20%, kembali pada tingkat terendah pada tahun 1993. Ekonomi propinsi-propinsi Jawa lainnya juga menyusut secara signifikan, tetapi dampaknya tidak separah di Jakarta. Sebagai akibatnya, jurang pemisah GDP per kapita antara DKI Jakarta dan provinsi-provinsi Jawa-Bali lainnya menjadi menyempit.

Selain pulau Jawa-Bali, Sumatra juga mengalami penurunan GDP per kapita sebesar 7% sebagai akibat adanya krisis. Akan tetapi krisis ekonomi tidak begitu berpengaruh yang sangat kuat terhadap Kalimantan dan Sulawesi. Akibatnya, komponen kesenjangan antar daerah juga mengalami penurunan pada tahun 1998.

Dampak krisis ekonomi muncul secara tidak proposional dalam area-area perkotaan di Jawa-Bali. Di DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta kabupaten-

kabupaten Jabotabek sangat terpengaruh, dengan pengecualian Jakarta Pusat, semuanya mencatat penurunan 20% atau lebih dalam GDP per kapita. Akibatnya kesenjangan dalam propinsi untuk propinsi Jawa Barat mengalami penurunan. Begitu juga di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, hal ini disebabkan karena penurunan yang sangat tinggi GDP per kapita di kota-kota utama propinsi. Observasi-observasi ini menegaskan bahwa krisis ekonomi Indonesia adalah krisis yang mengakibatkan penderitaan daerah perkotaan di Jawa. Tetapi, dengan perkecualian Batam, daerah-daerah perkotaan di Sumatra juga mengalami penurunan GDP per kapita yang relatif besar. Sehingga krisis telah menimpa secara parah di daerah-daerah perkotaan Sumatera, seperti halnya Jawa-Bali.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk (Boediono, 1985: 1).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Sukirno, 1978: 14).

Schumpeter, Ursula Hicks, dan A. Madison mengartikan istilah pertumbuhan ekonomi sebagai pertumbuhan ukuran kuantitatif kinerja perekonomian, seperti GNP, GNP per kapita dan sebagainya (Hakim, 2002: 12).

Menurut Kuznet, Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyelesaian-penyelesaian berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 1998: 130).

4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat adalah :

1. **Akumulasi modal**, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada proporsi tertentu dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan barang-barang baru yang akan mengikatkan modal (*capital stock*) fiskal suatu negara (yaitu jumlah riil bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fiskal) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar.
2. **Pertumbuhan penduduk**. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.
3. **Kemajuan teknologi**. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Ada 2 klasifikasi kemajuan teknologi yaitu :

a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.

b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama (Arsyad, 1997: 162-167).

4.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

4.3.1. Teori Adam Smith

Menurut Adam Smith, ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu: pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

1. Pertumbuhan output total.

   Menurut Adam Smith terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara yaitu :

   a. Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi "tanah").

      Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber alam yang tersedia merupakan "batas maksimum" bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok kapital yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut

akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

b. Sumber daya manusia (jumlah penduduk).

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Menurut Adam Smith, perkembangan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena perkembangan penduduk akan memperluas pasar. Pada tahap ini dianggap bahwa berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi akan tersedia lewat proses pertumbuhan atau penurunan penduduk.

c. Stok barang kapital yang ada.

Stok kapital memegang peran paling penting dalam menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan output. Besar kecilnya stok kapital dalam perekonomian pada saat tertentu akan sangat menentukan output yang diproduksi, dan dengan demikian akan menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi pada tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital dan laju pertumbuhan stok kapital sampai tahap pertumbuhan dimana sumber-sumber alam mulai membatasi.

2. Pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk akan meningkat atau menurun tergantung pada stok modal dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu (Hakim, 2002: 64-67).

4.3.2. Teori David Ricardo

David Ricardo (1772-1823) mengembangkan teori pertumbuhan klasik lebih lanjut. Tetapi garis besar dari proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik oleh David Ricardo tidak terlalu berbeda dengan teori Adam Smith. David Ricardo menganggap jumlah faktor produksi tanah (yaitu sumber-sumber alam) tidak bisa bertambah, sehingga akan bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Boediono, 1985: 17).

4.3.3. Teori Thomas Robert Malthus

Malthus menitikberatkan perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian tergantung pada jumlah output yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut (Jhingan, 1993: 121).

4.3.4. Teori Joseph Schumpeter

Menurut Joseph Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur*. Sejalan dengan para ekonom modern, Schumpeter tidak terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan penduduk maupun aspek keterbatasan sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi. Bagi Schumpeter, masalah penduduk tidak dianggap sebagai aspek sentral dari proses pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1985: 47).

Gambaran umum dari proses kemajuan ekonomi yang dikemukakan Schumpeter adalah dengan membedakan antara pengertian pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi walaupun keduanya sumber peningkatan output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta yang menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreatifitas para wiraswastanya (Boediono, 1985: 48).

Inovasi mempunyai tiga pengaruh, yaitu diperkenalkannya teknologi baru, inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan dana penting bagi akumulasi kapital, dan inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan diikuti oleh

timbulnya proses imitasi yaitu adanya pengusaha baru yang meniru teknologi baru tersebut.

4.4. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 1992: 14).

Menurut Blakely (1989), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dimana, kesemuanya ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 1999: 108-109).

Pembangunan ekonomi oleh beberapa ekonom dibedakan pengertiannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai :

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tingkat tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP/GNP yang berlaku dalam suatu daerah/negara diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (Sukirno, 1978: 14).

4.5. Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab (Arsyad, 1999: 127).

Ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya, yang baik untuk daerah belum tentu baik secara nasional.

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat.

Ada 2 kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya.
2. Kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda (Kuncoro, 2004: 46-47).

4.6. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

4.6.1. Strategi Upaya Minimum Kritis

Harvey Leibenstian dalam tesisnya menyatakan bahwa sebagian NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan *(vicious circle of poverty)* yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari permasalahan ini adalah dengan melakukan upaya minimum kritis (*critical minimum effort*) tertentu yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat dimana pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable*) akan terjadi.

Menurut Leibenstein, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita adalah :

1. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di sini merupakan sebagai faktor penghabat pendapatan sedangkan pendapatan per kapita sebagai kekuatan pendorong pendapatan.
2. Skala disekonomis internal akibat tak dapat dibaginya faktor produksi.
3. Disekonomis eksternal akibat adanya ketergantungan eksternal.
4. Hambatan budaya dan kelembagaan yang ada di NSB.

Leibenstein mengatakan bahwa untuk mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (*steady economic growth*) diperlukan suatu kondisi dimana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu. Dengan kata lain, menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada hambatan dan rangasangan. Hambatan berdampak menurunkan pendapatan per kapita dari tingkat sebelumnya, sementara rangsangan cenderung akan meningkatkan pendapatan per kapita.

Menurut Leibenstein, terdapat 2 macam rangsangan yaitu :

1. Rangsangan *zero-sum* yang tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi hanya bersifat upaya distributif. Rangsangan *zero-sum* bukanlah berupa kegiatan secara riil yang menciptakan pendapatan nyata tetapi sekedar pemindahan likuiditas dari pemilik yang satu ke pemilik yang lain.
2. Rangsangan *positive-sum* yang menuju pada pembangunan pendapatan nasional, sebagai contoh pelaksanaan proyek investasi riil yang mendatangkan laba (Arsyad, 1999: 77-82).

4.6.2. Strategi Pembangunan Seimbang

Strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersamaan. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran.

1. Sisi penawaran, memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang.
2. Sebaliknya sisi permintaan, berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh.

Dengan demikian pembangunan seimbang dapat didefinisikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran dan permintaan.

4.6.2.1. Menurut Rosenstein-Rodan dan Nurkse (*strategi pembangunan keseimbangan pada sisi permintaan*)

Teori dorongan besar-besaran (*big push theory*) pertama kali dikemukakan oleh Paul Rosentein-Rodan (1953), untuk menciptakan pembangunan program pembangunan dengan melakukan industri secara besar-besaran. Rosentein-Rodan (1953) dan Nurke (1953), beranggapan bahwa melakukan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang

lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah semacam itu agar lebih cepat dari pada di daerah yang lebih kaya. Oleh sebab itu, dalam upaya melaksanakan program tersebut berbagi industri harus dibangun secara berbarengan.

Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang berkaitan erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi. Menurut Rosentein-Rodan, pembangunan industri secara besar-besaran akan menciptakan 3 macam ektenalitas ekonomi yaitu: yang diakibatkan oleh perluasan pasar, kerena industri yang sama berdekatan, dan karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.

4.6.2.2. Menurut Scitovsky dan Lewis (*strategi pembangunan keseimbang pada sisi penawaran*)

Scitovsky menyimpulkan bahwa integrasi secara menyeluruh antara berbagai industri diperlukan untuk menghapus perbedaan antara keuntungan perorangan (*private profil*) dan keuntungan masyarakat (*public benefit*). Ia menganggap bahwa mekanisme pasar tidak dapat mengintegrasikan antar berbagai industri yang sifatnya mendambakan eksternalitas dari perusahaan lain, karena mekanisme pasar berfungsi terutama untuk menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya-sumberdaya dalam jangka pendek.

Sementara itu analisis Lewis menunjukkan perlunya pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor industri, serta antara sektor dalam negeri dan luar negeri. Ini semua harus didukung oleh terciptanya keseimbangan yang sesuai antara sektor industri dan pertanian serta antara kegiatan produksi barang untuk kebutuhan domestik dan kebutuhan ekspor sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan lancar.

Menurut Scitovsky, eksternalitas dapat dibedakan menjadi 2 yaitu seperti yang terdapat dalam teori keseimbangan (*equilibrium theory*) dan seperti yang terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi konvensional), eksternalitas diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain (Arsyad, 1999: 87-96).

4.6.3. Strategi Pembangunan Tak Seimbang

Pembangunan tak seimbang pertama kali dikemukakan oleh Albert O Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka pembangunan tak seimbang adalah cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Menurut Hirschman, pandangan ini didasarkan pada pertimbangan :

1. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi nagara sedang berkembang mempunyai corak yang tidak seimbang.

2. Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia. Dalam melaksanakan program pembangunan tak seimbang maka usaha pembangunan pada suatu periode tertentu dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman modal yang terpengaruh (*induced investment*) di berbagai sektor pada periode waktu berikutnya. Oleh karena itu, sumberdaya-sumberdaya yang sangat langka itu dapat digunakan secara lebih efisien pada setiap tahap pembangunan.
3. Pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (*bottlenecks*) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi ini akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Ini dikarenakan, keadaan tersebut akan menjadi perangsang untuk melaksankan investasi yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Sehingga pembangunan tak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang.

4.6.3.1. Pembangunan Tak Seimbang Antara Sektor Prasarana dan Sektor Produktif

Menurut Hirschman, persoalan pokok dalam strategi pembangunan tak seimbang adalah bagaimana caranya untuk menentukan proyek mana yang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumber daya lainnya melebihi modal dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan yang maksimal. Akan tetapi, penentuan

prioritas dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan haruslah ditentukan atas dasar penilaian tentang tingkat kemampuan dari proyek tersebut dalam mendorong pengembangan proyek-proyek lain sehingga dapat menjamin terciptanya pembangunan maksimal di waktu yang akan datang.

Ada 3 cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam mengembangkan sektor prasarana (*Social Overhead Capital*) dan sektor produktif (*Directly Productive Activities*) dalam mendorong pembangunan ekonomi selanjutnya, yaitu :

1. Pembangunan seimbang antara kedua sektor tersebut. Sektor prasarana dan sektor produktif berjalan beriringan dalam mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih maksimal di waktu yang akan datang.
2. Pembangunan tidak seimbang dimana pembangunan sektor prasarana lebih ditekankan. Lebih mendahulukan sektor prasarana dengan maksud sektor produktif dapat dikembangkan dengan biaya yang lebih rendah sehingga dapat mendorong atau merangsang pembangunan sektor produktif.
3. Pembangunan tidak seimbang dimana pembangunan sektor produktif lebih ditekankan. Mendahulukan sektor produktif, maka akan berakibat pada timbulnya masalah kekurangan prasarana, dan ketidakseimbangan ini akan menimbulkan dorongan untuk mengembangkan prasarana yang lebih baik bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

4.6.3.2. Pembangunan Tak Seimbang Dalam Sektor Produktif

Menurut Hirschman, dalam sektor produktif mekanisme pendorong pembangunan (*inducement mechanism*) yang tercipta sebagai akibat dari adanya hubungan antara berbagai industri dalam menyediakan barang-barang yang digunakan sebagai bahan mentah dalam industri lainnya dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Pengaruh keterkaitan ke belakang (*backward linkage effects*), adalah tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri-industri yang menyediakan input (bahan baku) bagi industri tersebut.
2. Pengaruh keterkaitan ke depan (*forward linkage effects*), adalah tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri-industri yang menggunakan produk industri yang pertama sebagai input (bahan baku) mereka.

Berdasarkan kepada besarnya keterkaitan antar industri, Hirschman mengelompokkan berbagai industri menjadi 2 golongan yaitu :

1. Industri satelit (*satellite industry*), yaitu industri yang paling banyak memperoleh dorongan dari pertumbuhan industri induk atau industri utama.
2. Industri non-satelit (*non-satellite industry*), yaitu industri yang akan terdorong perkembangannya jika beberapa industri yang menggunakan produknya berkembang secara bersama-sama sehingga menciptakan

pasar yang cukup besar untuk hasil industri non-satelit tersebut (Arsyad, 1999: 99-106).

4.7. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

4.7.1. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan dua konseb pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (*pembatasan*). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berpengaruh tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

4.7.2. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku

Strategi pembangunan daerah yang muncul adalah menekankan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Model ini akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global, namun model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

4.7.3. Teori Lokasi

Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. Hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan cenderung memilih lokasi yang dapat meminimumkan biaya namun memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar.

4.7.4. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*) dimana setiap sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

4.7.5. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin memburuk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (*cumulative causatiton*) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya.

4.7.6. Model Daya Tarik (*Attraction)*

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif. (Arsyad, 1999: 116-118)

4.8. Definisi Kesenjangan

Menurut Mudrajad Kuncoro, kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugerah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 1976).

Adelman dan Moris berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997: 111).

Menurut Mydral (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai

kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan antar daerah (Arsyad, 1999: 129).

4.9. Hipotesis Kurva U-Terbalik Kuznets

Simon Kuznets yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap berikutnya, distribusi pendapatannya akan membaik (Kuznets, 1955). Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konseb kurva "U-terbalik", karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan tampak seperti kurva U-terbalik (Todaro, 2000). Dimana ketidakmerataan pendapatan itu akan menurun seiring dengan peningkatan GNP per kapita pada tahap pembangunan selanjutnya (Kuncoro, 1997: 105).

Perlu ditekankan bahwa sumbangan Kuznets ini hanya berlaku untuk pola perubahan jangka panjang, sementara hubungan itu tidak berlaku untuk jangka pendek. Sebaliknya, kemerosotan jangka pendek dalam pertumbuhan pendapatan per kapita sering mengakibatkan ketimpangan yang menajam.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah wilayah penelitian yang meliputi seluruh populasi di lima propinsi yang ada di Jawa pada periode tahun 1998-2001. Meliputi : Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DI Yogyakarta, dan Propinsi Jawa Timur. Propinsi Banten dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai obyek penelitian dikarenakan propinsi ini masih baru dibentuk sehingga data-data yang diperlukan dalam penelitian ini belum sepenuhnya tercatat selama periode pengamatan.

5.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan adalah dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan berbagai data yang mendukung penelitian. Data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time-series*) tahun 1998-2001, maupun data kerat lintang (*cross-section*) antar kabupaten di Jawa.

5.2.1. Indeks entropy Theil

Untuk menghitung kesenjangan pendapatan regional di Jawa tahun 1998-2001 digunakan data :

1. PDRB per kapita kabupaten di Jawa, 1998-2001.
2. Rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten di Jawa, 1998-2001.

3. Jumlah penduduk kabupaten di Jawa, 1998-2001.
4. Total jumlah penduduk seluruh kabupaten di Jawa, 1998-2001.

5.2.2. Hipotesis Kuznets

Untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Jawa digunakan data :

1. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 1993 di Jawa, 1998-2001.
2. Indeks entropy Theil di Jawa, 1998-2001.

5.2.3. Korelasi Pearson

Sedangkan, untuk mengetahui korelasi antara pertumbuhan PDRB dengan indeks entropy Theil di Jawa, data yang digunakan adalah :

1. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 1993 di Jawa, 1998-2001.
2. Indeks entropy Theil di Jawa, 1998-2001.

5.3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu :

1. Analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan rumus tetapi berupa penjelasan dan keterangan-keterangan lengkap.
2. Analisis kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan topik permasalahan yang di teliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan :

5.3.1. Indeks Entropy Theil

Dalam penelitian ini akan digunakan indeks entropy Theil dalam mengukur kesenjangan pendapatan regional. Kelebihan indeks entropy Theil dibanding indeks-indeks yang lainnya adalah memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci dalam sub-unit geografis yang lebih kecil (Kuncoro,2002: 87). Dimana, digunakan pangsa jumlah penduduk sebagai pembobot *(weights)* dalam mengukurnya. Nilai indeks entropy Theil yang lebih rendah menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah, dan sebaliknya nilai indeks entropy Theil yang lebih tinggi menunjukkan kesenjangan yang lebih tinggi.

Karakteristik utama dari indeks entropy ini adalah kemampuannya untuk membedakan kesenjangan antar daerah *(between-region inequality)* dan kesenjangan dalam suatu daerah *(within-region inequality)* (Kuncoro, 2002). Dengan menggunakan alat analisis indeks entropy Theil akan diketahui ada tidaknya kesenjangan di Jawa. Rumus indeks entropy Theil adalah sebagai berikut (Ying, 2000) :

$$I_{Theil} = \sum (y_j/Y) \cdot \log[(y_j/Y)/(x_j/X)] \qquad (5.1)$$

Dimana :

I_{Theil} = indeks entropy Theil.

y_j = PDRB per kapita di kabupaten *j*.

Y = rata-rata PDRB per kapita di Jawa.

x_j = jumlah penduduk di kabupaten j.

X = jumlah penduduk di Jawa.

Selanjutnya dihitung kesenjangan dalam pulau dan antar propinsi, dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{Theil} = I_{(inter)} + \sum Y_i I_{i(intra)} \qquad (5.2)$$

Dimana i = 1 dan 2.

$I_{(inter)}$ adalah kesenjangan antar propinsi *(between-region inequality).*

$I_{i(intra)}$ adalah kesenjangan dalam propinsi *(within-region inequality).*

$$Y_i = \sum y_j, \qquad j \in i; i = 1,2.$$

$$X_i = \sum x_j, \qquad j \in i; i = 1,2.$$

$$I_{(inter)} = \sum Y_i . \log(Y_i / X_i) \qquad (5.3)$$

$$I_{i(intra)} = \sum (y_j / Y_i) . \log (y_j / Y_i) / (x_j / X_i) \qquad (5.4)$$

Dimana i = 1,2.

5.3.2. Hipotesis Kuznets (Kurva U-Terbalik)

Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indeks kesenjangan. Grafik tersebut merupakan hubungan antara pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan indeks entropy Theil selama periode pengamatan. Kurva U-terbalik menggambarkan kesenjangan distribusi pendapatan yang meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun pada tahap-tahap berikutnya.

5.3.3. Korelasi Pearson

Korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dikatakan dengan arah yang berlawanan.

Pada penilitian ini perhitungan koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan *Pearson product moment* yang dikemukakan oleh Karl Pearson, dimana korelasi Pearson ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan indeks entropy Theil (Djarwanto dan Subagyo, 1994: 327).

Rumus :

$$r = \frac{\left(n.\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)}{\sqrt{n.\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}\sqrt{n.\sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)^2}} \qquad (5.5)$$

Keterangan :

r = korelasi Pearson

X = pertumbuhan PDRB

Y = indeks entropy Theil

Koefisien korelasi dinyatakan dengan bilangan antara 0 (nol) sampai +1 atau 0 (nol) sampai -1. Apabila koefisien korelasi r mendekati +1 atau -1 berarti terdapat hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan. Apabila r

sama dengan +1 atau -1 berarti terdapat hubungan positif sempurna (Djarwanto, 1993: 327).

BAB VI

ANALISIS DATA

6.1. Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional

Dalam mengukur kesenjangan pendapatan regional (*regional income inequality*) digunakan indeks entropy Theil (*Theil Entropy Indeks of Inequality*). Konseb entropy dari suatu distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi (Kuncoro, 2002) sehingga, dengan indeks ini dapat dilakukan pengukuran kesenjangan antar wilayah. Karakteristik utama dari penggunaan indeks entropy Theil ini adalah kemampuannya untuk membedakan kesenjangan antar daerah *(between-region inequality)* dan kesenjangan dalam suatu daerah *(within-region inequality)* (Kuncoro, 2002).

Penelitian ini menggunakan indeks entropy Theil dalam mengukur kesenjangan pendapatan regional. Indeks kesenjangan ini, dalam mengukur kesenjangan pendapatan regional menggunakan data PDRB per kapita dan pangsa jumlah penduduk sebagai pembobotnya. Pengukuran indeks entropy Theil adalah sebagai berikut (Ying, 2000) :

$$I_{Theil} = \sum (y_j/Y) \cdot \log[(y_j/Y)/(x_j/X)] \qquad (6.1)$$

Dimana :

I_{Theil} = indeks entropy Theil.

y_j = PDRB per kapita di kabupaten *j*.

Y = rata-rata PDRB per kapita di Jawa.

x_j = jumlah penduduk di kabupaten j.

X = jumlah penduduk di Jawa.

Selanjutnya dihitung kesenjangan dalam pulau dan antar propinsi, dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{Theil} = I_{(inter)} + \sum Y_i I_{i(intra)} \qquad (6.2)$$

Dimana i = 1 dan 2.

$I_{(inter)}$ adalah kesenjangan antar propinsi *(between-region inequality).*

$I_{i(intra)}$ adalah kesenjangan dalam propinsi *(within-region inequality).*

$$Y_i = \sum y_j, \qquad j \in i; i = 1,2.$$

$$X_i = \sum x_j, \qquad j \in i; i = 1,2.$$

$$I_{(inter)} = \sum Y_i . \log(Y_i / X_i) \qquad (6.3)$$

$$I_{i(intra)} = \sum (y_j / Y_i) . \log (y_j / Y_i) / (x_j / X_i) \qquad (6.4)$$

Dimana i = 1,2.

6.1.1. Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional dalam Propinsi

Perhitungan indeks entropy Theil di Jawa dengan mengunakan persamaan 6.4 pada periode pengamatan 1998-2001, yang meliputi 5 propinsi, yaitu Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Jawa Timur, yang terbagi dalam 78 kabupaten dan 30 kota sampai akhir tahun 2001. Dari hasil perhitungan didapatkan angka indeks kesenjangan pendapatan pada tabel 6.1, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1
Kesenjangan Pendapatan Regional dalam Propinsi
di Jawa, 1998-2001

Propinsi	1998		1999		2000		2001	
	Theil	%	Theil	%	Theil	%	Theil	%
DKI Jakarta	0.0009	0.04	0.0009	0.04	0.0008	0.04	0.0011	0.05
Jawa Barat	0.0020	0.09	0.0021	0.09	0.0022	0.10	0.0022	0.10
Jawa Tengah	0.0017	0.08	0.0017	0.07	0.0017	0.08	0.0017	0.08
DI Yogyakarta	0.0006	0.03	0.0006	0.03	0.0006	0.03	0.0006	0.03
Jawa Timur	0.0053	0.24	0.0054	0.24	0.0056	0.26	0.0056	0.26
Within Province	0.0105	0.47	0.0107	0.47	0.0109	0.51	0.0112	0.51

Sumber : *Data diolah.*

Dari tabel 6.1 di atas dapat kita lihat bahwa tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi (*within province*) mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,0105 pada tahun 1998 menjadi 0,0112 pada tahun 2001. Sebagai hasilnya, kontribusinya kepada keseluruhan kesenjangan pendapatan regional naik dari 0,47% menjadi 0,51%. Peningkatan ini, terutama dipengaruhi oleh peningkatan tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Dengan keseluruhan kontribusi terhadap tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi yang mencapai 0,37% pada tahun 1998, dan meningkat menjadi 0,41% pada tahun 2001 (lihat tabel 6.1). Sedangkan 2 propinsi lainnya, menunjukkan tingkatan kesenjangan pendapatan dalam propinsi yang relatif stabil di setiap tahunnya.

Dari hasil pengamatan, propinsi yang memiliki tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi yang tertinggi adalah Propinsi Jawa Timur. Dengan tingkat kesenjangan, dari total tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi yaitu 0,24% pada tahun 1998 yang meningkat menjadi 0,26% pada tahun 2001 (lihat tabel 6.1). Peningkatan ini, disebabkan oleh eksistensinya

beberapa kabupaten yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, seperti Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Gersik. Menurut data PDRB per kapita daerah ini, Kota Kediri adalah paling tinggi di seluruh Jawa, yaitu sebesar Rp. 24.309.283,00 juta menjadi Rp. 27.343.574,00 juta selama periode 1998-2001 (lihat lampiran 3). Sementara, dibawahnya Kota Kediri adalah Kota Surabaya dan Gresik, dengan PDRB per kapita yang mencapai Rp. 5.694.010,00 juta dan Rp. 3.160.535,00 juta pada akhir 2001. Ketiganya secara signifikan lebih tinggi dari sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur.

Keberadaan kabupaten/kota dengan PDRB per kapita sangat tinggi ini, sangat dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi daerah tersebut. Ekonomi daerah dengan kosentrasi kegiatan ekonomi tinggi akan cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah cenderung akan mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah (Tambunan, 2003: 176). Kota Kediri dengan karakteristik ekonomi pabrik rokok terbesarnya yaitu PT Gudang Garam, keberadaannya sangat menentukan bagi pembentukan nilai PDRB per kapita atau total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga Kota Kediri. Pada tahun 2000, lebih dari 78% dari kegiatan ekonomi di kota tersebut diduduki oleh industri pengolahan dan kira-kira 68% diantaranya berasal dari Gudang Garam (Kompas, 2001). Sedangkan Kota Surabaya dengan status yang dimilikinya sebagai kota industri dan perdagangan, memang cukup pantas jika dilihat dari persentase kegiatan daerah ini di setiap tahunnya. Pada tahun 2000

saja, sektor industri menyumbang sekitar 35% dari total PDRB. Dan sekitar 32%-nya disumbang oleh sektor perdagangan (Kompas, 2001). Kedua sektor ini, mencakup juga hotel dan restoran, merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi bagi pembentukkan PDRB Kota Surabaya.

Keberadaan Gresik sebagai sentra-sentra industri besar berskala nasional, seperti industri semen PT Semen Gresik, industri pupuk PT Petrokimia Gersik, serta industri sarung PT Behaestex dengan merk dagang Atlas, Rubat, dan Marjan, telah membuat sektor ini (industri pengolahan) di setiap tahunnya menjadi penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB wilayah ini. Pada tahun 2000 saja, dengan laju pertumbuhan yang sebesar 1,72% (lihat lampiran 3), PDRB Gresik sekitar 48%-nya di sokong oleh sektor industri pengolahan, atau hampir setengah dari kegiatan ekonomi di wilayah ini di dominasi oleh sektor industri pengolahan (Kompas, 2001).

Sama halnya Jawa Timur, Jawa Barat yang memiliki tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi tertinggi kedua setelah Jawa Timur, juga menunjukkan kecenderungan peningkatan kesenjangan pendapatan dalam propinsi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,0020 pada tahun 1998 dan menjadi 0,0022 pada tahun 2001 (lihat tabel 6.1). Ini terutama juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota dalam propinsi cukup tinggi, seperti Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon dan Kota Tangerang. Keseluruhan kontribusi kesenjangan pendapatan dalam propinsi di ketiga kabupaten/kota ini mencapai 6,83% pada tahun 1998, dan menjadi 5,06% pada tahun 2001

(lihat lampiran 10). Turunnya kontribusi ini, sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah, pada kenyataannya justru mendorong peningkatan kesenjangan pendapatan dalam propinsi, lain halnya dengan antar propinsi.

Dilihat dari data PDRB per kapita propinsi ini, pada tahun 2001 Kabupaten Bekasi memiliki tingkat PDRB per kapita paling tinggi (Rp. 5.310.022,00 juta), diikuti oleh Kota Cirebon (Rp. 5.215.870,00 juta), lihat lampiran 3. Tingginya PDRB kedua kabupaten ini, tidak lepas dari kontribusi sektor-sektor unggulan dalam menopang kegiatan ekonomi kota tersebut. Di Cirebon, kombinasi sektor industri pengolahan dan perdagangan termasuk juga hotel dan restoran memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembentukan PDRB di daerah ini, yaitu sebesar 71,12% pada tahun 2001 (Kompas, 2003). Sedangkan di Bekasi, pada tahun yang sama, tidak kurang dari 60% total kegiatan ekonomi di daerah ini, didominasi oleh sektor industri pengolahan (Kompas, 2001) yang menjadikan Bekasi sebagai salah satu daerah kantong industri. Kegiatan ekonomi yang menyita lebih dari 50% potensi daerah setempat, akan memberikan peran yang tidak sedikit dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah (Kompas, 2001) dalam wilayah Jawa Barat.

Selain Jawa Timur dan Jawa Barat, propinsi yang juga menujukkan kecenderungan peningkatan kesenjangan pendapatan dalam propinsi adalah Propinsi DKI Jakarta, dari 0,0009 menjadi 0,0011 selama periode 1998-2001 (lihat tabel 6.1). Peningkatan ini, sangat dipengaruhi oleh beberapa kota yang tercatat mengalami peningkatan kesenjangan pendapatan selama periode yang

sama. Akan tetapi hanya peningkatan Jakarta Pusat yang cukup signifikan, kontribusinya terhadap tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi meningkat dari 7% menjadi 9% (lihat lampiran 10). Pada tahun 2001, Jakarta Pusat memiliki tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi yang paling tinggi di DKI Jakarta yaitu sebesar 22,3501 diikuti oleh Jakarta Utara dan Jakarta Selatan masing-masing sebesar 14,0050 dan 7,0977 (lihat lampiran 10). Tingginya tingkat kesenjangan ini, tidak lepas dari adanya kosentrasi kegitan ekonomi pada daerah tersebut, sebagai akibat adanya perlakuan khusus dari pemerintah pusat terhadap daerah ini, yang tanpa disadari telah membuat daerah ini memiliki berbagai macam karakteristik ekonomi. Kondisi yang demikian, mengantarkan Jakarta Pusat menjadi penghasil PDRB per kapita terbesar di DKI Jakarta atau tertinggi kedua di Jawa setelah Kota Kediri.

Sedangkan di Jawa Tengah, sama halnya dengan di propinsi-propinsi lain, keberadaan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus yang memiliki tingkat pendapatan per kapita sangat tinggi sebagai akibat adanya kosentrasi kegiatan ekonomi, juga memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi di Jawa Tengah. Dengan keseluruhan kontribusinya yang mencapai 3,76% pada tahun 1998 dan menjadi tingkatan yang sama pada tahun 2001 (lihat lampiran 10). Relatif stabilnya keseluruhan kontribusi ini terhadap tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi, merupakan salah satunya penyebab mengapa tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi di propinsi ini setiap tahunnya relatif stabil.

Adanya kosentrasi kegitan ekonomi pada suatu daerah, yang membuat daerah tersebut mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya lebih maju, seperti keberadaan sektor industri pengolahan, ternyata memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pembentukan nilai PDRB per kapita di kedua kabupaten tersebut. Di Kudus, pada tahun 2000 saja, PDRB per kapita daerah ini mencapai Rp. 4.401.219,00 juta (lihat lampiran 3), dan kira-kira 62%-nya dari total kegiatan ekonomi di daerah ini disumbang oleh sektor industri pengolahan, yang masih didominasi oleh industri rokok (Kompas, 2001). Sedangkan di Cilacap, keberadaan sentra-sentra industri yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, seperti kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Pertamina serta pabrik Semen Portland milik PT Cibinong, dan berbagai macam industri yang lain, juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pembentukan PDRB per kapita daerah ini. Terlihat pada tahun yang sama, tidak kurang dari 45% total kegiatan ekonomi yang mencapai Rp. 4.073.846,00 juta di sumbang oleh sektor industi pengolahan (Kompas, 2001), lihat lampiran 3.

Kondisi ini jauh berbeda dengan yang di alami DI Yogyakarta. Propinsi yang mempunyai tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi sebesar 0,0006 dan dengan kontribusi 0,03% selama periode pengamatan (lihat tabel 6.1), merupakan tingkatan terendah di Jawa. Ini dikarenakan faktanya bahwa, tidak seperti halnya Jawa Timur dan DKI Jakarta, yang diantaranya terdapat Kota Kediri dan Jakarta Pusat, DI Yogyakarta tidak memiliki kota yang secara ekonomi lebih dominan, serta perkembangannya

yang relatif seragam. Seperti yang dikemukan Mudrajad, secara keseluruhan DI Yogyakarta, jika dilihat dari kacamata transformasi strukturalnya selalu menunjukkan mekanisme dari agrikultur ke manufaktur, lalu ke sektor jasa. Dimana jasa adalah sebagai *leading sector,* terutama di bidang pariwisata, hotel, dan bisnis rumah kos yang dominan (Kompas, 2001). Kondisi ini semakin terlihat konkrit jika menyandingkan pendapatan per kapita masing-masing kabupaten/kota yang relatif sama. Pada tahun 2001, Kota Yogyakarta memiliki tingkatan PDRB per kapita paling tinggi (Rp. 2.790.989,00 juta) diikuti oleh Sleman dan Gunung Kidul (masing-masing Rp. 1.762.677,00 juta dan Rp. 1.273.877,00 juta) dan terendah Kulon Progo (Rp 810.355,00 juta), lihat lampiran 3.

6.1.2. Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional antar Propinsi

Perhitungan indeks entropy Theil di Pulau Jawa dengan mengunakan persamaan 6.3 pada periode pengamatan 1998-2001, yang meliputi 5 propinsi, yaitu Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dari hasil perhitungan didapatkan angka indeks kesenjangan pendapatan pada tabel 6.2, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.2
Kesenjangan Pendapatan Regional antar Propinsi
di Jawa, 1998-2001

Propinsi	1998		1999		2000		2001	
	Theil	%	Theil	%	Theil	%	Theil	%
DKI Jakarta	0.4942	22.12	0.4951	21.92	0.5118	23.65	0.5364	24.70
Jawa Barat	0.4097	18.34	0.4420	19.57	0.3452	15.95	0.3370	15.52
Jawa Tengah	0.4452	19.93	0.4490	19.87	0.4518	20.87	0.4418	20.34
DI Yogyakarta	0.0792	3.54	0.0784	3.47	0.0762	3.52	0.0738	3.40
Jawa Timur	0.7952	35.60	0.7839	34.70	0.7686	35.51	0.7716	35.53
Between Province	2.2234	99.53	2.2483	99.53	2.1536	99.49	2.1607	99.49

Sumber : *Data diolah.*

Walaupun tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi (*between province*) mengalami fluktuasi selama periode 1998-2001, akan tetapi kontribusinya terhadap tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi sedikit menunjukkan perbedaan, atau cenderung menurun (lihat tabel 6.2). Terlebih pada tahun 2000, terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,04% terhadap tahun sebelumnya. Penurunan ini, terutama sangat dipengaruhi oleh penurunan tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi, khususnya Jawa Barat. Dengan tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi sebesar 0,4420 pada tahun 1999, yang menurun menjadi 0,3452 pada tahun 2000 (lihat tabel 6.2). Turunnya tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi di Jawa Barat ini, sangat dipengaruhi oleh akibat adanya pemekaran wilayah. Dengan resmi berdirinya Propinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2000, serta ikut bergabungnya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang, serta Kota Cilegon yang dulunya bagian dari Kabupaten Serang, sangat berpengaruh terhadap turunnya nilai PDRB Jawa Barat pada tahun tersebut. Yang sebesar Rp. 55.660.204,92 juta atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7,54 (lihat lampiran 2).

Sedangkan dari hasil pengamatan, tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi di Jawa Timur adalah yang paling tinggi. Akan tetapi, ini menunjukkan kecenderungan yang sedikit turun, yaitu sebesar 0,7952 pada tahun 1998 menjadi 0,7716 pada tahun 2001 (lihat tabel 6.2). Sebagai hasilnya, kontribusinya kepada tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi juga turun dari 35,60% menjadi 35,53%. Penurunan ini, disebabkan karena PDRB per kapita Jawa Timur tumbuh lebih lambat dibanding propinsi-propinsi lain, sebagai refleksi dampak krisis ekonomi. Bahkan DI Yogyakarta sekalipun, yang memiliki tingkat kesenjangan antar propinsi paling rendah selama periode pengamatan.

Dari data PDRB propinsi menurut lapangan usaha di Jawa selama periode 1998-2001, menunjukkan bahwa keberadaan Jawa Timur dengan tingkatan kesenjangan pendapatan antar propinsi tertinggi, sangat didukung oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan rata-rata per tahunnya yang masing-masing mencapai Rp. 15.273.995,00 juta dan Rp. 11.879.671,00 juta, atau masing-masing tertinggi kedua di Jawa selama periode pengamatan (lihat lampiran 4). Pada tahun 2001 saja, kombinasi keduannya terhitung sekitar 48,29% dari total pembentukan PDRB Jawa Timur. Tingginya kedua sektor ini, tidak lepas dari peran tingkat investasi yang ditanamkan pada daerah ini. Dengan rata-rata yang sebesar Rp. 13.413.801,00 juta per tahunnya atau tertinggi kedua setelah DKI Jakarta telah menjadikan industri pengolahan sebagai tumpuan pembangunan dan pertumbuhan daerah ini (lihat lampiran 5). Selain itu, pada

tahun yang sama, tingginya peran sektor industri pengolahan ini sangat didukung oleh keberadaan industri pengolahan tembakau pada daerah tersebut, tercatat industri ini memberikan nilai tambah sebesar 43,50% dari total nilai tambah industri pengolahan Jawa Timur pada tahun tersebut (lihat lampiran 6).

Kondisi ini jauh berbeda dengan yang di alami DI Yogyakarta. Propinsi yang mengandalkan sektor jasa dalam kegiatan perekonomiannya ini, hanya menempatkan DI Yogyakarta pada urutan terakhir sebagai penghasil PDRB di Jawa. Ini semakin menegaskan bahwa keberadaan kekhususan karakteristik ekonomi pada suatu daerah yang memberikan kontribusi yang tinggi bagi pembentukan dan pertumbuhan PDRB, serta menjadikan daerah tersebut sebagai daerah kantong, akan semakin memperparah kesenjangan pendapatan antar propinsi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tadjoeddin dkk (2001), (Tambunan, 2003: 148-152).

6.1.3. Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa

Dengan menggunakan persamaan 6.1-6.4, dapat diukur kesenjangan antar propinsi dan antar kabupaten/kota dalam propinsi di Jawa. Dalam hal ini, Jawa yang terbagi dalam 5 propinsi yaitu Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, yang terbagi dalam 78 kabupaten dan 30 kota sampai akhir tahun 2001. Hasil perhitungan didapatkan angka indeks kesenjangan regional di Jawa pada tabel 6.3, yaitu sebagai berikut :

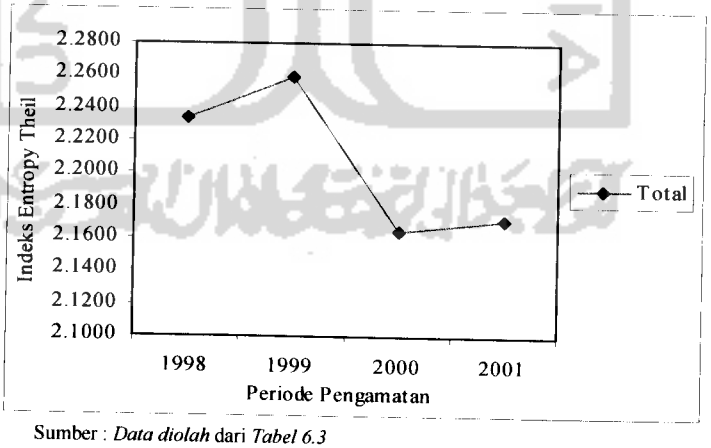
Tabel 6.3.
Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa,
Tahun 1998-2001

Indeks Entropy Theil	1998		1999		2000		2001		Rata-rata	
	Theil	%	Theil	%	Theil	%	Theil	%	Theil	%
Dalam Propinsi	0.0105	0.47	0.0107	0.47	0.0109	0.51	0.0112	0.51	0.0108	0.49
Antar Propinsi	2.2234	99.53	2.2483	99.53	2.1536	99.49	2.1607	99.49	2.1965	99.51
Total	2.2339	100.00	2.2590	100.00	2.1645	100.00	2.1718	100.00	2.2073	100.00

Sumber : *Data diolah.*

Dari tabel 6.3 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesenjangan antar propinsi mendominasi total kesenjangan pendapatan Jawa. Kesenjangan antar pulau menyumbangkan rata-rata lebih dari 99,5% atau sebesar 2,1965 dari total rata-rata Jawa yang sebesar 2,2073 selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum kesenjangan antar kabupaten/kota di dalam propinsi jauh lebih ringan dibandingkan antar propinsi.

Gambar 6.1.
Grafik Total Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa,
Tahun 1998-2001



Sumber : *Data diolah* dari *Tabel 6.3*

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama periode pengamatan tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi berkisar antara 2,1536 sampai 2,2483, sedangkan tingkat kesenjangan pendapatan dalam propinsi berkisar

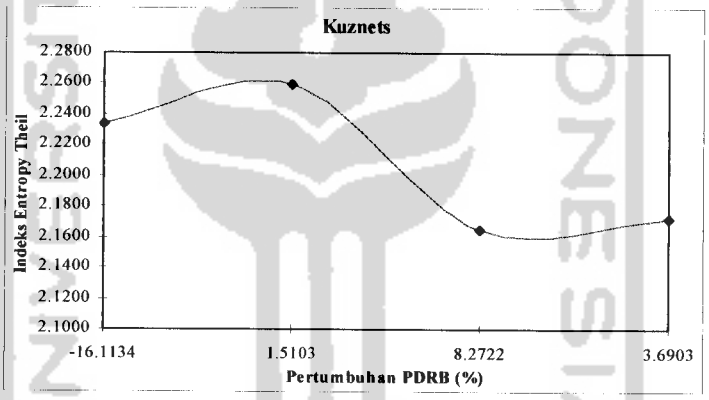
antara 0,0105 sampai dengan 0,0112. Hal ini menunjukkan bahwa total kesenjangan pendapatan Jawa sangat dipengaruhi oleh tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi. Ini disebabkan karena, secara hipotesis, keberadaan pendapatan kabupaten/kota merupakan komponen pembentuk pendapatan propinsi, atau dengan kata lain, besar kecilnya pendapatan propinsi sangat dipengaruhi oleh kontribusi pendapatan kabupaten/kota pada propinsi tersebut. Sehingga, keberadaan kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita sangat tinggi sebagai akibat adanya tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi yang membuat daerah itu memiliki kekhususan karakteristik ekonomi, serta menjadikan daerah tersebut sebagai daerah kantong, mempunyai peran yang sangat vital dalam memperparah kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota, terlebih antar propinsi.

Sedangkan, adanya pemekaran wilayah serta ikut bergabungnya beberapa kabupaten/kota dengan Propinsi Banten, yang mempunyai peran sentral terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat, sangat memberikan dampak yang cukup berarti. Ini terlihat dari turunnya nilai PDRB pada tahun tersebut yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -7,54 (lihat lampiran 2). Hal ini yang menyebabkan, mengapa total kesenjangan pendapatan mengalami penurunan, seperti yang terjadi pada tahun 2000.

6.2. Hipotesis Kuznets

Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kesenjangan pendapatan regional. Grafik tersebut merupakan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan tingkat kesenjangan pendapatan regional selama periode pengamatan.

Gambar 6.2.
Kurva Hubungan antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Regional dengan Pertumbuhan PDRB di Jawa
Tahun 1998-2001



Sumber : *Data diolah* dari *Tabel 6.3.*

Pada gambar 6.2 di atas, menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets yang menggambarkan hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan regional dengan pertumbuhan PDRB yang berbentuk U terbalik tidak berlaku di Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap berikutnya, kesenjangan pendapatannya akan membaik, ini tidak terjadi. Sebab, seperti terlihat pada gambar 6.2 di atas, itu hanya sebuah gejolak kegiatan ekonomi jangka pendek. Perlu ditekankan bahwa sumbangan Kuznets ini hanya berlaku untuk pola

perubahan jangka panjang, sementara hubungan itu tidak berlaku untuk jangka pendek.

6.3. Korelasi Pearson

Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tingkat kesenjangan pendapatan regional maka digunakan metode Korelasi Pearson (*Pearson product moment*). Dikatakan berkorelasi apabila dua variabel dimana perubahan pada variabel yang satu akan diikuti pada perubahan variabel yang lain. Hasil perhitungan korelasi Pearson antara pertumbuhan PDRB dengan tingkat kesenjangan pendapatan regional dapat dilihat pada tabel 6.4.

Tabel 6.4
Korelasi antara Kesenjangan Pendapatan Regional
dan Pertumbuhan PDRB di Jawa,
Tahun 1998-2001

Korelasi	Pertumbuhan PDRB	Signifikansi
Indeks Entropy Theil	-0,595	0,405

Sumber : *Data diolah* dari *Tabel 6.3.*

Tidak signifikan menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan PDRB dan tingkat kesenjangan pendapatan regional. Hal ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan pertumbuhan PDRB maka peningkatan tersebut tidak akan mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan regional. Atau dengan kata lain ketika pertumbuhan PDRB Jawa mengalami peningkatan, maka peningkatan tersebut tidak akan mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan regional di Jawa.

Hal ini sesuai dengan keadaan di Jawa. Sebagai awal kebangkitan setelah krisis, laju pertumbuhan PDRB Jawa dengan rata-ratanya yang mencapai 4,49% selama periode tahun 1998-2001, peningkatannya tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kesenjangan pendapatan regional di Jawa, yang rata-rata pertumbuhannya hanya sebesar -0,91% selama periode tahun yang sama (lihat lampiran 2 dan 10).

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan terhadap kesenjangan pendapatan regional di Jawa selama periode 1998-2001 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis indeks entropy Theil selama kurun waktu tahun 1998-2001, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
   a). Kesenjangan pendapatan dalam propinsi tertinggi dipegang oleh Propinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena di Jawa Timur terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita sangat tinggi sebagai akibat adanya tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi yang membuat daerah itu memiliki kekhususan karakteristik ekonomi, serta menjadikan daerah tersebut sebagai daerah kantong, seperti Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gersik. Kondisi ini, akan semakin memperparah kesenjangan pendapatan dalam propinsi. Sedangkan kesenjangan pendapatan dalam propinsi terendah berada pada Propinsi DI Yogyakarta.
   b). Kesenjangan pendapatan antar propinsi tertinggi dipegang oleh Propinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena Jawa Timur memiliki kekhususan karakteristik ekonomi dengan tingkat kosentrasi yang sangat tinggi, yang pada tahap selanjutnya dapat memberikan

kontribusi yang besar terhadap tingkat pembentukan dan pertumbuhan PDRB, seperti keberadaan sektor industri pengolahan. Kondisi ini, akan semakin memperparah kesenjangan pendapatan antar propinsi. Sedangkan kesenjangan pendapatan antar propinsi terendah dipegang oleh Propinsi DI Yogyakarta.

c). Kesenjangan pendapatan regional di Jawa sangat dipengaruhi oleh tingkat kesenjangan pendapatan antar propinsi yang mengalami fluktuasi. Terlebih pada tahun 2000 terjadinya penurunan sebagai akibat adanya pemekaran wilayah. Hal ini dikarenakan, adanya pemekaran wilayah telah membuat laju pertumbuhan PDRB khususnya Jawa Barat mengalami pertumbuhan negatif, yang secara langsung sangat berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan regional di Jawa pada tahun tersebut, atau menunjukkan penurunan.

2. Hipotesis Kuznets mengenai tingkat kesenjangan pendapatan regional yang berbentuk U terbalik tidak berlaku di Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap berikutnya, kesenjangan pendapatannya akan membaik seperti yang dikemukakan Kuznets ini, tidak terjadi. Sebab, seperti terlihat pada gambar 6.2 di atas, itu hanya sebuah gejolak kegiatan ekonomi jangka pendek. Perlu ditekankan bahwa sumbangan Kuznets ini hanya berlaku untuk pola perubahan jangka panjang, sementara hubungan itu tidak berlaku untuk jangka pendek.

3. Korelasi antara pertumbuhan PDRB dengan kesenjangan pendapatan regional di Jawa tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan PDRB dan tingkat kesenjangan pendapatan, atau jika terjadi peningkatan pertumbuhan PDRB maka peningkatan tersebut tidak akan mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan.

7.2. Implikasi

Perlunya dilakukan berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang sesuai dengan prioritas, kondisi dan potensi yang ada di masing-masing daerah yang bersangkutan adalah langkah wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah. Betapa tidak, perbedaan kondisi daerah akan membawa implikasi terhadap corak pembangunan yang akan diterapkan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya (Arsyad, 1999). Beberapa saran yang dapat digunakan untuk mencapai kebijakan tersebut :

1. Kosentrasi kegiatan ekonomi yang tertinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah (Tambunan, 2003: 176). Tingginya kosentrasi kegiatan ekonomi pada daerah tertentu, seperti Jakarta dan sekitarnya tidak lain adalah bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang diterapkan selama pemerintahan Orde Baru dengan tujuan yang mulia yaitu untuk menciptakan *trickle down effects* yang didasarkan berbagai macam pertimbangan. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa efek

"menetes ke bawah" tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat (Tambunan, 2003: 177). Akibatnya, terpusatnya pembangunan ekonomi pada daerah tersebut tidak bisa terelakkan lagi. Untuk itu, disinilah peran pemerintah untuk segera menghentikan strategi pembangunan ekonomi yang kian lama kian melenceng dari tujuan mulia tersebut. Caranya adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk "mengatur" daerahnya sendiri, dalam hal ini, daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan peluang dan keleluasaan memberdayakan/mengolah potensi yang ada pada daerahnya masing-masing. Dengan catatan pengarahan dan pengawasan oleh pemerintah pusat tetap harus dijalankan, akan tetapi dengan porsi yang berbeda.

2. Distribusi investasi yang tidak merata dapat dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dalam dan antar propinsi selama ini (Tambunan, 2003: 177). Tak bisa di pungkiri bahwa, kurangnya investasi pada suatu wilayah dapat membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri pengolahan. Namun, permasalahan sekarang adalah setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda yang akan membawa implikasi terhadap corak pembangunan yang akan diterapkan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya (Arsyad,

1999). Oleh sebab itu pemerintah harus jeli dalam menentukan investasi apa, untuk sektor apa, yang tepat untuk daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

_____ (2001), *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Jilid 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

_____ (2003), *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Jilid 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Akita, Takahiro (2002), "Regional Income Inequality in Indonesia and The Initial Impact of The Economic Crisis", *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol. 38, No. 2.

Arsyad, Lincolin (1997), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke 3, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.

Arsyad, Lincolin (1999), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, edisi 1, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.

Basri, Faisal (2002), *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Boediono (1985), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.

Djarwanto, PS. (1993), *Statistik Sosial Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.

Hakim, Abdul (2002), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke 1, Ekonisia, Yogyakarta.

Jhingan, ML. (1993), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad (1997), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Pertama, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrjad (2002), *Analisis Spasial dan Regional: Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, Unit Penerbit dan Precetakan AMP YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajad (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.

Sukirno, Sadono (1976), *Beberapa Aspek Dalam Pembangunan Daerah*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

Sukirno, Sadono (1978), *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan,* Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

Sutarno, dan Mudrajad Kuncoro (2004), Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000, *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* 63-71.

Tambunan, Tulus T.H. (2003), *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting,* Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Todaro, Michael. P. (1998), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,* Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Ying, Long Gen. (2000), "China's Changing Regional Disparities during the Reform Period", *Economic Geography, XXIV(7),* 59-70.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Tingkat Kepadatan Penduduk Jawa
Menurut Kabupaten/Kota, 2001

No.	Region	Luas Daerah (km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Jakarta Selatan	145.73	1,674,780	11,492.35
2	Jakarta Timur	187.73	2,061,911	10,983.39
3	Jakarta Pusat	47.90	929,259	19,399.98
4	Jakarta Barat	126.15	1,565,420	12,409.20
5	Jakarta Utara	154.01	1,192,009	7,739.82
	DKI Jakarta	**661.52**	**7,423,379**	**11,221.70**
1	Bogor	2,371.21	3,532,490	1,489.74
2	Sukabumi	4,128.00	2,084,172	504.89
3	Cianjur	3,467.12	1,955,100	563.90
4	Bandung	3,073.89	4,235,146	1,377.78
5	Garut	3,066.88	2,067,524	674.15
6	Tasikmalaya	2,563.35	2,068,611	807.00
7	Ciamis	2,444.79	1,607,321	657.45
8	Kuningan	1,117.00	987,700	884.24
9	Cirebon	990.36	1,933,794	1,952.62
10	Majalengka	1,204.24	1,123,920	933.30
11	Sumedang	1,522.20	979,047	643.18
12	Indramayu	2,040.11	1,597,032	782.82
13	Subang	2,051.76	1,328,521	647.50
14	Purwakarta	917.72	711,033	774.78
15	Karawang	1,753.27	1,789,525	1,020.68
16	Bekasi	1,273.88	1,698,215	1,333.10
17	Kota Bogor	118.50	809,975	6,835.23
18	Kota Sukabumi	48.02	257,675	5,365.99
19	Kota Bandung	167.45	2,146,360	12,817.92
20	Kota Cirebon	37.36	270,756	7,247.22
21	Kota Bekasi	210.49	1,707,360	8,111.36
22	Kota Depok	200.29	1,184,045	5,911.65
23	Kota Cimahi	40.25	-	-
24	Kota Tasikmalaya	177.79	-	-
25	Kota Banjar	-	-	-
	Jawa Barat	**34,985.93**	**36,075,322**	**1,031.14**
1	Cilacap	2,138.50	1,613,964	754.72
2	Banyumas	1,327.59	1,460,324	1,099.98
3	Purbalingga	777.63	788,675	1,014.20
4	Banjarnegara	1,069.71	838,962	784.29
5	Kebumen	1,281.11	1,166,604	910.62
6	Purworejo	1,034.82	704,063	680.37
7	Wonosobo	984.68	739,648	751.16
8	Magelang	1,088.73	1,102,359	1,012.52
9	Boyolali	1,015.05	897,207	883.90
10	Klaten	655.56	1,109,486	1,692.42
11	Sukoharjo	466.66	780,949	1,673.49
12	Wonogiri	1,822.36	967,178	530.73
13	Karanganyar	773.78	761,988	984.76
14	Sragen	941.55	845,320	897.80

15	Grobogan	1,975.86	1,271,500	643.52
16	Blora	1,820.59	813,675	446.93
17	Rembang	1,014.08	559,523	551.75
18	Pati	1,491.19	1,154,506	774.22
19	Kudus	425.16	709,905	1,669.74
20	Jepara	1,004.13	980,443	976.41
21	Demak	897.43	984,741	1,097.29
22	Semarang	950.21	834,314	878.03
23	Temanggung	870.65	665,470	764.34
24	Kendal	1,002.23	851,504	849.61
25	Batang	788.64	665,426	843.76
26	Pekalongan	836.13	807,051	965.22
27	Pemalang	1,115.31	1,271,404	1,139.96
28	Tegal	878.49	1,391,184	1,583.61
29	Brebes	1,661.00	1,711,364	1,030.32
30	Kota Magelang	18.12	116,800	6,445.92
31	Kota Surakarta	44.04	489,900	11,123.98
32	Kota Salatiga	56.79	155,244	2,733.65
33	Kota Semarang	373.70	1,353,047	3,620.68
34	Kota Pekalongan	45.25	263,190	5,816.35
35	Kota Tegal	38.50	236,900	6,153.25
	Jawa Tengah	**32,685.23**	**31,063,818**	**950.39**
1	Kulon Progo	586.30	443,819	756.98
2	Bantul	506.85	780,177	1,539.27
3	Gunung Kidul	1,488.36	746,451	501.53
4	Sleman	574.82	856,558	1,490.13
5	Kota Yogyakarta	32.50	500,949	15,413.82
	DI Yogyakarta	**3,188.83**	**3,327,954**	**1,043.63**
1	Pacitan	1,342.42	543,252	404.68
2	Ponorogo	1,371.78	898,158	654.74
3	Trenggalek	1,205.22	671,404	557.08
4	Tulungagung	1,055.65	972,187	920.94
5	Blitar	1,588.77	1,101,853	693.53
6	Kediri	1,386.05	1,400,292	1,010.28
7	Malang	2,977.05	2,399,904	806.13
8	Lumajang	1,790.90	948,671	529.72
9	Jember	3,293.34	2,120,074	643.75
10	Banyuwangi	5,782.50	1,475,438	255.16
11	Bondowoso	1,560.10	673,129	431.47
12	Situbondo	1,638.50	600,208	366.32
13	Probolinggo	1696.21	961,190	566.67
14	Pasuruan	1,474.01	1,225,866	831.65
15	Sidoarjo	634.38	1,293,111	2,038.39
16	Mojokerto	692.15	887,831	1,282.71
17	Jombang	1,159.50	1,135,285	979.12
18	Nganjuk	1,224.33	1,016,030	829.87
19	Madiun	1,010.86	654,665	647.63
20	Magetan	688.85	683,472	992.19
21	Ngawi	1,295.97	862,533	665.55
22	Bojonegoro	2,307.06	1,191,394	516.41
23	Tuban	1,839.94	1,027,486	558.43
24	Lamongan	1,812.80	1,210,879	667.96
25	Gresik	1,191.25	963,816	809.08
26	Bangkalan	1,260.14	773,500	613.82
27	Sampang	1,233.00	721,869	585.46

28	Pamekasan	792.30	683,916	863.20
29	Sumenep	1,998.54	978,763	489.74
30	Kota Kediri	63.40	238,955	3,769.01
31	Kota Blitar	32.57	123,778	3,800.37
32	Kota Malang	110.06	743,508	6,755.48
33	Kota Probolinggo	56.67	181,999	3,211.56
34	Kota Pasuruan	35.29	159,796	4,528.08
35	Kota Mojokerto	16.46	108,025	6,562.88
36	Kota Madiun	33.23	189,571	5,704.81
37	Kota Surabaya	326.36	2,463,716	7,549.07
38	Kota Batu	197.09	-	-
	Jawa Timur	**48,174.70**	**34,285,524**	**711.69**
	Pulau Jawa (tanpa Banten)	**119,696.21**	**112,175,997**	**937.17**

Sumber : 1. *Propinsi dalam Angka 2001*, BPS Yogyakarta, *diolah*
2. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota, diolah*

Lampiran 2
Laju Pertumbuhan dan Persentase PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Kabupaten/Kota, 1998-2001
(Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	1998			1999			2000			2001			Laju
		PDRB	Laju	%	PDRB	Laju	%	PDRB	Laju	%	PDRB	Laju	%	1998-2001
1	Jakarta Selatan	10,303,455.86	-19.98	4.83	10,456,635.16	1.49	4.83	10,832,965.01	3.60	4.62	11,220,025.71	3.57	4.61	8.90
2	Jakarta Timur	11,181,461.23	-15.52	5.24	11,094,450.00	-0.78	5.12	11,507,578.00	3.72	4.90	11,878,432.00	3.22	4.88	6.23
3	Jakarta Pusat	14,107,447.61	-10.96	6.61	14,117,272.12	0.07	6.51	14,737,211.52	4.39	6.28	15,319,082.06	3.95	6.30	8.59
4	Jakarta Barat	9,229,655.00	-20.35	4.32	9,201,813.24	-0.30	4.25	9,581,568.29	4.13	4.08	9,956,795.60	3.92	4.09	7.88
5	Jakarta Utara	12,600,614.00	-18.67	5.90	12,687,806.53	0.69	5.86	13,121,546.73	3.42	5.59	13,547,696.77	3.25	5.57	7.52
	DKI Jakarta	**57,380,516.88**	**-17.49**	**26.88**	**57,215,224.28**	**-0.29**	**26.40**	**59,694,418.67**	**4.33**	**25.44**	**61,865,971.02**	**3.64**	**25.43**	**7.82**
1	Pandeglang*	1,001,611.67	-7.79	0.47	1,054,897.41	5.32	0.49	-	-	-	-	-	-	-
2	Lebak*	911,572.10	-9.53	0.43	981,037.41	7.62	0.45	-	-	-	-	-	-	-
3	Bogor	5,370,468.72	-20.72	2.52	5,455,735.87	1.59	2.52	4,305,987.03	-21.07	1.84	4,461,304.12	3.61	1.83	-16.93
4	Sukabumi	1,966,650.35	-10.82	0.92	1,999,010.62	1.65	0.92	2,248,638.24	12.49	0.96	2,392,753.98	6.41	0.98	21.67
5	Cianjur	1,930,776.46	-6.55	0.90	1,972,142.55	2.14	0.91	2,035,916.70	3.23	0.87	2,109,118.14	3.60	0.87	9.24
6	Bandung	6,340,795.10	-19.57	2.97	6,530,365.20	2.99	3.01	6,871,873.92	5.23	2.93	7,211,299.72	4.94	2.96	13.73
7	Garut	2,039,659.65	-11.64	0.96	2,091,122.58	2.52	0.97	2,172,547.20	3.89	0.93	2,246,775.94	3.42	0.92	10.15
8	Tasikmalaya	1,897,944.17	-12.63	0.89	2,075,408.28	9.35	0.96	2,147,441.29	3.47	0.92	2,219,880.83	3.37	0.91	16.96
9	Ciamis	1,927,437.48	-9.45	0.90	1,973,423.43	2.39	0.91	2,038,969.49	3.32	0.87	2,110,151.33	3.49	0.87	9.48
10	Kuningan	875,472.25	-5.66	0.41	670,019.46	-23.47	0.31	911,372.86	36.02	0.39	940,535.46	3.20	0.39	7.43
11	Cirebon	1,451,612.99	-20.77	0.68	1,506,978.21	3.81	0.70	1,579,838.54	4.83	0.67	1,656,907.23	4.88	0.68	14.14
12	Majalengka	1,042,472.25	-9.16	0.49	1,079,325.28	3.54	0.50	1,126,602.18	4.38	0.48	1,185,249.96	5.21	0.49	13.70
13	Sumedang	989,773.02	-11.79	0.46	1,011,697.00	2.22	0.47	1,053,006.84	4.08	0.45	1,087,935.86	3.32	0.45	9.92
14	Indramayu	5,002,034.50	-5.39	2.34	4,468,766.90	-10.66	2.06	4,486,802.36	0.40	1.91	4,517,351.10	0.68	1.86	-9.69
15	Subang	1,725,437.03	0.18	0.81	1,730,417.36	0.29	0.80	1,794,596.22	3.71	0.76	1,864,576.00	3.90	0.77	8.06
16	Purwakarta	884,193.30	-11.69	0.41	1,903,251.92	115.25	0.88	1,952,611.56	2.59	0.83	2,023,685.96	3.64	0.83	128.87
17	Karawang	2,345,951.95	-19.79	1.10	2,528,350.39	7.78	1.17	2,793,987.67	10.51	1.19	3,096,933.00	10.84	1.27	32.01
18	Bekasi	8,012,751.31	25.05	3.75	8,200,249.69	2.34	3.78	8,657,823.63	5.58	3.69	9,017,558.89	4.16	3.71	12.54
19	Tangerang*	3,887,337.49	-9.26	1.82	3,969,463.87	2.11	1.83	-	-	-	-	-	-	-
20	Serang*	4,838,098.00	-14.42	2.27	4,961,982.00	2.56	2.29	-	-	-	-	-	-	-
21	Kota Bogor	915,583.25	-16.65	0.43	1,095,347.23	19.63	0.51	1,145,689.01	4.60	0.49	1,209,942.72	5.61	0.50	32.15
22	Kota Sukabumi	443,006.41	-17.15	0.21	457,169.19	3.20	0.21	479,190.14	4.82	0.20	503,224.38	5.02	0.21	13.59
23	Kota Bandung	5,294,952.14	-19.69	2.48	5,443,350.84	2.80	2.51	5,738,002.56	5.41	2.45	6,158,985.97	7.34	2.53	16.32
24	Kota Cirebon	1,278,067.19	-0.27	0.60	1,307,334.94	2.29	0.60	1,353,876.06	3.56	0.58	1,412,228.11	4.31	0.58	10.50
25	Kota Tangerang*	5,680,177.00	-16.76	2.66	5,829,210.00	2.62	2.69	-	-	-	-	-	-	-

26	Kota Bekasi	3,144,791.00	-18.48	1.47	3,213,465.00	2.18	1.48	3,359,448.00	4.54	1.43	3,536,111.00	5.26	1.45	12.44
27	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	1,298,090.66	-	0.55	1,375,749.12	5.98	0.57	-
28	Kota Cilegon*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jawa Barat	**58,847,840.13**	**-17.77**	**27.57**	**60,200,704.78**	**2.30**	**27.78**	**55,660,204.92**	**-7.54**	**23.72**	**57,824,843.16**	**3.89**	**23.77**	**-1.74**
1	Cilacap	5,880,835.95	-0.20	2.75	6,099,644.82	3.72	2.81	6,521,550.42	6.92	2.78	6,846,182.16	4.98	2.81	16.42
2	Banyumas	983,564.12	-6.81	0.46	988,804.68	0.53	0.46	1,028,604.69	4.03	0.44	1,040,236.79	1.13	0.43	5.76
3	Purbalingga	588,640.26	-5.32	0.28	595,126.84	1.10	0.27	611,664.77	2.78	0.26	629,866.08	2.98	0.26	7.00
4	Banjarnegara	837,991.07	-4.35	0.39	841,678.40	0.44	0.39	851,218.96	1.13	0.36	852,492.59	0.15	0.35	1.73
5	Kebumen	828,231.91	-16.75	0.39	859,265.17	3.75	0.40	899,383.01	4.67	0.38	915,370.68	1.78	0.38	10.52
6	Purworejo	652,005.26	-6.49	0.31	668,176.79	2.48	0.31	684,306.71	2.41	0.29	707,550.88	3.40	0.29	8.52
7	Wonosobo	484,102.50	-15.12	0.23	502,526.04	3.81	0.23	522,318.24	3.94	0.22	527,635.31	1.02	0.22	8.99
8	Magelang	1,002,789.27	-3.14	0.47	1,019,215.59	1.64	0.47	1,054,929.26	3.50	0.45	1,096,201.91	3.91	0.45	9.32
9	Boyolali	874,143.42	-9.51	0.41	884,481.69	1.18	0.41	902,682.45	2.06	0.38	935,467.99	3.63	0.38	7.02
10	Klaten	1,148,045.58	-11.35	0.54	1,153,627.74	0.49	0.53	1,199,551.88	3.98	0.51	1,247,746.75	4.02	0.51	8.68
11	Sukoharjo	1,061,616.80	-11.23	0.50	1,074,922.61	1.25	0.50	1,112,790.80	3.52	0.47	1,157,846.99	4.05	0.48	9.06
12	Wonogiri	742,361.47	-4.67	0.35	756,802.53	1.95	0.35	783,586.68	3.54	0.33	804,087.17	2.62	0.33	8.31
13	Karanganyar	1,109,425.03	-11.65	0.52	1,141,544.82	2.90	0.53	1,193,085.08	4.51	0.51	1,210,084.81	1.42	0.50	9.07
14	Sragen	664,414.00	-9.10	0.31	677,594.02	1.98	0.31	696,930.13	2.85	0.30	712,656.17	2.26	0.29	7.26
15	Grobogan	697,230.89	-9.56	0.33	674,329.35	-3.28	0.31	711,751.54	5.55	0.30	741,821.42	4.22	0.30	6.40
16	Blora	682,333.12	-5.36	0.32	688,893.26	0.96	0.32	702,214.14	1.93	0.30	723,134.79	2.98	0.30	5.98
17	Rembang	466,648.91	-10.25	0.22	480,222.34	2.91	0.22	504,132.76	4.98	0.21	524,181.35	3.98	0.22	12.33
18	Pati	923,174.19	-4.02	0.43	937,480.81	1.55	0.43	940,874.70	0.36	0.40	969,013.34	2.99	0.40	4.97
19	Kudus	3,006,674.93	-11.79	1.41	3,030,322.68	0.79	1.40	3,087,617.87	1.89	1.32	3,185,798.25	3.18	1.31	5.96
20	Jepara	939,352.15	0.03	0.44	945,638.80	0.67	0.44	989,279.74	4.61	0.42	1,037,969.05	4.92	0.43	10.50
21	Demak	706,938.94	-10.52	0.33	723,427.58	2.33	0.33	744,316.44	2.89	0.32	769,047.86	3.32	0.32	8.79
22	Semarang	985,228.37	-17.79	0.46	999,629.79	1.46	0.46	1,047,365.82	4.78	0.45	1,082,378.77	3.34	0.44	9.86
23	Temanggung	659,706.26	-10.57	0.31	674,562.25	2.25	0.31	697,991.69	3.47	0.30	728,586.94	4.38	0.30	10.44
24	Kendal	1,487,955.88	-9.29	0.70	1,517,220.96	1.97	0.70	1,550,532.38	2.20	0.66	1,594,832.69	2.86	0.66	7.18
25	Batang	691,365.49	-10.17	0.32	707,438.02	2.32	0.33	721,649.40	2.01	0.31	737,198.24	2.15	0.30	6.63
26	Pekalongan	812,568.88	-8.66	0.38	842,326.12	3.66	0.39	862,264.92	2.37	0.37	899,546.41	4.32	0.37	10.70
27	Pemalang	1,033,694.11	-1.63	0.48	1,050,130.47	1.59	0.48	1,089,043.63	3.71	0.46	1,124,314.37	3.24	0.46	8.77
28	Tegal	847,663.63	-9.02	0.40	869,114.69	2.53	0.40	911,693.10	4.90	0.39	954,043.61	4.65	0.39	12.55
29	Brebes	1,264,853.81	2.28	0.59	1,320,755.77	4.42	0.61	1,381,023.45	4.56	0.59	1,447,843.90	4.84	0.60	14.47
30	Kota Magelang	295,302.57	-7.17	0.14	306,308.29	3.73	0.14	318,423.23	3.96	0.14	328,162.25	3.06	0.13	11.13
31	Kota Surakarta	1,233,018.44	-13.93	0.58	1,250,807.41	1.44	0.58	1,302,715.92	4.15	0.56	1,353,882.64	3.93	0.56	9.80
32	Kota Salatiga	241,288.25	-1.51	0.11	245,601.15	1.79	0.11	254,362.19	3.57	0.11	263,644.76	3.65	0.11	9.27
33	Kota Semarang	4,737,995.92	-18.22	2.22	4,899,241.90	3.40	2.26	5,142,532.90	4.97	2.19	5,405,239.40	5.11	2.22	14.08
34	Kota Pekalongan	402,045.65	-8.13	0.19	417,953.57	3.96	0.19	434,639.69	3.99	0.19	453,338.36	4.30	0.19	12.76
35	Kota Tegal	334,431.35	-4.64	0.16	341,508.56	2.12	0.16	358,969.48	5.11	0.15	377,701.81	5.22	0.16	12.94
	Jawa Tengah	**38,065,273.35**	**-11.74**	**17.83**	**39,394,513.74**	**3.49**	**18.18**	**40,941,667.09**	**3.93**	**17.45**	**42,305,176.42**	**3.33**	**17.39**	**11.14**

1	Kulon Progo	384,783.00	-23.74	0.18	346,060.53	-10.06	0.16	352,854.00	1.96	0.15	359,651.00	1.93	0.15	-6.53
2	Bantul	809,931.79	-9.25	0.38	820,611.35	1.32	0.38	845,718.00	3.06	0.36	871,970.00	3.10	0.36	7.66
3	Gunung Kidul	890,347.94	2.23	0.42	905,618.72	1.72	0.42	930,497.00	2.75	0.40	950,887.00	2.19	0.39	6.80
4	Sleman	1,378,089.00	-7.93	0.65	1,404,658.00	1.93	0.65	1,451,772.00	3.35	0.62	1,509,835.00	4.00	0.62	9.56
5	Kota Yogyakarta	1,296,097.00	-11.11	0.61	1,309,435.00	1.03	0.60	1,356,541.00	3.60	0.58	1,398,143.00	3.07	0.57	7.87
	DI Yogyakarta	**4,777,199.00**	**-11.18**	**2.24**	**4,824,445.72**	**0.99**	**2.23**	**5,017,709.21**	**4.01**	**2.14**	**5,182,543.85**	**3.29**	**2.13**	**8.48**
1	Pacitan	334,925.65	-6.22	0.16	338,727.50	1.14	0.16	344,771.83	1.78	0.15	350,237.74	1.59	0.14	4.57
2	Ponorogo	653,667.31	-7.36	0.31	661,380.58	1.18	0.31	674,955.02	2.05	0.29	693,622.99	2.77	0.29	6.11
3	Trenggalek	487,525.21	-8.12	0.23	497,019.10	1.95	0.23	511,713.11	2.96	0.22	532,624.26	4.09	0.22	9.25
4	Tulungagung	1,041,874.82	-6.71	0.49	1,064,436.81	2.17	0.49	1,111,220.63	4.40	0.47	1,161,245.70	4.50	0.48	11.46
5	Blitar	1,057,928.81	-0.04	0.50	1,074,534.63	1.57	0.50	1,099,421.28	2.32	0.47	2,125,845.23	93.36	0.87	100.94
6	Kediri	1,409,073.86	-0.39	0.66	1,429,888.47	1.48	0.66	1,478,384.43	3.39	0.63	1,516,477.60	2.58	0.62	7.62
7	Malang	2,636,631.26	-6.66	1.24	2,705,425.99	2.61	1.25	2,780,336.09	2.77	1.19	2,933,016.66	5.49	1.21	11.24
8	Lumajang	906,126.49	-10.61	0.42	919,260.95	1.45	0.42	946,719.04	2.99	0.40	975,284.41	3.02	0.40	7.63
9	Jember	2,097,376.00	-7.58	0.98	2,136,985.25	1.89	0.99	2,208,057.36	3.33	0.94	2,285,212.91	3.49	0.94	8.96
10	Banyuwangi	1,625,393.12	-6.11	0.76	1,688,419.21	3.88	0.78	1,762,160.88	4.37	0.75	1,844,828.15	4.69	0.76	13.50
11	Bondowoso	569,676.02	-4.93	0.27	577,857.18	1.44	0.27	589,580.11	2.03	0.25	599,845.89	1.74	0.25	5.30
12	Situbondo	834,888.10	-5.03	0.39	845,270.91	1.24	0.39	874,216.63	3.42	0.37	895,972.80	2.49	0.37	7.32
13	Probolinggo	1,308,435.23	-9.02	0.61	1,320,343.22	0.91	0.61	1,362,947.33	3.23	0.58	1,416,388.84	3.92	0.58	8.25
14	Pasuruan	1,375,407.73	-13.68	0.64	1,396,888.64	1.56	0.64	1,448,850.44	3.72	0.62	1,505,454.47	3.91	0.62	9.46
15	Sidoarjo	3,663,825.74	-15.92	1.72	3,726,746.35	1.72	1.72	3,840,989.26	3.07	1.64	3,981,570.81	3.66	1.64	8.67
16	Mojokerto	1,216,128.03	-8.07	0.57	1,231,549.62	1.27	0.57	1,266,737.04	2.86	0.54	1,310,635.75	3.47	0.54	7.77
17	Jombang	1,036,760.14	-13.34	0.49	1,050,150.17	1.29	0.48	1,082,340.45	3.07	0.46	1,110,966.27	2.64	0.46	7.16
18	Nganjuk	1,102,481.54	-0.76	0.52	1,108,802.72	0.57	0.51	1,134,459.35	2.31	0.48	1,230,031.08	8.42	0.51	11.57
19	Madiun	550,027.60	-6.30	0.26	560,297.34	1.87	0.26	575,305.03	2.68	0.25	592,593.71	3.01	0.24	7.74
20	Magetan	599,365.39	-7.89	0.28	608,061.89	1.45	0.28	624,397.03	2.69	0.27	641,316.99	2.71	0.26	7.00
21	Ngawi	665,282.82	-6.13	0.31	672,132.13	1.03	0.31	682,512.22	1.54	0.29	702,746.39	2.96	0.29	5.63
22	Bojonegoro	978,764.27	-5.25	0.46	979,059.21	0.03	0.45	1,005,907.06	2.74	0.43	1,035,615.45	2.95	0.43	5.81
23	Tuban	1,085,166.83	-9.76	0.51	1,168,123.76	7.64	0.54	1,198,113.97	2.57	0.51	1,244,798.24	3.90	0.51	14.71
24	Lamongan	1,071,104.80	-5.10	0.50	1,093,814.26	2.12	0.50	1,118,987.12	2.30	0.48	1,151,102.05	2.87	0.47	7.47
25	Gresik	3,142,557.70	-11.56	1.47	2,808,009.40	-10.65	1.30	2,899,204.80	3.25	1.24	3,046,174.43	5.07	1.25	-3.07
26	Bangkalan	747,206.40	-0.17	0.35	764,218.33	2.28	0.35	794,723.78	3.99	0.34	824,152.29	3.70	0.34	10.30
27	Sampang	507,158.20	-16.15	0.24	551,274.61	8.70	0.25	560,866.58	1.74	0.24	569,438.07	1.53	0.23	12.28
28	Pamekasan	498,691.32	-5.21	0.23	465,798.33	-6.60	0.21	473,874.36	1.73	0.20	481,424.69	1.59	0.20	-3.46
29	Sumenep	873,942.78	-10.71	0.41	570,517.22	-34.72	0.26	588,412.02	3.14	0.25	607,515.01	3.25	0.25	-30.49
30	Kota Kediri	5,744,453.71	-2.49	2.69	5,825,591.49	1.41	2.69	6,163,478.28	5.80	2.63	6,533,883.71	6.01	2.69	13.74
31	Kota Blitar	163,701.87	-3.83	0.08	163,545.57	-0.10	0.08	170,381.60	4.18	0.07	175,703.14	3.12	0.07	7.33
32	Kota Malang	2,323,694.19	-8.78	1.09	2,395,499.64	3.09	1.11	2,429,222.52	1.41	1.04	2,485,039.37	2.30	1.02	6.94
33	Kota Probolinggo	420,736.70	-7.08	0.20	428,778.22	1.91	0.20	442,389.86	3.17	0.19	451,047.05	1.96	0.19	7.20
34	Kota Pasuruan	264,238.34	-5.95	0.12	268,958.58	1.79	0.12	279,244.90	3.82	0.12	291,424.72	4.36	0.12	10.29
35	Kota Mojokerto	220,654.38	-4.50	0.10	229,218.36	3.88	0.11	242,273.69	5.70	0.10	247,942.93	2.34	0.10	12.37
36	Kota Madiun	282,269.42	-5.59	0.13	285,365.05	1.10	0.13	292,979.65	2.67	0.12	303,372.10	3.55	0.12	7.48

37	Kota Surabaya	15,429,196.46	-1.88	7.23	13,036,491.09	-15.51	6.02	13,455,465.85	3.21	5.74	14,028,424.46	4.26	5.77	-9.08
38	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jawa Timur	**54,398,896.74**	**-16.12**	**25.48**	**55,058,970.46**	**1.21**	**25.41**	**56,856,520.71**	**3.26**	**24.23**	**58,750,180.22**	**3.33**	**24.15**	**8.00**
	Pulau Jawa	**213,469,727.00**	**-12.20**	**100.00**	**216,693,859.00**	**1.51**	**100.00**	**234,619,215.00**	**8.27**	**100.00**	**243,277,447.00**	**3.69**	**100.00**	**13.96**

Sumber : 1. *Propinsi dalam Angka*, BPS Yogyakarta, *diolah*
2. *PDRB Kabupaten/Kota Indonesia*, BPS Yogyakarta, *diolah*

Lampiran 3
PDRB Per Kapita Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Kabupaten/Kota, 1998-2001
(Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	1998		1999		2000		2001		Laju	Rata-rata
		PDRB	Laju	PDRB	Laju	PDRB	Laju	PDRB	Laju	1998-2001	PDRB
1	Jakarta Selatan	5,194,733	-19.67	5,318,430	2.38	6,249,558	17.51	6,699,403	7.20	28.97	5,865,531
2	Jakarta Timur	5,446,841	-15.81	5,390,520	-1.03	5,610,109	4.07	5,760,885	2.69	5.77	5,552,089
3	Jakarta Pusat	12,732,055	-10.06	12,745,753	0.11	13,954,530	9.48	16,485,266	18.14	29.48	13,979,401
4	Jakarta Barat	6,069,514	-20.99	5,971,310	-1.62	6,148,976	2.98	6,360,463	3.44	4.79	6,137,566
5	Jakarta Utara	10,922,749	-19.85	10,950,452	0.25	11,122,255	1.57	11,365,432	2.19	4.05	11,090,222
	DKI Jakarta	**6,914,252**	**-7.37**	**6,883,322**	**-0.45**	**7,139,559**	**3.72**	**7,389,572**	**3.50**	**6.87**	**7,081,676**
1	Pandeglang*	1,061,729	-7.76	1,090,845	2.74	-	-	-	-	-	1,076,287
2	Lebak*	926,010	-9.57	972,529	5.02	-	-	-	-	-	949,269
3	Bogor	1,232,697	-20.93	1,126,383	-8.62	1,233,897	9.55	1,262,935	2.35	2.45	1,213,978
4	Sukabumi	1,032,382	-10.83	972,250	-5.82	1,091,614	12.28	1,148,060	5.17	11.20	1,061,077
5	Cianjur	1,080,029	-6.58	1,079,095	-0.09	1,053,874	-2.34	1,078,778	2.36	-0.12	1,072,944
6	Bandung	1,841,273	-19.67	1,852,880	0.63	1,657,072	-10.57	1,702,728	2.76	-7.52	1,763,488
7	Garut	1,098,302	-11.70	1,099,745	0.13	1,063,730	-3.27	1,086,699	2.16	-1.06	1,087,119
8	Tasikmalaya	1,001,814	-12.67	1,077,883	7.59	1,047,692	-2.80	1,073,126	2.43	7.12	1,050,129
9	Ciamis	1,232,698	-9.53	1,237,608	0.40	1,275,102	3.03	1,312,838	2.96	6.50	1,264,562
10	Kuningan	942,456	-5.71	710,720	-24.59	929,399	30.77	952,248	2.46	1.04	883,706
11	Cirebon	798,143	-20.90	810,443	1.54	826,437	1.97	856,817	3.68	7.35	822,960
12	Majalengka	961,835	-9.17	980,597	1.95	1,007,873	2.78	1,054,568	4.63	9.64	1,001,218
13	Sumedang	1,133,348	-11.89	1,138,911	0.49	1,088,887	-4.39	1,111,219	2.05	-1.95	1,118,091
14	Indramayu	3,264,906	-5.45	2,857,558	-12.48	2,829,144	-0.99	2,828,591	-0.02	-13.36	2,945,050
15	Subang	1,375,274	0.09	1,357,275	-1.31	1,360,301	0.22	1,403,498	3.18	2.05	1,374,087
16	Purwakarta	1,431,980	-11.87	3,019,784	110.88	2,796,024	-7.41	2,846,121	1.79	98.75	2,523,477
17	Karawang	1,454,238	-19.84	1,531,681	5.33	1,582,760	3.33	1,730,589	9.34	19.00	1,574,817
18	Bekasi	4,757,146	19.52	4,819,027	1.30	5,269,675	9.35	5,310,022	0.77	11.62	5,038,968
19	Tangerang*	1,450,328	-9.65	1,440,144	-0.70	-	-	-	-	-	1,445,236
20	Serang*	2,844,287	-14.54	2,845,098	0.03	-	-	-	-	-	2,844,693
21	Kota Bogor	1,394,371	-16.82	1,638,812	17.53	1,540,986	-5.97	1,493,803	-3.06	7.13	1,516,993
22	Kota Sukabumi	1,904,126	-17.03	1,944,052	2.10	1,899,340	-2.30	1,952,942	2.82	2.56	1,925,115
23	Kota Bandung	2,131,707	-19.82	2,140,123	0.39	2,679,010	25.18	2,869,503	7.11	34.61	2,455,086
24	Kota Cirebon	4,839,147	-0.05	4,900,919	1.28	5,029,519	2.62	5,215,870	3.71	7.78	4,996,364
25	Kota Tangerang*	4,284,275	-17.09	4,173,189	-2.59	-	-	-	-	-	4,228,732
26	Kota Bekasi	-	-	2,064,975	-	2,049,336	-0.76	2,071,099	1.06	-	2,061,803
27	Kota Depok	-	-	-	-	1,132,660	-	1,161,906	2.58	-	1,147,283
28	Kota Cilegon*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jawa Barat	**1,411,393**	**-20.22**	**1,413,173**	**0.13**	**1,555,498**	**10.07**	**1,587,076**	**2.03**	**12.45**	**1,491,785**
1	Cilacap	3,762,832	-1.65	3,862,454	2.65	4,073,846	5.47	4,241,843	4.12	12.73	3,985,244
2	Banyumas	701,319	-7.95	697,906	-0.49	710,429	1.79	712,333	0.27	1.57	705,497
3	Purbalingga	772,049	-6.57	775,319	0.42	781,466	0.79	798,638	2.20	3.44	781,868
4	Banjarnegara	1,014,053	-6.08	1,006,836	-0.71	1,023,928	1.70	1,016,128	-0.76	0.20	1,015,236
5	Kebumen	717,730	-17.62	738,297	2.87	774,714	4.93	784,646	1.28	9.32	753,847
6	Purworejo	922,476	-6.98	942,028	2.12	972,453	3.23	1,004,954	3.34	8.94	960,478
7	Wonosobo	693,999	-16.22	712,328	2.64	714,841	0.35	713,360	-0.21	2.79	708,632
8	Magelang	956,705	-4.31	964,673	0.83	965,366	0.07	994,415	3.01	3.94	970,290
9	Boyolali	1,009,244	-10.44	1,013,182	0.39	1,012,699	-0.05	1,042,645	2.96	3.31	1,019,442
10	Klaten	1,035,397	-12.10	1,033,915	-0.14	1,083,139	4.76	1,124,617	3.83	8.62	1,069,267
11	Sukoharjo	1,458,601	-12.77	1,452,859	-0.39	1,447,529	-0.37	1,482,615	2.42	1.65	1,460,401
12	Wonogiri	756,054	-5.46	766,352	1.36	810,939	5.82	831,375	2.52	9.96	791,180
13	Karanganyar	1,478,210	-12.97	1,498,539	1.38	1,580,660	5.48	1,588,063	0.47	7.43	1,536,368
14	Sragen	781,800	-9.96	791,014	1.18	826,963	4.54	843,061	1.95	7.84	810,709
15	Grobogan	570,154	-11.19	545,095	-4.40	565,799	3.80	583,422	3.11	2.33	566,118
16	Bloro	853,527	-6.55	856,033	0.29	868,601	1.47	888,727	2.32	4.12	866,722
17	Rembang	841,869	-11.97	855,284	1.59	908,855	6.26	936,836	3.08	11.28	885,711
18	Pati	839,078	-5.14	848,084	1.07	822,227	-3.05	839,332	2.08	0.03	837,180
19	Kudus	4,354,799	-13.65	4,314,671	-0.92	4,401,219	2.01	4,487,640	1.96	3.05	4,389,582
20	Jepara	1,037,195	-1.84	1,028,055	-0.88	1,027,387	-0.07	1,058,674	3.05	2.07	1,037,827

21	Demak	764,890	-12.57	769,062	0.55	770,914	0.24	780,965	1.30	2.10	771,458
22	Semarang	1,196,886	-18.82	1,204,710	0.65	1,264,676	4.98	1,297,328	2.58	8.39	1,240,900
23	Temanggung	1,020,047	-11.84	1,034,551	1.42	1,057,754	2.24	1,094,846	3.51	7.33	1,051,799
24	Kendal	1,746,669	-10.78	1,761,664	0.86	1,834,146	4.11	1,872,960	2.12	7.23	1,803,860
25	Batang	1,108,922	-11.66	1,125,125	1.46	1,096,197	-2.57	1,107,859	1.06	-0.10	1,109,526
26	Pekalongan	1,114,131	-9.67	1,146,198	2.88	1,084,550	-5.38	1,114,609	2.77	0.04	1,114,872
27	Pemalang	846,519	-3.83	845,979	-0.06	868,660	2.68	884,309	1.80	4.46	861,367
28	Tegal	646,710	-10.29	655,312	1.33	663,348	1.23	685,778	3.38	6.04	662,787
29	Brebes	748,052	-0.07	766,603	2.48	817,652	6.66	846,018	3.47	13.10	794,581
30	Kota Magelang	2,386,283	-7.76	2,438,139	2.17	2,739,242	12.35	2,809,608	2.57	17.74	2,593,318
31	Kota Surakarta	2,342,396	-15.06	2,359,569	0.73	2,662,037	12.82	2,763,590	3.81	17.98	2,531,898
32	Kota Salatiga	2,318,185	-0.81	2,309,128	-0.39	1,693,479	-26.66	1,698,261	0.28	-26.74	2,004,763
33	Kota Semarang	3,382,082	-20.15	3,426,503	1.31	3,832,763	11.86	3,994,864	4.23	18.12	3,659,053
34	Kota Pekalongan	1,094,878	-14.26	1,073,619	-1.94	1,666,474	55.22	1,722,476	3.36	57.32	1,389,362
35	Kota Tegal	1,035,362	-7.09	998,446	-3.57	1,520,812	52.32	1,594,351	4.84	53.99	1,287,243
	Jawa Tengah	**1,254,201**	**-12.19**	**1,287,441**	**2.65**	**1,311,255**	**1.85**	**1,342,833**	**2.41**	**7.07**	**1,298,933**
1	Kulon Progo	884,101	-24.07	790,219	-10.62	800,656	1.32	810,355	1.21	-8.34	821,333
2	Bantul	1,064,452	-9.95	1,069,849	0.51	1,093,849	2.24	1,117,657	2.18	5.00	1,086,451
3	Gunung Kidul	1,209,232	1.79	1,225,036	1.31	1,251,873	2.19	1,273,877	1.76	5.35	1,240,004
4	Sleman	1,671,898	-8.97	1,685,044	0.79	1,719,954	2.07	1,762,677	2.48	5.43	1,709,893
5	Kota Yogyakarta	2,694,846	-11.82	2,688,143	-0.25	2,746,574	2.17	2,790,989	1.62	3.57	2,730,138
	DI Yogyakarta	**1,556,764**	**-12.61**	**1,561,541**	**0.31**	**1,607,702**	**2.96**	**1,649,342**	**2.59**	**5.95**	**1,593,837**
1	Pacitan	626,390	-6.69	638,716	1.97	636,902	-0.28	644,706	1.23	2.92	636,678
2	Ponorogo	739,059	-7.82	743,611	0.62	754,415	1.45	772,273	2.37	4.49	752,340
3	Trenggalek	712,902	-11.92	749,801	5.18	766,906	2.28	793,299	3.44	11.28	755,727
4	Tulungagung	1,099,268	-7.30	1,114,067	1.35	1,152,567	3.46	1,194,467	3.64	8.66	1,140,092
5	Blitar	970,222	-0.26	983,283	1.35	1,002,428	1.95	1,929,337	92.47	98.86	1,221,317
6	Kediri	1,051,313	-1.15	1,058,199	0.66	1,072,680	1.37	1,082,972	0.96	3.01	1,066,291
7	Malang	1,124,091	-7.16	1,145,132	1.87	1,167,101	1.92	1,222,139	4.72	8.72	1,164,616
8	Lumajang	969,661	-10.94	976,286	0.68	1,003,093	2.75	1,028,053	2.49	6.02	994,273
9	Jember	1,006,869	-7.77	1,014,408	0.75	1,048,893	3.40	1,077,893	2.76	7.05	1,037,016
10	Banyuwangi	1,119,581	-6.09	1,160,760	3.68	1,198,672	3.27	1,250,360	4.31	11.68	1,182,343
11	Bondowoso	859,595	-5.12	870,908	1.32	873,808	0.33	891,131	1.98	3.67	873,860
12	Situbondo	1,438,879	-5.13	1,454,655	1.10	1,456,457	0.12	1,492,771	2.49	3.75	1,460,690
13	Probolinggo	1,400,503	-10.15	1,431,139	2.19	1,477,182	3.22	1,473,578	-0.24	5.22	1,445,601
14	Pasuruan	1,148,698	-14.66	1,155,912	0.63	1,185,570	2.57	1,228,074	3.59	6.91	1,179,564
15	Sidoarjo	3,073,254	-17.86	3,023,602	-1.62	3,032,098	0.28	3,079,063	1.55	0.19	3,052,004
16	Mojokerto	1,403,197	-8.86	1,445,513	3.02	1,438,077	-0.51	1,476,222	2.65	5.20	1,440,752
17	Jombang	930,539	-13.94	936,196	0.61	958,660	2.40	978,579	2.08	5.16	950,993
18	Nganjuk	1,097,878	-1.10	1,099,061	0.11	1,119,789	1.89	1,210,625	8.11	10.27	1,131,838
19	Madiun	844,833	-6.43	855,854	1.30	878,778	2.68	905,186	3.01	7.14	871,163
20	Magetan	887,454	-8.03	897,556	1.14	917,688	2.24	938,322	2.25	5.73	910,255
21	Ngawi	784,446	-6.40	786,973	0.32	795,430	1.07	814,747	2.43	3.86	795,399
22	Bojonegoro	835,896	-5.51	832,522	-0.40	849,828	2.08	869,247	2.29	3.99	846,873
23	Tuban	1,077,890	-10.35	1,150,031	6.69	1,172,415	1.95	1,211,499	3.33	12.40	1,152,959
24	Lamongan	900,947	-5.37	916,366	1.71	932,409	1.75	950,633	1.95	5.51	925,089
25	Gresik	3,414,050	-11.65	2,978,063	-12.77	3,029,320	1.72	3,160,535	4.33	-7.43	3,145,492
26	Bangkalan	1,018,300	-0.40	1,020,043	0.17	1,042,882	2.24	1,065,485	2.17	4.63	1,036,677
27	Sampang	714,816	-16.33	775,724	8.52	784,173	1.09	788,839	0.59	10.36	765,888
28	Pamekasan	748,028	-5.51	693,623	-7.27	702,939	1.34	703,924	0.14	-5.90	712,128
29	Sumenep	914,079	-10.88	595,307	-34.87	609,003	2.30	620,697	1.92	-32.10	684,771
30	Kota Kediri	24,309,283	-2.78	24,624,713	1.30	25,838,776	4.93	27,343,574	5.82	12.48	25,529,086
31	Kota Blitar	1,351,936	-4.16	1,339,253	-0.94	1,383,035	3.27	1,419,502	2.64	5.00	1,373,432
32	Kota Malang	3,270,156	-8.30	3,328,266	1.78	3,324,205	-0.12	3,342,317	0.54	2.21	3,316,236
33	Kota Probolinggo	2,328,900	-7.38	2,367,724	1.67	2,438,337	2.98	2,478,294	1.64	6.41	2,403,314
34	Kota Pasuruan	1,687,766	-6.44	1,705,086	1.03	1,757,761	3.09	1,823,730	3.75	8.06	1,743,586
35	Kota Mojokerto	2,059,823	-5.38	2,121,862	3.01	2,242,341	5.68	2,295,237	2.36	11.43	2,179,815
36	Kota Madiun	1,514,882	-5.98	1,537,171	1.47	1,555,556	1.20	1,600,309	2.88	5.64	1,551,979
37	Kota Surabaya	6,501,754	-2.56	5,429,374	-16.49	5,503,312	1.36	5,694,010	3.47	-12.42	5,782,113
38	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jawa Timur	**1,596,984**	**-14.71**	**1,606,242**	**0.58**	**1,635,406**	**1.82**	**1,679,000**	**2.67**	**5.14**	**1,629,408**
	Pulau Jawa	**1,817,132**	**-16.04**	**1,822,817**	**0.31**	**1,934,304**	**6.12**	**1,981,019**	**2.42**	**9.02**	**1,888,818**

Sumber : 1. *Propinsi dalam Angka*, BPS Yogyakarta, *diolah*
2. *PDRB Kabupaten/Kota Indonesia*, BPS Yogyakarta, *diolah*

Lampiran 4
PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993
Per Propinsi, Menurut Lapangan Usaha, 1998-2001
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1998					1999				
	Jakarta	Jabar	Jateng	DIY	Jatim	Jakarta	Jabar	Jateng	DIY	Jatim
1. PERTANIAN	**104,971**	**8,013,996**	**7,940,631**	**865,395**	**9,840,471**	**116,868**	**9,098,516**	**8,184,670**	**817,811**	**10,056,431**
a. Tanaman Bahan Makanan	52,374	6,151,708	5,380,042	638,104	6,448,069	59,456	6,878,101	5,517,339	598,566	6,726,180
b. Tanaman Perkebunan	9,025	422,696	496,475	23,296	1,527,058	9,243	586,912	419,597	22,639	1,491,946
c. Perternakan	9,897	854,540	1,130,545	105,799	883,727	9,853	962,184	1,352,280	93,299	901,458
d. Kehutanan	0	85,924	402,047	87,877	233,168	0	102,236	347,942	91,231	231,840
e. Perikanan	33,675	499,128	531,522	10,319	748,449	38,316	569,083	547,512	12,076	705,007
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**0**	**2,912,315**	**545,663**	**60,251**	**501,798**	**0**	**2,142,073**	**575,613**	**60,476**	**820,482**
a. Minyak & Gas	0	2,692,477	28,804	0	150,508	0	2,024,284	28,440	0	163,369
b. Pertambangan tanpa Migas	0	3,392	4,075	0	14,245	0	2,905	3,876	0	11,177
c. Penggalian	0	216,446	512,784	60,251	337,045	0	114,884	543,297	60,476	645,936
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**12,072,978**	**20,913,548**	**11,707,062**	**659,816**	**15,104,078**	**12,391,061**	**21,029,934**	**12,036,862**	**682,440**	**15,096,119**
a. Industri Migas	**0**	**888,590**	**2,356,506**	**0**	**0**	**0**	**888,591**	**2,463,584**	**0**	**0**
1. Pengilangan Minyak Bumi	0	888,590	2,356,506	0	0	0	888,591	2,463,584	0	0
2. Gas Alam Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Industri Tanpa Migas	**12,072,978**	**20,024,958**	**9,350,556**	**659,816**	**15,104,078**	**12,391,061**	**20,141,343**	**9,573,278**	**682,440**	**15,096,119**
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	**1,103,238**	**1,816,765**	**407,880**	**31,429**	**1,179,195**	**1,161,177**	**2,046,565**	**450,222**	**35,344**	**1,332,449**
a. Listrik	788,190	1,671,201	320,138	28,067	983,064	838,263	1,857,137	357,645	31,818	1,117,209
b. Gas	139,030	32,917	0	0	68,759	144,900	20,078	0	0	81,519
c. Air Bersih	176,018	112,647	87,742	3,362	127,372	178,014	169,350	92,577	3,526	133,721
5. BANGUNAN	**6,589,239**	**2,262,253**	**1,452,846**	**317,345**	**2,918,521**	**6,404,740**	**2,210,240**	**1,626,238**	**383,269**	**2,629,205**
6. PERDAG, HOTEL & RESTORAN	**13,466,401**	**11,565,562**	**8,747,296**	**742,580**	**11,369,207**	**13,550,295**	**11,968,042**	**9,026,900**	**761,007**	**11,403,499**
a. Perdagangan Besar & Eceran	10,620,334	9,160,688	7,555,512	302,688	8,967,221	10,483,262	9,512,490	7,770,375	293,976	8,969,270
b. Hotel	461,697	99,295	141,674	87,172	517,420	476,656	107,811	149,272	92,941	506,565
c. Air Bersih	2,384,370	2,305,579	1,050,110	352,720	1,884,566	2,590,377	2,347,741	1,107,253	374,090	1,927,664
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	**5,287,988**	**3,497,994**	**1,765,266**	**541,280**	**4,051,085**	**5,402,572**	**3,555,871**	**1,946,927**	**552,812**	**4,441,896**
a. Pengangkutan	**3,708,595**	**2,952,209**	**1,337,674**	**454,599**	**3,139,269**	**3,718,342**	**3,000,861**	**1,426,016**	**457,813**	**3,178,294**
1. Angkutan Rel	72,046	40,427	27,110	10,687	54,296	74,917	41,240	31,223	12,897	71,874
2. Angkutan Jalan Raya	1,953,132	1,989,803	1,115,164	410,692	1,854,399	1,885,567	2,042,756	1,140,511	413,443	1,799,530
3. Angkutan Laut, Sungai, Danau &										

Penyeberangan	918,294	210,417	108,146	0	225,748	971,073	225,955	164,886	0	204,804
4. Angkutan Udara	15,922	378,973	6,296	16,876	101,174	13,610	359,669	1,749	15,257	89,049
5. Jasa Penunjang Angkutan	749,201	332,589	80,958	16,344	903,652	773,175	331,241	87,647	16,216	1,013,037
b. Komunikasi	**1,579,393**	**545,785**	**427,592**	**86,681**	**911,816**	**1,684,230**	**555,010**	**520,911**	**94,999**	**1,263,602**
8. KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	**13,515,814**	**2,189,228**	**1,502,666**	**527,472**	**3,296,435**	**12,681,993**	**2,369,170**	**1,559,306**	**531,007**	**3,087,743**
a. bank	7,262,354	49,120	135,612	62,268	836,589	6,395,790	177,516	149,566	59,478	403,078
b. Lembaga Keu. Tanpa Bank & Jasa	1,310,086	166,713	232,929	42,074	388,092	1,270,764	168,375	242,412	44,999	389,194
c. Sewa Bangunan	2,714,818	1,567,237	1,068,277	404,261	1,120,205	2,694,621	1,607,831	1,098,457	408,366	1,280,383
d. Jasa Perusahaan	2,228,556	406,158	65,848	18,869	951,549	2,320,818	415,448	68,871	18,164	1,015,088
9. JASA-JASA	**5,239,888**	**5,676,177**	**3,995,963**	**977,631**	**6,138,106**	**5,506,518**	**5,780,293**	**3,987,777**	**1,000,278**	**6,191,150**
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	**1,619,456**	**3,158,229**	**2,952,013**	**755,431**	**2,877,669**	**1,547,450**	**3,275,994**	**2,873,224**	**767,963**	**2,874,676**
b. Swasta	**3,620,432**	**2,517,948**	**1,043,950**	**222,200**	**3,260,437**	**3,959,068**	**2,504,299**	**1,114,553**	**232,315**	**3,316,474**
1. Sosial Kemasyarakatan	1,233,814	494,837	332,230	80,193	655,728	1,302,951	503,763	334,122	85,513	656,102
2. Hiburan & Rekreasi	272,369	47,371	45,882	22,297	29,079	278,947	51,077	46,358	22,950	31,824
3. Perorangan & Rumahtangga	2,114,249	1,975,740	665,838	119,710	2,575,630	2,377,170	1,949,459	734,073	123,852	2,628,548
Jumlah	**57,380,517**	**58,847,838**	**38,065,273**	**4,723,199**	**54,398,896**	**57,215,224**	**60,200,704**	**39,394,515**	**4,824,444**	**55,058,974**

Sumber : *PDRB Propinsi Indonesia menurut Lapangan Usaha*, BPS Yogyakarta

Lapangan Usaha	2000					2001				
	Jakarta	Jabar	Jateng	DIY	Jatim	Jakarta	Jabar	Jateng	DIY	Jatim
1. PERTANIAN	**115,743**	**7,842,831**	**8,455,973**	**901,381**	**10,126,248**	**113,408**	**8,087,029**	**8,598,968**	**886,990**	**10,371,281**
a. Tanaman Bahan Makanan	56,729	6,158,679	5,413,545	**643,770**	6,738,788	55,009	6,381,996	5,284,476	609,229	6,702,350
b. Tanaman Perkebunan	9,367	423,330	503,154	25,746	1,527,827	9,506	443,634	506,898	29,940	1,552,421
c. Perternakan	9,862	698,164	1,613,450	126,696	933,065	9,985	645,880	1,820,013	124,383	1,121,856
d. Kehutanan	0	88,585	317,086	91,646	207,222	0	98,971	331,408	109,289	238,561
e. Perikanan	39,785	474,073	608,738	13,523	719,346	38,908	516,548	656,173	14,149	756,093
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**0**	**3,487,448**	**589,963**	**60,555**	**1,138,197**	**0**	**3,273,481**	**642,027**	**60,917**	**1,136,382**
a. Minyak & Gas	0	3,368,434	25,576	0	164,753	0	3,150,859	29,272	0	68,029
b. Pertambangan tanpa Migas	0	23,135	3,117	0	14,134	0	23,118	2,803	0	15,904
c. Penggalian	0	95,879	561,270	60,555	959,310	0	99,504	609,952	60,917	1,052,449
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**12,875,191**	**21,833,139**	**12,421,426**	**664,115**	**15,357,553**	**13,320,467**	**22,908,171**	**12,819,595**	**677,486**	**15,538,228**
a. Industri Migas	**0**	**889,480**	**2,683,416**	**0**	**0**	**0**	**821,765**	**2,832,066**	**0**	**0**
1. Pengilangan Minyak Bumi	0	889,480	2,683,416	0	0	0	821,765	2,832,066	0	0
2. Gas Alam Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Industri Tanpa Migas	**12,875,191**	**20,943,659**	**9,738,010**	**664,115**	**15,357,553**	**13,320,467**	**22,086,406**	**9,987,529**	**677,486**	**15,538,228**
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	**1,245,846**	**1,800,088**	**493,724**	**38,128**	**1,483,159**	**1,296,863**	**1,919,107**	**509,109**	**39,005**	**1,594,202**
a. Listrik	885,832	1,627,124	395,269	34,415	1,242,272	918,384	1,739,243	403,309	35,169	1,337,087
b. Gas	167,233	21,546	0	0	93,724	175,225	21,738	0	0	110,247
c. Air Bersih	192,781	151,418	98,455	3,713	147,163	203,254	158,126	105,800	3,836	146,868
5. BANGUNAN	**6,535,392**	**1,904,918**	**1,650,463**	**400,859**	**2,607,913**	**6,639,223**	**1,875,250**	**1,693,045**	**412,355**	**2,608,179**
6. PERDAG, HOTEL & RESTORAN	**14,166,037**	**9,139,872**	**9,632,603**	**791,621**	**11,908,392**	**14,799,488**	**9,499,500**	**10,092,089**	**846,634**	**12,837,586**
a. Perdagangan Besar & Eceran	10,938,830	7,216,169	8,291,946	307,243	9,343,425	11,405,290	7,412,692	8,579,264	324,422	9,899,774
b. Hotel	501,871	80,815	180,199	104,550	578,596	535,321	82,214	192,597	98,953	589,251
c. Air Bersih	2,725,336	1,842,888	1,160,458	379,828	1,986,371	2,858,877	2,004,594	1,320,228	423,259	2,348,561
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	**5,736,012**	**2,708,611**	**2,053,019**	**609,594**	**4,745,527**	**6,047,504**	**2,890,102**	**2,219,896**	**672,921**	**4,792,519**
a. Pengangkutan	**3,932,844**	**2,153,840**	**1,521,997**	**514,656**	**3,261,706**	**4,125,140**	**2,290,106**	**1,631,647**	**570,123**	**3,137,470**
1. Angkutan Rel	79,867	28,460	35,568	23,028	81,110	73,283	29,435	30,125	22,938	69,759
2. Angkutan Jalan Raya	2,014,978	1,670,901	1,214,046	458,967	1,771,461	2,114,816	1,845,078	1,315,877	513,205	1,697,145
3. Angkutan Laut, Sungai, Danau & Penyeberangan	992,991	213,914	180,286	0	249,718	1,063,708	178,120	188,922	0	188,617
4. Angkutan Udara	13,214	102,001	1,866	16,438	113,455	15,486	88,281	1,619	16,802	142,934
5. Jasa Penunjang Angkutan	831,794	138,564	90,231	16,223	1,045,962	857,847	149,192	95,104	17,178	1,039,015
b. Komunikasi	**1,803,168**	**554,771**	**531,022**	**94,938**	**1,483,821**	**1,922,364**	**599,996**	**588,249**	**102,798**	**1,655,049**
8. KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	**13,285,023**	**2,134,666**	**1,605,967**	**524,512**	**3,193,520**	**13,740,441**	**2,346,441**	**1,622,748**	**543,471**	**3,378,586**
a. bank	6,785,037	233,122	150,403	41,000	374,077	7,099,570	317,116	151,016	44,187	387,483

b. Lembaga Keu. Tanpa Bank & Jasa	1,335,011	152,158	254,836	47,065	402,670	1,391,927	152,691	260,639	50,396	422,884
c. Sewa Bangunan	2,727,884	1,390,730	1,131,177	418,095	1,392,491	2,748,489	1,480,882	1,138,759	430,053	1,456,025
d. Jasa Perusahaan	2,437,091	358,656	69,551	18,352	1,024,282	2,500,455	395,752	72,334	18,835	1,112,194
9. JASA-JASA	**5,735,176**	**4,717,178**	**4,038,526**	**1,026,946**	**6,296,012**	**5,908,578**	**5,025,759**	**4,107,700**	**1,042,764**	**6,501,295**
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	**1,568,828**	**2,626,949**	**2,891,612**	**778,472**	**2,882,648**	**1,595,499**	**2,813,140**	**2,920,724**	**786,766**	**2,917,842**
b. Swasta	**4,166,348**	**2,090,229**	**1,146,914**	**248,474**	**3,413,364**	**4,313,079**	**2,212,619**	**1,186,976**	**255,998**	**3,583,453**
1. Sosial Kemasyarakatan	1,364,640	386,120	342,230	88,299	663,396	1,393,684	410,670	352,254	89,224	658,108
2. Hiburan & Rekreasi	296,749	47,487	46,177	24,593	35,956	307,281	50,868	46,395	25,653	39,428
3. Perorangan & Rumahtangga	2,504,959	1,656,622	758,507	135,582	2,714,012	2,612,114	1,751,081	788,327	141,121	2,885,917
Jumlah	**59,694,420**	**55,568,751**	**40,941,664**	**5,017,711**	**56,856,521**	**61,865,972**	**57,824,840**	**42,305,177**	**5,182,543**	**58,758,258**

Sumber : *PDRB Propinsi Indonesia menurut Lapangan Usaha*, BPS Yogyakarta

Lampiran 5
PDRB Jawa Atas Dasar Harga Konstan 1993
Per Propinsi, Menurut Pengunaan, 1998-2001
(Juta Rupiah)

Penggunaan	1998					1999				
	Jakarta	Jabar	Jateng	DIY	Jatim	Jakarta	Jabar	Jateng	DIY	Jatim
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	26,248,653	37,454,120	22,103,884	2,211,831	32,871,909	28,077,539	39,809,601	24,466,949	2,326,663	35,792,578
2. Penguluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	96,904	432,579	741,514	25,514	597,485	99,647	462,244	986,213	29,753	620,102
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,325,974	3,962,507	4,080,770	880,954	3,613,139	2,292,481	4,231,363	5,313,178	936,495	3,584,936
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	21,420,709	13,164,151	7,795,292	1,111,794	12,379,783	20,976,678	12,523,779	6,189,368	1,164,265	12,778,300
5. Perubahan Stok	601,105	543,129	339,017	572,936	-415,929	1,097,478	-753,445	936,329	363,081	767,174
6. Ekspor Barang dan Jasa	34,467,077	21,201,219	19,829,272	1,656,437	40,341,992	27,298,206	25,228,508	19,226,014	1,592,364	35,190,352
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	27,779,904	17,909,864	16,824,476	1,682,267	34,989,483	22,626,806	21,301,345	17,723,538	1,588,175	33,674,471
Jumlah	**57,380,518**	**58,847,841**	**38,065,273**	**4,777,199**	**54,398,896**	**57,215,223**	**60,200,705**	**39,394,513**	**4,824,446**	**55,058,971**

Sumber : *PDRB Propinsi Indonesia menurut Penggunaan*, BPS Yogyakarta

Penggunaan	2000					2001				
	Jakarta	Jabar	Jateng	DIY	Jatim	Jakarta	Jabar	Jateng	DIY	Jatim
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29,025,121	41,676,364	26,410,189	2,401,267	36,829,614	30,555,057	43,881,311	27,006,349	2,426,877	37,787,207
2. Penguluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	101,581	318,963	1,006,511	31,343	637,663	104,133	316,243	1,064,012	51,038	658,324
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,383,286	3,920,624	6,846,598	945,837	3,859,032	2,480,732	4,086,358	7,084,099	1,003,878	4,125,073
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	21,509,223	8,984,386	6,567,385	1,239,462	11,957,212	21,947,065	9,260,244	6,929,411	1,282,158	11,998,996
5. Perubahan Stok	2,249,497	-605,950	-3,567,222	418,098	2,385,789	1,605,317	-81,508	-7,185,893	522,134	1,803,880
6. Ekspor Barang dan Jasa	28,629,951	19,617,495	22,017,447	1,629,642	39,193,580	30,851,856	18,353,641	21,991,428	1,642,254	33,520,035
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	24,204,240	18,343,129	18,339,240	1,647,940	38,006,371	25,678,189	17,991,446	14,584,260	1,745,795	31,135,257
Jumlah	**59,694,419**	**55,568,753**	**40,941,668**	**5,017,709**	**56,856,519**	**61,865,971**	**57,824,843**	**42,305,146**	**5,182,544**	**58,758,258**

Sumber : *PDRB Propinsi Indonesia menurut Penggunaan*, BPS Yogyakarta

Lampiran 6
Jumlah Perusahaan, Nilai Output dan Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi per Propinsi di Jawa, 2001
(Juta Rupiah)

Kode	Klasifikasi Industri Pengolahan	DKI Jakarta			Jawa Barat		
		Jumlah Perusahaan	Nilai Output	Nilai Tambah (Harga Pasar)	Jumlah Perusahaan	Nilai Output	Nilai Tambah (Harga Pasar)
15	Makanan dan Minuman	213	8,837,661	2,585,197	811	11,007,868	3,990,173
16	Pengolahan Tembakau	-	-	-	3	1,735,683	1,526,762
17	Tekstil	146	2,458,139	1,140,751	874	32,987,968	10,113,251
18	Pakaian Jadi	571	6,610,979	2,174,728	492	10,396,995	3,375,314
19	Kulit dan Barang dari Kulit	83	907,254	432,417	148	5,947,110	2,052,236
20	Kayu, Barang-barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur), dan Barang-barang Anyaman	52	343,662	164,675	132	1,344,468	666,323
21	Kertas dan Barang dari Kertas	61	2,071,280	847,929	78	4,668,860	1,279,981
22	Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	149	766,675	331,997	62	267,809	107,543
23	Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir	2	13,699	11,418	10	53,107	14,914
24	Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	145	11,124,729	4,457,753	251	17,480,914	6,441,960
25	Karet dan Barang dari Karet	190	1,952,614	558,301	300	9,529,583	2,740,499
26	Barang Galian Bukan Logam	31	2,499,640	1,495,271	657	6,857,341	3,542,890
27	Logam Dasar	33	9,623,089	3,731,187	45	3,392,975	1,805,765
28	Barang-barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya	138	1,640,139	645,850	215	4,284,711	1,524,167
29	Mesin dan Perlengkapannya	47	2,589,630	998,446	181	11,748,889	4,543,601
30	Mesin dan Peralatan Kantor, Akutansi dan Pengolahan Data	1	218	642	7	25,566	17,205
31	Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya	46	1,962,264	848,414	72	6,652,250	1,753,996
32	Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya	15	3,462,936	859,501	70	13,446,752	3,756,569
33	Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	17	353,073	137,943	14	153,483	66,154
34	Kendaraan Bermotor	36	16,948,828	13,069,136	88	5,606,471	3,711,064
35	Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	40	20,457,069	3,374,073	42	5,687,141	1,219,465
36	Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya	114	1,602,491	639,581	335	3,438,261	1,481,884
37	Daur Ulang	16	266,479	15,564	12	10,531	2,441
	Jumlah	**2,146**	**96,492,549**	**38,520,772**	**4,899**	**156,724,736**	**55,734,157**

Kode	Klasifikasi Industri Pengolahan	Jawa Tengah			Jawa Timur		
		Jumlah Perusahaan	Nilai Output	Nilai Tambah (Harga Pasar)	Jumlah Perusahaan	Nilai Output	Nilai Tambah (Harga Pasar)
15	Makanan dan Minuman	748	7,831,450	3,566,341	1,337	21,519,051	6,011,384
16	Pengolahan Tembakau	397	11,189,560	4,667,554	351	32,518,223	23,140,290
17	Tekstil	372	13,006,754	3,094,802	179	2,013,995	559,565
18	Pakaian Jadi	398	3,825,988	1,470,417	357	1,600,678	529,857
19	Kulit dan Barang dari Kulit	29	442,326	127,547	174	2,978,980	1,094,261
20	Kayu, Barang-barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur), dan Barang-barang Anyaman	187	2,448,929	921,240	321	3,792,481	1,790,796
21	Kertas dan Barang dari Kertas	51	1,057,811	395,964	97	12,676,094	2,460,627
22	Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	100	1,152,920	293,426	93	1,113,721	201,328
23	Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir	2	11,792	3,503	14	88,737	28,149
24	Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	107	5,187,305	1,113,730	232	11,329,159	3,133,193
25	Karet dan Barang dari Karet	140	2,947,945	1,180,332	273	4,330,490	1,815,176
26	Barang Galian Bukan Logam	204	1,772,401	708,052	305	5,004,906	2,607,827
27	Logam Dasar	16	1,146,028	337,947	62	9,168,833	2,863,299
28	Barang-barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya	109	292,939	81,014	197	2,793,247	1,184,065
29	Mesin dan Perlengkapannya	52	639,804	280,351	62	1,255,308	591,228
30	Mesin dan Peralatan Kantor, Akutansi dan Pengolahan Data	-	-	-	3	1,105	735
31	Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya	7	19,429	5,703	37	4,382,715	2,199,929
32	Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya	2	485,208	189,799	11	103,205	18,528
33	Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	3	8,402	5,832	14	378,150	30,504
34	Kendaraan Bermotor	19	594,421	490,894	37	835,082	330,268
35	Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	30	168,550	81,941	102	1,331,821	836,651
36	Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya	592	5,223,418	3,864,433	413	3,370,354	1,383,338
37	Daur Ulang	7	12,178	4,563	66	930,448	379,327
	Jumlah	**3,572**	**59,465,559**	**22,885,384**	**4,737**	**123,516,784**	**53,190,325**

Kode	Klasifikasi Industri Pengolahan	DI Yogyakarta		
		Jumlah Perusahaan	Nilai Output	Nilai Tambah (Harga Pasar)
31	Makanan, Minuman dan Tembakau	50	924,810	376,984
32	Teksti, Pakaian Jadi dan Kulit	97	871,401	210,403
33	Kayu, Bambu, Rotan, Rumput dan Sejenisnya, ternasuk Alat Rumah Tangga	102	149,732	55,849
34	Kertas, Barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan	23	68,795	31,539
35	Kimia, Barang dari Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Barang dari Plastik	23	142,877	32,121
36	Barang Galian Bukan Logam kecuali Minyak Bumi dan Batu Bara	59	60,950	23,784
37	Logam Dasar	-	-	-
38	Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya	22	242,501	120,025
39	Industri Pengolahan Lainnya	18	48,033	21,889
	Jumlah	**394**	**2,509,098**	**872,594**

Lampiran 7
PDRB per kapita dan Jumlah Penduduk
Tahun 1998-2001

No.	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita				Jumlah Penduduk			
		1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001
1	Jakarta Selatan	5,194,733	5,318,430	6,249,558	6,699,403	1,983,443	1,966,113	1,733,397	1,674,780
2	Jakarta Timur	5,446,841	5,390,520	5,610,109	5,760,885	2,052,834	2,058,141	2,051,222	2,061,911
3	Jakarta Pusat	12,732,055	12,745,753	13,954,530	16,485,266	1,108,026	1,107,606	1,056,088	929,259
4	Jakarta Barat	6,069,514	5,971,310	6,148,976	6,360,463	1,520,658	1,541,004	1,558,238	1,565,420
5	Jakarta Utara	10,922,749	10,950,452	11,122,255	11,365,432	1,153,612	1,158,656	1,179,756	1,192,009
1	Pandeglang*	1,061,729	1,090,845	-	-	943,378	967,046	-	-
2	Lebak*	926,010	972,529	-	-	984,409	1,008,749	-	-
3	Bogor	1,232,697	1,126,383	1,233,897	1,262,935	4,356,682	4,843,590	3,489,746	3,532,490
4	Sukabumi	1,032,382	972,250	1,091,614	1,148,060	1,904,963	2,056,066	2,059,920	2,084,172
5	Cianjur	1,080,029	1,079,095	1,053,874	1,078,778	1,787,708	1,827,589	1,931,840	1,955,100
6	Bandung	1,841,273	1,852,880	1,657,072	1,702,728	3,443,701	3,524,440	4,146,997	4,235,146
7	Garut	1,098,302	1,099,745	1,063,730	1,086,699	1,857,102	1,901,462	2,042,386	2,067,524
8	Tasikmalaya	1,001,814	1,077,883	1,047,692	1,073,126	1,894,507	1,925,448	2,049,688	2,068,611
9	Ciamis	1,232,698	1,237,608	1,275,102	1,312,838	1,563,592	1,594,546	1,599,064	1,607,321
10	Kuningan	942,456	710,720	929,399	952,248	928,926	942,734	980,605	987,700
11	Cirebon	798,143	810,443	826,437	856,817	1,818,738	1,859,451	1,911,625	1,933,794
12	Majalengka	961,835	980,597	1,007,873	1,054,568	1,083,837	1,100,682	1,117,802	1,123,920
13	Sumedang	1,133,348	1,138,911	1,088,887	1,111,219	873,318	888,302	967,049	979,047
14	Indramayu	3,264,906	2,857,558	2,829,144	2,828,591	1,532,061	1,563,841	1,585,922	1,597,032
15	Subang	1,375,274	1,357,275	1,360,301	1,403,498	1,254,613	1,274,920	1,319,264	1,328,521
16	Purwakarta	1,431,980	3,019,784	2,796,024	2,846,121	617,462	630,261	698,353	711,033
17	Karawang	1,454,238	1,531,681	1,582,760	1,730,589	1,613,183	1,650,703	1,765,263	1,789,525
18	Bekasi	4,757,146	4,819,027	5,269,675	5,310,022	1,684,361	1,701,640	1,642,952	1,698,215
19	Tangerang*	1,450,328	1,440,144	-	-	2,680,316	2,756,297	-	-
20	Serang*	2,844,287	2,845,098	-	-	1,700,988	1,744,046	-	-
21	Kota Bogor	1,394,371	1,638,812	1,540,986	1,493,803	656,628	668,379	743,478	809,975
22	Kota Sukabumi	1,904,126	1,944,052	1,899,340	1,952,942	232,656	235,163	252,293	257,675
23	Kota Bandung	2,131,707	2,140,123	2,679,010	2,869,503	2,483,902	2,543,476	2,141,837	2,146,360
24	Kota Cirebon	4,839,147	4,900,919	5,029,519	5,215,870	264,110	266,753	269,186	270,756
25	Kota Tangerang*	4,284,275	4,173,189	-	-	1,325,820	1,396,824	-	-
26	Kota Bekasi	-	2,064,975	2,049,336	2,071,099	-	1,556,176	1,639,286	1,707,360
27	Kota Depok	-	-	1,132,660	1,161,906	-	-	1,146,055	1,184,045
28	Kota Cilegon*	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Cilacap	3,762,832	3,862,454	4,073,846	4,241,843	1,562,875	1,579,215	1,600,834	1,613,964
2	Banyumas	701,319	697,906	710,429	712,333	1,402,448	1,416,816	1,447,865	1,460,324
3	Purbalingga	772,049	775,319	781,466	798,638	762,439	767,590	782,714	788,675
4	Banjarnegara	1,014,053	1,006,836	1,023,928	1,016,128	826,378	835,964	831,327	838,962
5	Kebumen	717,730	738,297	774,714	784,646	1,153,960	1,163,848	1,160,922	1,166,604
6	Purworejo	922,476	942,028	972,453	1,004,954	706,799	709,296	703,691	704,063
7	Wonosobo	693,999	712,328	714,841	713,360	697,555	705,470	730,677	739,648
8	Magelang	956,705	964,673	965,366	994,415	1,048,170	1,056,540	1,092,776	1,102,359
9	Boyolali	1,009,244	1,013,182	1,012,699	1,042,645	866,137	872,974	891,363	897,207
10	Klaten	1,035,397	1,033,915	1,083,139	1,124,617	1,108,798	1,115,786	1,107,477	1,109,486
11	Sukoharjo	1,458,601	1,452,859	1,447,529	1,482,615	727,832	739,867	768,752	780,949
12	Wonogiri	756,054	766,352	810,939	831,375	981,889	987,539	966,271	967,178
13	Karanganyar	1,478,210	1,498,539	1,580,660	1,588,063	750,519	761,772	754,802	761,988
14	Sragen	781,800	791,014	826,963	843,061	849,852	856,614	842,759	845,320
15	Grobogan	570,154	545,095	565,799	583,422	1,222,881	1,237,087	1,257,958	1,271,500
16	Blora	853,527	856,033	868,601	888,727	799,428	804,751	808,443	813,675
17	Rembang	841,869	855,284	908,855	936,836	554,301	561,477	554,690	559,523
18	Pati	839,078	848,084	822,227	839,332	1,100,224	1,105,410	1,144,300	1,154,506
19	Kudus	4,354,799	4,314,671	4,401,219	4,487,640	690,428	702,330	701,537	709,905
20	Jepara	1,037,195	1,028,055	1,027,387	1,058,674	905,666	919,833	962,909	980,443
21	Demak	764,890	769,062	770,914	780,965	924,236	940,662	965,499	984,741
22	Semarang	1,196,886	1,204,710	1,264,676	1,297,328	823,160	829,768	828,169	834,314
23	Temanggung	1,020,047	1,034,551	1,057,754	1,094,846	646,741	652,034	659,881	665,470

24	Kendal	1,746,669	1,761,664	1,834,146	1,872,960	851,882	861,243	845,370	851,504
25	Batang	1,108,922	1,125,125	1,096,197	1,107,859	623,457	628,764	658,321	665,426
26	Pekalongan	1,114,131	1,146,198	1,084,550	1,114,609	729,330	734,887	795,044	807,051
27	Pemalang	846,519	845,979	868,660	884,309	1,221,111	1,241,320	1,253,706	1,271,404
28	Tegal	646,710	655,312	663,348	685,778	1,310,732	1,326,261	1,374,382	1,391,184
29	Brebes	748,052	766,603	817,652	846,018	1,690,864	1,722,868	1,689,011	1,711,364
30	Kota Magelang	2,386,283	2,438,139	2,739,242	2,809,608	123,750	125,632	116,245	116,800
31	Kota Surakarta	2,342,396	2,359,569	2,662,037	2,763,590	526,392	530,100	489,368	489,900
32	Kota Salatiga	2,318,185	2,309,128	1,693,479	1,698,261	104,085	106,361	150,201	155,244
33	Kota Semarang	3,382,082	3,426,503	3,832,763	3,994,864	1,400,911	1,429,808	1,341,730	1,353,047
34	Kota Pekalongan	1,094,878	1,073,619	1,666,474	1,722,476	367,206	389,294	260,814	263,190
35	Kota Tegal	1,035,362	998,446	1,520,812	1,594,351	323,009	342,040	236,038	236,900
1	Kulon Progo	884,101	790,219	800,656	810,355	435,225	437,930	440,706	443,819
2	Bantul	1,064,452	1,069,849	1,093,849	1,117,657	760,891	767,035	773,158	780,177
3	Gunung Kidul	1,209,232	1,225,036	1,251,873	1,273,877	736,292	739,259	743,284	746,451
4	Sleman	1,671,898	1,685,044	1,719,954	1,762,677	824,266	833,603	844,076	856,558
5	Kota Yogyakarta	2,694,846	2,688,143	2,746,574	2,790,989	480,954	487,115	493,903	500,949
1	Pacitan	626,390	638,716	636,902	644,706	534,692	530,326	541,326	543,252
2	Ponorogo	739,059	743,611	754,415	772,273	884,459	889,417	894,673	898,158
3	Trenggalek	712,902	749,801	766,906	793,299	683,860	662,868	667,244	671,404
4	Tulungagung	1,099,268	1,114,067	1,152,567	1,194,467	947,790	955,451	964,127	972,187
5	Blitar	970,222	983,283	1,002,428	1,929,337	1,090,399	1,092,803	1,096,758	1,101,853
6	Kediri	1,051,313	1,058,199	1,072,680	1,082,972	1,340,299	1,351,247	1,378,216	1,400,292
7	Malang	1,124,091	1,145,132	1,167,101	1,222,139	2,345,567	2,362,546	2,382,258	2,399,904
8	Lumajang	969,661	976,286	1,003,093	1,028,053	934,478	941,590	943,800	948,671
9	Jember	1,006,869	1,014,408	1,048,893	1,077,893	2,083,068	2,106,632	2,105,132	2,120,074
10	Banyuwangi	1,119,581	1,160,760	1,198,672	1,250,360	1,451,787	1,454,581	1,470,094	1,475,438
11	Bondowoso	859,595	870,908	873,808	891,131	662,726	663,511	674,725	673,129
12	Situbondo	1,438,879	1,454,655	1,456,457	1,492,771	580,235	581,080	600,235	600,208
13	Probolinggo	1,400,503	1,431,139	1,477,182	1,473,578	934,261	922,582	922,667	961,190
14	Pasuruan	1,148,698	1,155,912	1,185,570	1,228,074	1,197,362	1,208,473	1,222,071	1,225,866
15	Sidoarjo	3,073,254	3,023,602	3,032,098	3,079,063	1,192,165	1,232,552	1,266,776	1,293,111
16	Mojokerto	1,403,197	1,445,513	1,438,077	1,476,222	866,684	851,981	880,855	887,831
17	Jombang	930,539	936,196	958,660	978,579	1,114,150	1,121,721	1,129,014	1,135,285
18	Nganjuk	1,097,878	1,099,061	1,119,789	1,210,625	1,004,193	1,008,864	1,013,101	1,016,030
19	Madiun	844,833	855,854	878,778	905,186	651,049	654,665	654,665	654,665
20	Magetan	887,454	897,556	917,688	938,322	675,376	677,464	680,402	683,472
21	Ngawi	784,446	786,973	795,430	814,747	848,093	854,073	858,042	862,533
22	Bojonegoro	835,896	832,522	849,828	869,247	1,170,917	1,176,016	1,183,660	1,191,394
23	Tuban	1,077,890	1,150,031	1,172,415	1,211,499	1,006,751	1,015,732	1,021,920	1,027,486
24	Lamongan	900,947	916,366	932,409	950,633	1,188,866	1,193,644	1,200,103	1,210,879
25	Gresik	3,414,050	2,978,063	3,029,320	3,160,535	920,478	942,898	957,048	963,816
26	Bangkalan	1,018,300	1,020,043	1,042,882	1,065,485	733,778	749,202	762,046	773,500
27	Sampang	714,816	775,724	784,173	788,839	709,495	710,658	715,233	721,869
28	Pamekasan	748,028	693,623	702,939	703,924	666,675	671,544	674,133	683,916
29	Sumenep	914,079	595,307	609,003	620,697	956,091	958,358	966,189	978,763
30	Kota Kediri	24,309,283	24,624,713	25,838,776	27,343,574	236,307	236,575	238,536	238,955
31	Kota Blitar	1,351,936	1,339,253	1,383,035	1,419,502	121,087	122,117	123,194	123,778
32	Kota Malang	3,270,156	3,328,266	3,324,205	3,342,317	710,576	719,744	730,768	743,508
33	Kota Probolinggo	2,328,900	2,367,724	2,438,337	2,478,294	180,659	181,093	181,431	181,999
34	Kota Pasuruan	1,687,766	1,705,086	1,757,761	1,823,730	156,561	157,739	158,864	159,796
35	Kota Mojokerto	2,059,823	2,121,862	2,242,341	2,295,237	107,123	108,027	108,045	108,025
36	Kota Madiun	1,514,882	1,537,171	1,555,556	1,600,309	186,331	185,643	188,344	189,571
37	Kota Surabaya	6,501,754	5,429,374	5,503,312	5,694,010	2,373,082	2,401,104	2,444,976	2,463,716
38	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**215,611,163**	**218,291,574**	**217,191,916**	**227,043,739**	**114,376,077**	**117,940,788**	**111,150,956**	**112,175,997**
	Rata-rata	**2,015,057.60**	**2,021,218.28**	**2,088,383.81**	**2,183,112.88**				
	PULAU JAWA								

Jumlah PDRB Per Kapita (Propinsi)

No.	Propinsi	1998	1999	2000	2001
1	DKI Jakarta	40,365,892	40,376,465	43,085,428	46,671,449
2	Jawa Barat	45,474,501	48,882,526	40,444,332	41,523,960
3	Jawa Tengah	46,309,103	46,617,532	48,945,764	50,241,146
4	DI Yogyakarta	7,524,529	7,458,291	7,612,906	7,755,555
5	Jawa Timur	75,937,138	74,956,760	77,103,486	80,851,629

Populasi (Propinsi)

1998	1999	2000	2001
7,818,573	7,831,520	7,578,701	7,423,379
39,486,961	42,428,584	35,500,611	36,075,322
30,385,445	30,761,221	30,775,846	31,063,818
3,237,628	3,264,942	3,295,127	3,327,954
33,447,470	33,654,521	34,000,671	34,285,524

Lampiran 8
Share PDRB dan Share Populasi
Tahun 1998-2001

No.	Kabupaten/Kota	Share PDRB				Share Populasi			
		1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001
1	Jakarta Selatan	2.5780	2.6313	2.9925	3.0687	0.0173	0.0167	0.0156	0.0149
2	Jakarta Timur	2.7031	2.6670	2.6863	2.6388	0.0179	0.0175	0.0185	0.0184
3	Jakarta Pusat	6.3185	6.3060	6.6820	7.5513	0.0097	0.0094	0.0095	0.0083
4	Jakarta Barat	3.0121	2.9543	2.9444	2.9135	0.0133	0.0131	0.0140	0.0140
5	Jakarta Utara	5.4206	5.4177	5.3258	5.2061	0.0101	0.0098	0.0106	0.0106
1	Pandeglang*	0.5269	0.5397	-	-	0.0082	0.0082	-	-
2	Lebak*	0.4595	0.4812	-	-	0.0086	0.0086	-	-
3	Bogor	0.6117	0.5573	0.5908	0.5785	0.0381	0.0411	0.0314	0.0315
4	Sukabumi	0.5123	0.4810	0.5227	0.5259	0.0167	0.0174	0.0185	0.0186
5	Cianjur	0.5360	0.5339	0.5046	0.4941	0.0156	0.0155	0.0174	0.0174
6	Bandung	0.9138	0.9167	0.7935	0.7800	0.0301	0.0299	0.0373	0.0378
7	Garut	0.5450	0.5441	0.5094	0.4978	0.0162	0.0161	0.0184	0.0184
8	Tasikmalaya	0.4972	0.5333	0.5017	0.4916	0.0166	0.0163	0.0184	0.0184
9	Ciamis	0.6117	0.6123	0.6106	0.6014	0.0137	0.0135	0.0144	0.0143
10	Kuningan	0.4677	0.3516	0.4450	0.4362	0.0081	0.0080	0.0088	0.0088
11	Cirebon	0.3961	0.4010	0.3957	0.3925	0.0159	0.0158	0.0172	0.0172
12	Majalengka	0.4773	0.4852	0.4826	0.4831	0.0095	0.0093	0.0101	0.0100
13	Sumedang	0.5624	0.5635	0.5214	0.5090	0.0076	0.0075	0.0087	0.0087
14	Indramayu	1.6203	1.4138	1.3547	1.2957	0.0134	0.0133	0.0143	0.0142
15	Subang	0.6825	0.6715	0.6514	0.6429	0.0110	0.0108	0.0119	0.0118
16	Purwakarta	0.7106	1.4940	1.3388	1.3037	0.0054	0.0053	0.0063	0.0063
17	Karawang	0.7217	0.7578	0.7579	0.7927	0.0141	0.0140	0.0159	0.0160
18	Bekasi	2.3608	2.3842	2.5233	2.4323	0.0147	0.0144	0.0148	0.0151
19	Tangerang*	0.7197	0.7125	-	-	0.0234	0.0234	-	-
20	Serang*	1.4115	1.4076	-	-	0.0149	0.0148	-	-
21	Kota Bogor	0.6920	0.8108	0.7379	0.6843	0.0057	0.0057	0.0067	0.0072
22	Kota Sukabumi	0.9449	0.9618	0.9095	0.8946	0.0020	0.0020	0.0023	0.0023
23	Kota Bandung	1.0579	1.0588	1.2828	1.3144	0.0217	0.0216	0.0193	0.0191
24	Kota Cirebon	2.4015	2.4247	2.4083	2.3892	0.0023	0.0023	0.0024	0.0024
25	Kota Tangerang*	2.1261	2.0647	-	-	0.0116	0.0118	-	-
26	Kota Bekasi	-	1.0216	0.9813	0.9487	-	0.0132	0.0147	0.0152
27	Kota Depok	-	-	0.5424	0.5322	-	-	0.0103	0.0106
28	Kota Cilegon*	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Cilacap	1.8674	1.9110	1.9507	1.9430	0.0137	0.0134	0.0144	0.0144
2	Banyumas	0.3480	0.3453	0.3402	0.3263	0.0123	0.0120	0.0130	0.0130
3	Purbalingga	0.3831	0.3836	0.3742	0.3658	0.0067	0.0065	0.0070	0.0070
4	Banjarnegara	0.5032	0.4981	0.4903	0.4654	0.0072	0.0071	0.0075	0.0075
5	Kebumen	0.3562	0.3653	0.3710	0.3594	0.0101	0.0099	0.0104	0.0104
6	Purworejo	0.4578	0.4661	0.4656	0.4603	0.0062	0.0060	0.0063	0.0063
7	Wonosobo	0.3444	0.3524	0.3423	0.3268	0.0061	0.0060	0.0066	0.0066
8	Magelang	0.4748	0.4773	0.4623	0.4555	0.0092	0.0090	0.0098	0.0098
9	Boyolali	0.5009	0.5013	0.4849	0.4776	0.0076	0.0074	0.0080	0.0080
10	Klaten	0.5138	0.5115	0.5186	0.5151	0.0097	0.0095	0.0100	0.0099
11	Sukoharjo	0.7239	0.7188	0.6931	0.6791	0.0064	0.0063	0.0069	0.0070
12	Wonogiri	0.3752	0.3792	0.3883	0.3808	0.0086	0.0084	0.0087	0.0086
13	Karanganyar	0.7336	0.7414	0.7569	0.7274	0.0066	0.0065	0.0068	0.0068
14	Sragen	0.3880	0.3914	0.3960	0.3862	0.0074	0.0073	0.0076	0.0075
15	Grobogan	0.2829	0.2697	0.2709	0.2672	0.0107	0.0105	0.0113	0.0113
16	Bloro	0.4236	0.4235	0.4159	0.4071	0.0070	0.0068	0.0073	0.0073
17	Rembang	0.4178	0.4232	0.4352	0.4291	0.0048	0.0048	0.0050	0.0050
18	Pati	0.4164	0.4196	0.3937	0.3845	0.0096	0.0094	0.0103	0.0103
19	Kudus	2.1611	2.1347	2.1075	2.0556	0.0060	0.0060	0.0063	0.0063
20	Jepara	0.5147	0.5086	0.4920	0.4849	0.0079	0.0078	0.0087	0.0087
21	Demak	0.3796	0.3805	0.3691	0.3577	0.0081	0.0080	0.0087	0.0088
22	Semarang	0.5940	0.5960	0.6056	0.5943	0.0072	0.0070	0.0075	0.0074
23	Temanggung	0.5062	0.5118	0.5065	0.5015	0.0057	0.0055	0.0059	0.0059

24	Kendal	0.8668	0.8716	0.8783	0.8579	0.0074	0.0073	0.0076	0.0076
25	Batang	0.5503	0.5567	0.5249	0.5075	0.0055	0.0053	0.0059	0.0059
26	Pekalongan	0.5529	0.5671	0.5193	0.5106	0.0064	0.0062	0.0072	0.0072
27	Pemalang	0.4201	0.4185	0.4159	0.4051	0.0107	0.0105	0.0113	0.0113
28	Tegal	0.3209	0.3242	0.3176	0.3141	0.0115	0.0112	0.0124	0.0124
29	Brebes	0.3712	0.3793	0.3915	0.3875	0.0148	0.0146	0.0152	0.0153
30	Kota Magelang	1.1842	1.2063	1.3117	1.2870	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
31	Kota Surakarta	1.1624	1.1674	1.2747	1.2659	0.0046	0.0045	0.0044	0.0044
32	Kota Salatiga	1.1504	1.1424	0.8109	0.7779	0.0009	0.0009	0.0014	0.0014
33	Kota Semarang	1.6784	1.6953	1.8353	1.8299	0.0122	0.0121	0.0121	0.0121
34	Kota Pekalongan	0.5433	0.5312	0.7980	0.7890	0.0032	0.0033	0.0023	0.0023
35	Kota Tegal	0.5138	0.4940	0.7282	0.7303	0.0028	0.0029	0.0021	0.0021
1	Kulon Progo	0.4387	0.3910	0.3834	0.3712	0.0038	0.0037	0.0040	0.0040
2	Bantul	0.5282	0.5293	0.5238	0.5120	0.0067	0.0065	0.0070	0.0070
3	Gunung Kidul	0.6001	0.6061	0.5994	0.5835	0.0064	0.0063	0.0067	0.0067
4	Sleman	0.8297	0.8337	0.8236	0.8074	0.0072	0.0071	0.0076	0.0076
5	Kota Yogyakarta	1.3374	1.3300	1.3152	1.2784	0.0042	0.0041	0.0044	0.0045
1	Pacitan	0.3109	0.3160	0.3050	0.2953	0.0047	0.0045	0.0049	0.0048
2	Ponorogo	0.3668	0.3679	0.3612	0.3537	0.0077	0.0075	0.0080	0.0080
3	Trenggalek	0.3538	0.3710	0.3672	0.3634	0.0060	0.0056	0.0060	0.0060
4	Tulungagung	0.5455	0.5512	0.5519	0.5471	0.0083	0.0081	0.0087	0.0087
5	Blitar	0.4815	0.4865	0.4800	0.8838	0.0095	0.0093	0.0099	0.0098
6	Kediri	0.5217	0.5235	0.5136	0.4961	0.0117	0.0115	0.0124	0.0125
7	Malang	0.5578	0.5666	0.5589	0.5598	0.0205	0.0200	0.0214	0.0214
8	Lumajang	0.4812	0.4830	0.4803	0.4709	0.0082	0.0080	0.0085	0.0085
9	Jember	0.4997	0.5019	0.5023	0.4937	0.0182	0.0179	0.0189	0.0189
10	Banyuwangi	0.5556	0.5743	0.5740	0.5727	0.0127	0.0123	0.0132	0.0132
11	Bondowoso	0.4266	0.4309	0.4184	0.4082	0.0058	0.0056	0.0061	0.0060
12	Situbondo	0.7141	0.7197	0.6974	0.6838	0.0051	0.0049	0.0054	0.0054
13	Probolinggo	0.6950	0.7081	0.7073	0.6750	0.0082	0.0078	0.0083	0.0086
14	Pasuruan	0.5701	0.5719	0.5677	0.5625	0.0105	0.0102	0.0110	0.0109
15	Sidoarjo	1.5251	1.4959	1.4519	1.4104	0.0104	0.0105	0.0114	0.0115
16	Mojokerto	0.6964	0.7152	0.6886	0.6762	0.0076	0.0072	0.0079	0.0079
17	Jombang	0.4618	0.4632	0.4590	0.4482	0.0097	0.0095	0.0102	0.0101
18	Nganjuk	0.5448	0.5438	0.5362	0.5545	0.0088	0.0086	0.0091	0.0091
19	Madiun	0.4193	0.4234	0.4208	0.4146	0.0057	0.0056	0.0059	0.0058
20	Magetan	0.4404	0.4441	0.4394	0.4298	0.0059	0.0057	0.0061	0.0061
21	Ngawi	0.3893	0.3894	0.3809	0.3732	0.0074	0.0072	0.0077	0.0077
22	Bojonegoro	0.4148	0.4119	0.4069	0.3982	0.0102	0.0100	0.0106	0.0106
23	Tuban	0.5349	0.5690	0.5614	0.5549	0.0088	0.0086	0.0092	0.0092
24	Lamongan	0.4471	0.4534	0.4465	0.4354	0.0104	0.0101	0.0108	0.0108
25	Gresik	1.6943	1.4734	1.4506	1.4477	0.0080	0.0080	0.0086	0.0086
26	Bangkalan	0.5053	0.5047	0.4994	0.4881	0.0064	0.0064	0.0069	0.0069
27	Sampang	0.3547	0.3838	0.3755	0.3613	0.0062	0.0060	0.0064	0.0064
28	Pamekasan	0.3712	0.3432	0.3366	0.3224	0.0058	0.0057	0.0061	0.0061
29	Sumenep	0.4536	0.2945	0.2916	0.2843	0.0084	0.0081	0.0087	0.0087
30	Kota Kediri	12.0638	12.1831	12.3726	12.5250	0.0021	0.0020	0.0021	0.0021
31	Kota Blitar	0.6709	0.6626	0.6623	0.6502	0.0011	0.0010	0.0011	0.0011
32	Kota Malang	1.6229	1.6467	1.5918	1.5310	0.0062	0.0061	0.0066	0.0066
33	Kota Probolinggo	1.1557	1.1714	1.1676	1.1352	0.0016	0.0015	0.0016	0.0016
34	Kota Pasuruan	0.8376	0.8436	0.8417	0.8354	0.0014	0.0013	0.0014	0.0014
35	Kota Mojokerto	1.0222	1.0498	1.0737	1.0514	0.0009	0.0009	0.0010	0.0010
36	Kota Madiun	0.7518	0.7605	0.7449	0.7330	0.0016	0.0016	0.0017	0.0017
37	Kota Surabaya	3.2266	2.6862	2.6352	2.6082	0.0207	0.0204	0.0220	0.0220
38	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-

Share PDRB (Propinsi)

No.	Propinsi	1998	1999	2000	2001
1	DKI Jakarta	20.0321	19.9763	20.6310	21.3784
2	Jawa Barat	22.5673	24.1847	19.3663	19.0205
3	Jawa Tengah	22.9815	23.0641	23.4371	23.0135
4	DI Yogyakarta	3.7342	3.6900	3.6454	3.5525
5	Jawa Timur	37.6848	37.0849	36.9202	37.0350

Share Populasi (Propinsi)

1998	1999	2000	2001
0.0684	0.0664	0.0682	0.0662
0.3452	0.3597	0.3194	0.3216
0.2657	0.2608	0.2769	0.2769
0.0283	0.0277	0.0296	0.0297
0.2924	0.2854	0.3059	0.3056

Lampiran 9
Share PDRB/Share Populasi dan Log Share PDRB/Share Populasi
Tahun 1998-2001

No.	Region	Share PDRB / Share Populasi				Log Share PDRB / Share Populasi			
		1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001
1	Jakarta Selatan	148.6590	157.8432	191.8908	205.5427	2.1722	2.1982	2.2831	2.3129
2	Jakarta Timur	150.6047	152.8292	145.5665	143.5632	2.1778	2.1842	2.1631	2.1570
3	Jakarta Pusat	652.2233	671.4768	703.2634	911.5551	2.8144	2.8270	2.8471	2.9598
4	Jakarta Barat	226.5531	226.1084	210.0254	208.7765	2.3552	2.3543	2.3223	2.3197
5	Jakarta Utara	537.4275	551.4782	501.7687	489.9256	2.7303	2.7415	2.7005	2.6901
1	Pandeglang*	63.8816	65.8213	-	-	1.8054	1.8184	-	-
2	Lebak*	53.3934	56.2562	-	-	1.7275	1.7502	-	-
3	Bogor	16.0601	13.5697	18.8186	18.3706	1.2057	1.1326	1.2746	1.2641
4	Sukabumi	30.7611	27.5925	28.2047	28.3045	1.4880	1.4408	1.4503	1.4519
5	Cianjur	34.2915	34.4534	29.0349	28.3522	1.5352	1.5372	1.4629	1.4526
6	Bandung	30.3487	30.6767	21.2672	20.6586	1.4821	1.4868	1.3277	1.3151
7	Garut	33.5686	33.7486	27.7202	27.0074	1.5259	1.5283	1.4428	1.4315
8	Tasikmalaya	30.0150	32.6656	27.2050	26.6560	1.4773	1.5141	1.4346	1.4258
9	Ciamis	44.7488	45.2894	42.4406	41.9694	1.6508	1.6560	1.6278	1.6229
10	Kuningan	57.5874	43.9906	50.4442	49.5392	1.7603	1.6434	1.7028	1.6949
11	Cirebon	24.9091	25.4325	23.0096	22.7668	1.3964	1.4054	1.3619	1.3573
12	Majalengka	50.3714	51.9852	47.9892	48.2129	1.7022	1.7159	1.6811	1.6832
13	Sumedang	73.6612	74.8135	59.9290	58.3203	1.8672	1.8740	1.7776	1.7658
14	Indramayu	120.9602	106.6236	94.9459	91.0081	2.0826	2.0279	1.9775	1.9591
15	Subang	62.2196	62.1206	54.8790	54.2834	1.7939	1.7932	1.7394	1.7347
16	Purwakarta	131.6359	279.5801	213.0928	205.6778	2.1194	2.4465	2.3286	2.3132
17	Karawang	51.1681	54.1440	47.7209	49.6912	1.7090	1.7336	1.6787	1.6963
18	Bekasi	160.3094	165.2504	170.7111	160.6673	2.2050	2.2181	2.2323	2.2059
19	Tangerang*	30.7134	30.4881	-	-	1.4873	1.4841	-	-
20	Serang*	94.9117	95.1897	-	-	1.9773	1.9786	-	-
21	Kota Bogor	120.5332	143.0728	110.3147	94.7645	2.0811	2.1556	2.0426	1.9766
22	Kota Sukabumi	464.5465	482.3804	400.6825	389.4402	2.6670	2.6834	2.6028	2.5904
23	Kota Bandung	48.7125	49.0978	66.5719	68.6954	1.6876	1.6911	1.8233	1.8369
24	Kota Cirebon	1039.9961	1072.0598	994.4361	989.8569	3.0170	3.0302	2.9976	2.9956
25	Kota Tangerang*	183.4174	174.3320	-	-	2.2634	2.2414	-	-
26	Kota Bekasi	-	77.4296	66.5367	62.3303	-	1.8889	1.8231	1.7947
27	Kota Depok	-	-	52.6014	50.4228	-	-	1.7210	1.7026
28	Kota Cilegon*	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Cilacap	136.6590	142.7161	135.4444	135.0469	2.1356	2.1545	2.1318	2.1305
2	Banyumas	28.3842	28.7431	26.1153	25.0644	1.4531	1.4585	1.4169	1.3991
3	Purbalingga	57.4761	58.9389	53.1386	52.0326	1.7595	1.7704	1.7254	1.7163
4	Banjarnegara	69.6514	70.2784	65.5542	62.2343	1.8429	1.8468	1.8166	1.7940
5	Kebumen	35.3035	37.0157	35.5174	34.5600	1.5478	1.5684	1.5504	1.5386
6	Purworejo	74.0810	77.4974	73.5512	73.3430	1.8697	1.8893	1.8666	1.8654
7	Wonosobo	56.4713	58.9186	52.0699	49.5573	1.7518	1.7703	1.7166	1.6951
8	Magelang	51.8077	53.2776	47.0180	46.3520	1.7144	1.7265	1.6723	1.6661
9	Boyolali	66.1390	67.7231	60.4684	59.7128	1.8205	1.8307	1.7815	1.7761
10	Klaten	53.0032	54.0698	52.0538	52.0843	1.7243	1.7330	1.7165	1.7167
11	Sukoharjo	113.7504	114.5831	100.2176	97.5505	2.0560	2.0591	2.0009	1.9892
12	Wonogiri	43.7057	45.2819	44.6675	44.1687	1.6405	1.6559	1.6500	1.6451
13	Karanganyar	111.7949	114.7873	111.4572	107.0886	2.0484	2.0599	2.0471	2.0297
14	Sragen	52.2156	53.8828	52.2259	51.2462	1.7178	1.7314	1.7179	1.7097
15	Grobogan	26.4640	25.7112	23.9386	23.5771	1.4227	1.4101	1.3791	1.3725
16	Bloro	60.6018	62.0697	57.1839	56.1230	1.7825	1.7929	1.7573	1.7491
17	Rembang	86.2078	88.8851	87.2062	86.0339	1.9355	1.9488	1.9405	1.9347
18	Pati	43.2881	44.7679	38.2432	37.3561	1.6364	1.6510	1.5826	1.5724
19	Kudus	358.0119	358.4737	333.9068	324.8191	2.5539	2.5545	2.5236	2.5116
20	Jepara	65.0040	65.2166	56.7874	55.4835	1.8129	1.8144	1.7543	1.7442
21	Demak	46.9747	47.7066	42.4969	40.7505	1.6719	1.6786	1.6284	1.6101
22	Semarang	82.5308	84.7182	81.2762	79.8995	1.9166	1.9280	1.9100	1.9025
23	Temanggung	89.5236	92.5833	85.3143	84.5373	1.9519	1.9665	1.9310	1.9270

24	Kendal	116.3801	119.3571	115.4755	113.0227	2.0659	2.0768	2.0625	2.0532
25	Batang	100.9583	104.4152	88.6245	85.5477	2.0041	2.0188	1.9476	1.9322
26	Pekalongan	86.7081	91.0102	72.6041	70.9652	1.9381	1.9591	1.8610	1.8510
27	Pemalang	39.3486	39.7673	36.8771	35.7391	1.5949	1.5995	1.5668	1.5531
28	Tegal	28.0055	28.8317	25.6884	25.3293	1.4472	1.4599	1.4097	1.4036
29	Brebes	25.1114	25.9639	25.7655	25.4016	1.3999	1.4144	1.4110	1.4049
30	Kota Magelang	1094.5219	1132.4238	1254.1775	1236.0232	3.0392	3.0540	3.0984	3.0920
31	Kota Surakarta	252.5799	259.7321	289.5219	289.8611	2.4024	2.4145	2.4617	2.4622
32	Kota Salatiga	1264.1764	1266.8244	600.0810	562.0997	3.1018	3.1027	2.7782	2.7498
33	Kota Semarang	137.0318	139.8377	152.0372	151.7095	2.1368	2.1456	2.1819	2.1810
34	Kota Pekalongan	169.2403	160.9249	340.0717	336.2850	2.2285	2.2066	2.5316	2.5267
35	Kota Tegal	181.9388	170.3329	342.9229	345.8140	2.2599	2.2313	2.5352	2.5388
1	Kulon Progo	115.3017	105.2916	96.6941	93.8195	2.0618	2.0224	1.9854	1.9723
2	Bantul	79.4056	81.3876	75.2995	73.6104	1.8999	1.9106	1.8768	1.8669
3	Gunung Kidul	93.2196	96.6948	89.6413	87.6900	1.9695	1.9854	1.9525	1.9429
4	Sleman	115.1304	117.9513	108.4521	105.7401	2.0612	2.0717	2.0352	2.0242
5	Kota Yogyakarta	318.0374	322.0117	295.9733	286.2783	2.5025	2.5079	2.4713	2.4568
1	Pacitan	66.4950	70.2774	62.6205	60.9795	1.8228	1.8468	1.7967	1.7852
2	Ponorogo	47.4296	48.7855	44.8796	44.1816	1.6760	1.6883	1.6520	1.6452
3	Trenggalek	59.1712	66.0039	61.1731	60.7123	1.7721	1.8196	1.7866	1.7833
4	Tulungagung	65.8323	68.0383	63.6260	63.1318	1.8184	1.8328	1.8036	1.8002
5	Blitar	50.5049	52.5034	48.6458	89.9722	1.7033	1.7202	1.6870	1.9541
6	Kediri	44.5223	45.6965	41.4244	39.7395	1.6486	1.6599	1.6173	1.5992
7	Malang	27.2020	28.2830	26.0749	26.1668	1.4346	1.4515	1.4162	1.4178
8	Lumajang	58.8977	60.5015	56.5671	55.6831	1.7701	1.7818	1.7526	1.7457
9	Jember	27.4358	28.0980	26.5189	26.1245	1.4383	1.4487	1.4236	1.4170
10	Banyuwangi	43.7724	46.5645	43.3968	43.5450	1.6412	1.6681	1.6375	1.6389
11	Bondowoso	73.6220	76.5905	68.9274	68.0248	1.8670	1.8842	1.8384	1.8327
12	Situbondo	140.7564	146.0747	129.1455	127.7954	2.1485	2.1646	2.1111	2.1065
13	Probolinggo	85.0871	90.5165	85.2103	78.7749	1.9299	1.9567	1.9305	1.8964
14	Pasuruan	54.4538	55.8134	51.6337	51.4761	1.7360	1.7467	1.7129	1.7116
15	Sidoarjo	146.3221	143.1430	127.3932	122.3507	2.1653	2.1558	2.1051	2.0876
16	Mojokerto	91.8979	99.0018	86.8922	85.4368	1.9633	1.9956	1.9390	1.9316
17	Jombang	47.4066	48.7004	45.1927	44.2909	1.6758	1.6875	1.6551	1.6463
18	Nganjuk	62.0561	63.5682	58.8283	61.2247	1.7928	1.8032	1.7696	1.7869
19	Madiun	73.6555	76.2836	71.4435	71.0465	1.8672	1.8824	1.8540	1.8515
20	Magetan	74.5844	77.3083	71.7848	70.5432	1.8726	1.8882	1.8560	1.8485
21	Ngawi	52.5010	53.7670	49.3397	48.5368	1.7202	1.7305	1.6932	1.6861
22	Bojonegoro	40.5204	41.3079	38.2126	37.4897	1.6077	1.6160	1.5822	1.5739
23	Tuban	60.7715	66.0665	61.0615	60.5858	1.7837	1.8200	1.7858	1.7824
24	Lamongan	43.0144	44.7966	41.3515	40.3400	1.6336	1.6512	1.6165	1.6057
25	Gresik	210.5253	184.2977	168.4668	168.4962	2.3233	2.2655	2.2265	2.2266
26	Bangkalan	78.7696	79.4457	72.8378	70.7800	1.8964	1.9001	1.8624	1.8499
27	Sampang	57.1864	63.6938	58.3535	56.1505	1.7573	1.8041	1.7661	1.7494
28	Pamekasan	63.6871	60.2698	55.4977	52.8867	1.8041	1.7801	1.7443	1.7233
29	Sumenep	54.2666	36.2463	33.5475	32.5856	1.7345	1.5593	1.5257	1.5130
30	Kota Kediri	5839.0648	6073.6972	5765.2864	5879.8047	3.7663	3.7835	3.7608	3.7694
31	Kota Blitar	633.7330	639.9371	597.5118	589.2727	2.8019	2.8061	2.7763	2.7703
32	Kota Malang	261.2195	269.8303	242.1091	230.9860	2.4170	2.4311	2.3840	2.3636
33	Kota Probolinggo	731.7100	762.9221	715.2949	699.6931	2.8643	2.8825	2.8545	2.8449
34	Kota Pasuruan	611.8943	630.7511	588.8941	586.4330	2.7867	2.7999	2.7700	2.7682
35	Kota Mojokerto	1091.4275	1146.1346	1104.5869	1091.7596	3.0380	3.0592	3.0432	3.0381
36	Kota Madiun	461.4678	483.1638	439.5788	433.7662	2.6641	2.6841	2.6430	2.6373
37	Kota Surabaya	155.5126	131.9440	119.7988	118.7548	2.1918	2.1204	2.0785	2.0747
38	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-

Share PDRB / Share Populasi (Propinsi)

No.	Propinsi	1998	1999	2000	2001
1	DKI Jakarta	293.0453	300.8382	302.5788	323.0527
2	Jawa Barat	65.3675	67.2273	60.6352	59.1442
3	Jawa Tengah	86.5065	88.4294	84.6463	83.1052
4	DI Yogyakarta	131.9168	133.2952	122.9649	119.7455
5	Jawa Timur	128.8661	129.9625	120.6950	121.1718

Lampiran 10
Hasil Perhitungan Indeks Entropy Theil Persamaan 6.1
Tahun 1998-2001

Hasil Perhitungan Theil

No.	Kabupaten/Kota	1998		1999		2000		2001	
		Theil	%	Theil	%	Theil	%	Theil	%
1	Jakarta Selatan	5.5998	2.22	5.7842	2.26	6.8321	2.78	7.0977	2.87
2	Jakarta Timur	5.8868	2.33	5.8252	2.28	5.8107	2.36	5.6921	2.30
3	Jakarta Pusat	17.7826	7.04	17.8272	6.97	19.0244	7.73	22.3501	9.03
4	Jakarta Barat	7.0940	2.81	6.9554	2.72	6.8376	2.78	6.7584	2.73
5	Jakarta Utara	14.7999	5.86	14.8529	5.80	14.3823	5.84	14.0050	5.66
	DKI Jakarta	**51.1631**	**20.25**	**51.2449**	**20.03**	**52.8871**	**21.48**	**55.9032**	**22.59**
1	Pandeglang*	0.9512	0.38	0.9814	0.38	-	-	-	-
2	Lebak*	0.7939	0.31	0.8421	0.33	-	-	-	-
3	Bogor	0.7376	0.29	0.6312	0.25	0.7531	0.31	0.7313	0.30
4	Sukabumi	0.7624	0.30	0.6931	0.27	0.7581	0.31	0.7635	0.31
5	Cianjur	0.8228	0.33	0.8207	0.32	0.7382	0.30	0.7178	0.29
6	Bandung	1.3543	0.54	1.3630	0.53	1.0535	0.43	1.0257	0.41
7	Garut	0.8317	0.33	0.8315	0.32	0.7349	0.30	0.7126	0.29
8	Tasikmalaya	0.7345	0.29	0.8074	0.32	0.7197	0.29	0.7009	0.28
9	Ciamis	1.0099	0.40	1.0140	0.40	0.9939	0.40	0.9760	0.39
10	Kuningan	0.8233	0.33	0.5779	0.23	0.7578	0.31	0.7393	0.30
11	Cirebon	0.5531	0.22	0.5635	0.22	0.5389	0.22	0.5327	0.22
12	Majalengka	0.8125	0.32	0.8325	0.33	0.8113	0.33	0.8131	0.33
13	Sumedang	1.0502	0.42	1.0559	0.41	0.9269	0.38	0.8988	0.36
14	Indramayu	3.3744	1.34	2.8669	1.12	2.6789	1.09	2.5383	1.03
15	Subang	1.2244	0.48	1.2042	0.47	1.1330	0.46	1.1152	0.45
16	Purwakarta	1.5061	0.60	3.6552	1.43	3.1176	1.27	3.0157	1.22
17	Karawang	1.2334	0.49	1.3137	0.51	1.2723	0.52	1.3447	0.54
18	Bekasi	5.2055	2.06	5.2885	2.07	5.6327	2.29	5.3655	2.17
19	Tangerang*	1.0705	0.42	1.0575	0.41	-	-	-	-
20	Serang*	2.7910	1.10	2.7851	1.09	-	-	-	-
21	Kota Bogor	1.4401	0.57	1.7477	0.68	1.5072	0.61	1.3525	0.55
22	Kota Sukabumi	2.5202	1.00	2.5809	1.01	2.3672	0.96	2.3173	0.94
23	Kota Bandung	1.7853	0.71	1.7905	0.70	2.3389	0.95	2.4145	0.98
24	Kota Cirebon	7.2454	2.87	7.3475	2.87	7.2192	2.93	7.1570	2.89
25	Kota Tangerang*	4.8124	1.90	4.6277	1.81	-	-	-	-
26	Kota Bekasi	-	-	1.9298	0.75	1.7890	0.73	1.7026	0.69
27	Kota Depok	-	-	-	-	0.9334	0.38	0.9062	0.37
28	Kota Cilegon*	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jawa Barat	**45.4459**	**17.99**	**49.2094**	**19.23**	**38.7757**	**15.75**	**37.8411**	**15.29**
1	Cilacap	3.9880	1.58	4.1171	1.61	4.1585	1.69	4.1396	1.67
2	Banyumas	0.5057	0.20	0.5036	0.20	0.4820	0.20	0.4565	0.18
3	Purbalingga	0.6741	0.27	0.6791	0.27	0.6456	0.26	0.6279	0.25
4	Banjarnegara	0.9274	0.37	0.9200	0.36	0.8907	0.36	0.8350	0.34
5	Kebumen	0.5513	0.22	0.5729	0.22	0.5752	0.23	0.5530	0.22
6	Purworejo	0.8559	0.34	0.8805	0.34	0.8692	0.35	0.8587	0.35
7	Wonosobo	0.6033	0.24	0.6239	0.24	0.5876	0.24	0.5539	0.22
8	Magelang	0.8140	0.32	0.8240	0.32	0.7730	0.31	0.7589	0.31
9	Boyolali	0.9118	0.36	0.9177	0.36	0.8639	0.35	0.8482	0.34
10	Klaten	0.8860	0.35	0.8865	0.35	0.8902	0.36	0.8844	0.36
11	Sukoharjo	1.4882	0.59	1.4801	0.58	1.3869	0.56	1.3509	0.55
12	Wonogiri	0.6155	0.24	0.6278	0.25	0.6407	0.26	0.6265	0.25
13	Karanganyar	1.5027	0.59	1.5272	0.60	1.5494	0.63	1.4765	0.60
14	Sragen	0.6665	0.26	0.6776	0.26	0.6803	0.28	0.6602	0.27
15	Grobogan	0.4025	0.16	0.3803	0.15	0.3736	0.15	0.3668	0.15
16	Blora	0.7550	0.30	0.7593	0.30	0.7309	0.30	0.7121	0.29
17	Rembang	0.8087	0.32	0.8247	0.32	0.8445	0.34	0.8302	0.34
18	Pati	0.6814	0.27	0.6927	0.27	0.6231	0.25	0.6045	0.24
19	Kudus	5.5193	2.18	5.4530	2.13	5.3185	2.16	5.1630	2.09
20	Jepara	0.9332	0.37	0.9228	0.36	0.8630	0.35	0.8458	0.34

21	Demak	0.6346	0.25	0.6387	0.25	0.6011	0.24	0.5760	0.23
22	Semarang	1.1384	0.45	1.1491	0.45	1.1566	0.47	1.1306	0.46
23	Temanggung	0.9881	0.39	1.0066	0.39	0.9781	0.40	0.9664	0.39
24	Kendal	1.7907	0.71	1.8102	0.71	1.8114	0.74	1.7615	0.71
25	Batang	1.1029	0.44	1.1238	0.44	1.0223	0.42	0.9805	0.40
26	Pekalongan	1.0716	0.42	1.1110	0.43	0.9664	0.39	0.9451	0.38
27	Pemalang	0.6700	0.27	0.6695	0.26	0.6517	0.26	0.6291	0.25
28	Tegal	0.4645	0.18	0.4733	0.18	0.4478	0.18	0.4409	0.18
29	Brebes	0.5197	0.21	0.5364	0.21	0.5525	0.22	0.5444	0.22
30	Kota Magelang	3.5991	1.42	3.6840	1.44	4.0640	1.65	3.9794	1.61
31	Kota Surakarta	2.7927	1.11	2.8187	1.10	3.1379	1.27	3.1169	1.26
32	Kota Salatiga	3.5684	1.41	3.5447	1.39	2.2529	0.92	2.1391	0.86
33	Kota Semarang	3.5865	1.42	3.6374	1.42	4.0045	1.63	3.9910	1.61
34	Kota Pekalongan	1.2109	0.48	1.1721	0.46	2.0201	0.82	1.9936	0.81
35	Kota Tegal	1.1612	0.46	1.1022	0.43	1.8462	0.75	1.8541	0.75
	Jawa Tengah	**48.3897**	**19.15**	**48.7485**	**19.05**	**49.2601**	**20.01**	**48.2012**	**19.48**
1	Kulon Progo	0.9046	0.36	0.7907	0.31	0.7612	0.31	0.7321	0.30
2	Bantul	1.0036	0.40	1.0113	0.40	0.9830	0.40	0.9558	0.39
3	Gunung Kidul	1.1819	0.47	1.2033	0.47	1.1704	0.48	1.1337	0.46
4	Sleman	1.7102	0.68	1.7271	0.68	1.6762	0.68	1.6344	0.66
5	Kota Yogyakarta	3.3467	1.32	3.3354	1.30	3.2501	1.32	3.1409	1.27
	DI Yogyakarta	**8.1470**	**3.22**	**8.0678**	**3.15**	**7.8409**	**3.19**	**7.5969**	**3.07**
1	Pacitan	0.5666	0.22	0.5836	0.23	0.5480	0.22	0.5272	0.21
2	Ponorogo	0.6147	0.24	0.6211	0.24	0.5968	0.24	0.5820	0.24
3	Trenggalek	0.6270	0.25	0.6750	0.26	0.6561	0.27	0.6480	0.26
4	Tulungagung	0.9920	0.39	1.0102	0.39	0.9954	0.40	0.9850	0.40
5	Blitar	0.8201	0.32	0.8368	0.33	0.8098	0.33	1.7270	0.70
6	Kediri	0.8601	0.34	0.8690	0.34	0.8307	0.34	0.7933	0.32
7	Malang	0.8003	0.32	0.8224	0.32	0.7915	0.32	0.7937	0.32
8	Lumajang	0.8518	0.34	0.8606	0.34	0.8418	0.34	0.8221	0.33
9	Jember	0.7187	0.28	0.7271	0.28	0.7150	0.29	0.6997	0.28
10	Banyuwangi	0.9119	0.36	0.9579	0.37	0.9399	0.38	0.9387	0.38
11	Bondowoso	0.7964	0.32	0.8119	0.32	0.7692	0.31	0.7481	0.30
12	Situbondo	1.5341	0.61	1.5578	0.61	1.4723	0.60	1.4404	0.58
13	Probolinggo	1.3413	0.53	1.3855	0.54	1.3655	0.55	1.2800	0.52
14	Pasuruan	0.9896	0.39	0.9989	0.39	0.9724	0.40	0.9628	0.39
15	Sidoarjo	3.3024	1.31	3.2249	1.26	3.0564	1.24	2.9444	1.19
16	Mojokerto	1.3672	0.54	1.4272	0.56	1.3352	0.54	1.3062	0.53
17	Jombang	0.7739	0.31	0.7816	0.31	0.7597	0.31	0.7380	0.30
18	Nganjuk	0.9768	0.39	0.9805	0.38	0.9489	0.39	0.9909	0.40
19	Madiun	0.7828	0.31	0.7971	0.31	0.7801	0.32	0.7677	0.31
20	Magetan	0.8247	0.33	0.8385	0.33	0.8156	0.33	0.7945	0.32
21	Ngawi	0.6696	0.27	0.6738	0.26	0.6449	0.26	0.6292	0.25
22	Bojonegoro	0.6669	0.26	0.6656	0.26	0.6438	0.26	0.6267	0.25
23	Tuban	0.9541	0.38	1.0355	0.40	1.0025	0.41	0.9891	0.40
24	Lamongan	0.7304	0.29	0.7486	0.29	0.7217	0.29	0.6992	0.28
25	Gresik	3.9363	1.56	3.3380	1.30	3.2297	1.31	3.2235	1.30
26	Bangkalan	0.9583	0.38	0.9589	0.37	0.9300	0.38	0.9029	0.36
27	Sampang	0.6234	0.25	0.6924	0.27	0.6631	0.27	0.6321	0.26
28	Pamekasan	0.6697	0.27	0.6109	0.24	0.5871	0.24	0.5557	0.22
29	Sumenep	0.7868	0.31	0.4592	0.18	0.4449	0.18	0.4302	0.17
30	Kota Kediri	45.4365	17.98	46.0942	18.02	46.5312	18.90	47.2114	19.08
31	Kota Blitar	1.8798	0.74	1.8593	0.73	1.8386	0.75	1.8013	0.73
32	Kota Malang	3.9225	1.55	4.0032	1.56	3.7948	1.54	3.6186	1.46
33	Kota Probolinggo	3.3105	1.31	3.3766	1.32	3.3328	1.35	3.2296	1.31
34	Kota Pasuruan	2.3341	0.92	2.3619	0.92	2.3315	0.95	2.3125	0.93
35	Kota Mojokerto	3.1055	1.23	3.2116	1.26	3.2675	1.33	3.1942	1.29
36	Kota Madiun	2.0029	0.79	2.0413	0.80	1.9687	0.80	1.9332	0.78
37	Kota Surabaya	7.0719	2.80	5.6958	2.23	5.4771	2.22	5.4111	2.19
38	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jawa Timur	**99.5116**	**39.39**	**98.5947**	**38.53**	**97.4103**	**39.57**	**97.8900**	**39.56**
	Total Jawa	**252.6574**	**100.00**	**255.8652**	**100.00**	**246.1742**	**100.00**	**247.4325**	**100.00**

Lampiran 11
Hasil Perhitungan Indeks Entropt Theil Persamaan 6.2-6.4
Tahun 1998-2001

Propinsi	1998	1999	2000	2001
DKI Jakarta				
Within Region	0.0871	0.0870	0.0826	0.1057
Between Region	49.4180	49.5079	51.1822	53.6442
Jawa Barat				
Within Region	0.1984	0.2072	0.2195	0.2176
Between Region	40.9679	44.1986	34.5248	33.7027
Jawa Tengah				
Within Region	0.1685	0.1670	0.1742	0.1748
Between Region	44.5163	44.8965	45.1776	44.1774
DI Yogyakarta				
Within Region	0.0615	0.0616	0.0611	0.0602
Between Region	7.9175	7.8406	7.6180	7.3831
Jawa Timur				
Within Region	0.5305	0.5448	0.5567	0.5598
Between Region	79.5203	78.3908	76.8563	77.1588

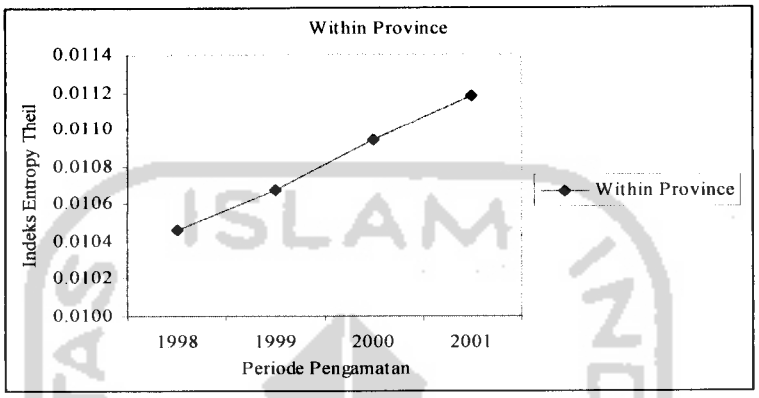
Propinsi	1998		1999		2000		2001	
	Theil	%	Theil	%	Theil	%	Theil	%
DKI Jakarta	0.0009	0.04	0.0009	0.04	0.0008	0.04	0.0011	0.05
Jawa Barat	0.0020	0.09	0.0021	0.09	0.0022	0.10	0.0022	0.10
Jawa Tengah	0.0017	0.08	0.0017	0.07	0.0017	0.08	0.0017	0.08
DI Yogyakarta	0.0006	0.03	0.0006	0.03	0.0006	0.03	0.0006	0.03
Jawa Timur	0.0053	0.24	0.0054	0.24	0.0056	0.26	0.0056	0.26
Within Province	0.0105	0.47	0.0107	0.47	0.0109	0.51	0.0112	0.51

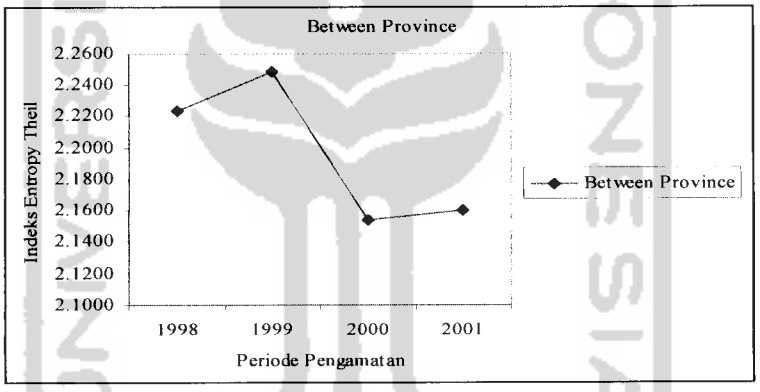
Propinsi	1998		1999		2000		2001	
	Theil	%	Theil	%	Theil	%	Theil	%
DKI Jakarta	0.4942	22.12	0.4951	21.92	0.5118	23.65	0.5364	24.70
Jawa Barat	0.4097	18.34	0.4420	19.57	0.3452	15.95	0.3370	15.52
Jawa Tengah	0.4452	19.93	0.4490	19.87	0.4518	20.87	0.4418	20.34
DI Yogyakarta	0.0792	3.54	0.0784	3.47	0.0762	3.52	0.0738	3.40
Jawa Timur	0.7952	35.60	0.7839	34.70	0.7686	35.51	0.7716	35.53
Between Province	2.2234	99.53	2.2483	99.53	2.1536	99.49	2.1607	99.49

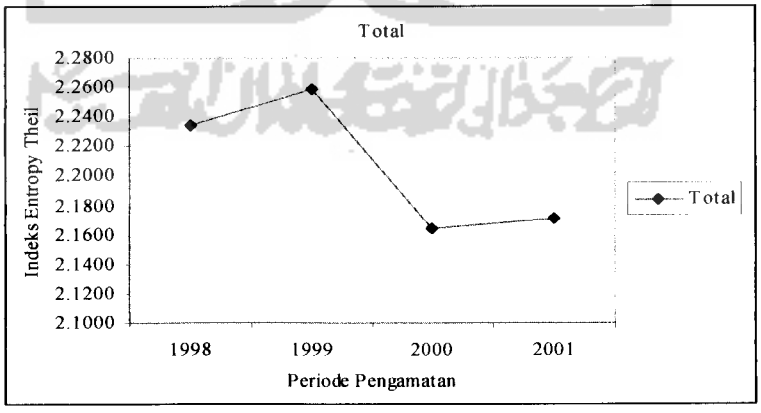
Indeks Entropy Theil	1998		1999		2000		2001		Rata-rata	
	Theil	%	Theil	%	Theil	%	Theil	%	Theil	%
Dalam Propinsi	0.0105	0.47	0.0107	0.47	0.0109	0.51	0.0112	0.51	0.0108	0.49
Antar Propinsi	2.2234	99.53	2.2483	99.53	2.1536	99.49	2.1607	99.49	2.1965	99.51
Total	2.2339	100.00	2.2590	100.00	2.1645	100.00	2.1718	100.00	2.2073	100.00

Indeks Entropy Theil	1998	1999		2000		2001		Rata-rata
	Theil	Theil	Laju	Theil	Laju	Theil	Laju	Laju
Between Province	0.0105	0.0107	2.06	0.0109	2.50	0.0112	2.18	2.24
Within Province	2.2234	2.2483	1.12	2.1536	-4.21	2.1607	0.33	-0.92
Total	2.2339	2.2590	1.13	2.1645	-4.18	2.1718	0.34	-0.91

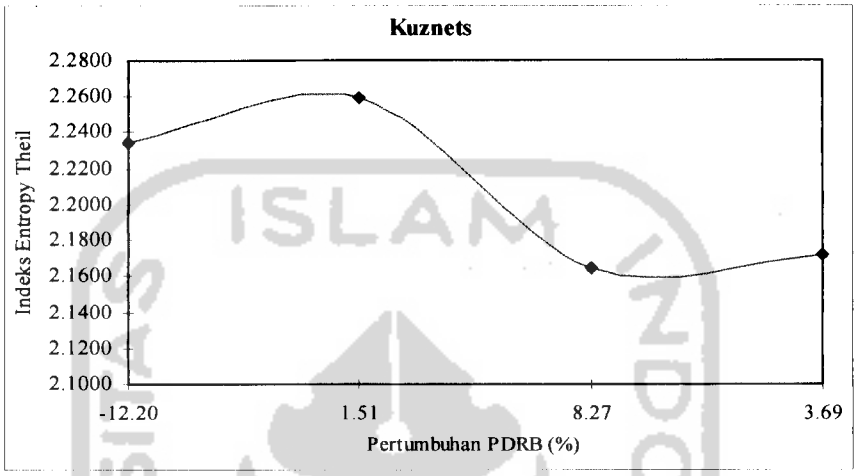
Lampiran 12
Grafik Dalam Propinsi, Antar Propinsi, dan Total Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa, Tahun 1998-2001







Lampiran 13
Kurva Hubungan antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Regional dengan Pertumbuhan PDRB di Jawa
Tahun 1998-2001



Lampiran 14
Korelasi antara Kesenjangan Pendapatan Regional dan Pertumbuhan PDRB di Jawa Tahun 1998-2001

Correlations

		Pertumbuhan PDRB (%)	Indeks Entropy Theil
Pertumbuhan PDRB (%)	Pearson Correlation	1.000	-.595
	Sig. (2-tailed)	.	.405
	N	4	4
Indeks Entropy Theil	Pearson Correlation	-.595	1.000
	Sig. (2-tailed)	.405	.
	N	4	4